



LAPORAN PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI TRIWULAN VIII TAHUN 2021-2022

Februari 2023

Laporan ini disiapkan oleh
Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi
(SETNAS PK)



Laporan akhir ini dimaksudkan untuk
menggambarkan progres capaian output dan outcome yang dihasilkan
dari pelaksanaan 12 aksi pencegahan korupsi periode 2021-2022

KATA TIMNAS PK



Firli Bahuri

Komisi Pemberantasan Korupsi

“ Perbaiki sistem yang dikawal Stranas PK sejalan dengan apa yang dilakukan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi, yakni pendekatan pencegahan dengan membangun sistem. Misalnya pemanfaatan sistem teknologi informasi sehingga menghindari kontak fisik untuk transaksi

”



Tito Karnavian

Kementerian Dalam Negeri

“ Salah satu penyebab korupsi adalah penerapan administrasi pemerintahan seperti sistem yang masih mengandalkan pertemuan fisik, alur birokrasi yang berbelit-belit, dan regulasi yang terlalu panjang

”

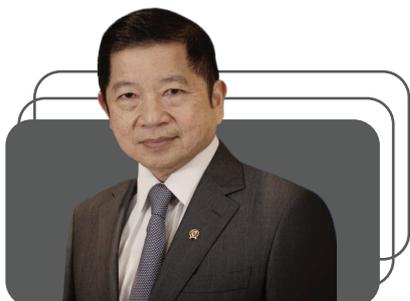


Tjahyo Kumolo

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

“ Sudah satu dasawarsa reformasi birokrasi berjalan namun kasus korupsi terus terjadi. Itulah kenapa Stranas PK sejak 2018 mulai mengkonsolidasikan program pencegahan korupsi secara kolaboratif dan bersinergi

”



Suharso Monoarfa

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

“ Salah satu bagian penting dari reformasi birokrasi adalah integrasi perencanaan penganggaran. Sehingga kita bisa meningkatkan kualitas belanja pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dalam penanganan sebuah isu

”



Moeldoko

Kantor Staf Presiden

“ Saya ingin mengingatkan arahan Bapak Presiden yang sering disampaikan, yaitu untuk menciptakan sistem yang menutup celah korupsi, jangan menyalahgunakan kewenangan, dan jangan mau disuap

”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Periode 2021-2022. Saat ini, implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sedang memasuki periode 2023-2024 atau tahun ke-5 sejak aksi-aksi pencegahan korupsi resmi diluncurkan pada awal tahun 2019.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada triwulan akhir tahun 2022, ditemukan banyak perubahan yang dihasilkan walupun ada juga capaian yang tidak menggembirakan selama periode pelaksanaan aksi PK tahun 2021-2022.

Berdasarkan hasil evaluasi dari tim independen, implementasi Stranas PK telah memberi kontribusi perubahan yang sangat positif. Stranas PK, oleh berbagai pemangku kepentingan yang di wawancara, dianggap telah memainkan peran penting sebagai fasilitator yang membantu dan mempercepat proses koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan program. Salah satu manfaat terbesar dari pelaksanaan Aksi PK 2021-2022 adalah terjadinya efisiensi sistem dan proses bisnis di pemerintahan yang memudahkan pengawasan terhadap risiko tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, masih ada banyak kendala dan tantangan yang perlu diatasi.

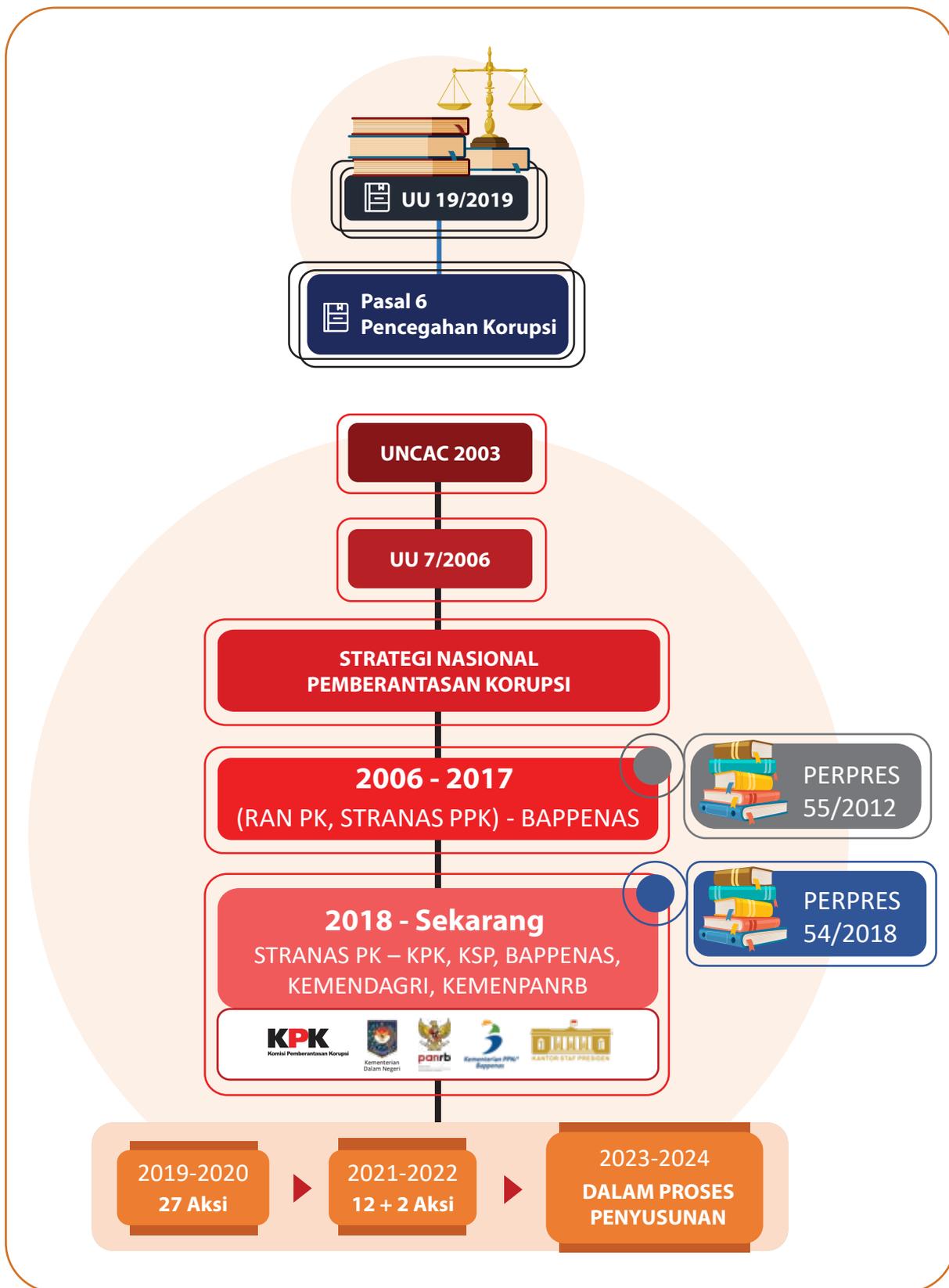
Hingga periode B24 tahun 2021-2022 berakhir dan dilanjutkan dengan periode tahun 2023-2024, aksi-aksi pencegahan korupsi yang dikawal Stranas PK masih terus berupaya mempercepat pembenahan-pembenahan pada 3 aspek yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan aksi PK selama ini. Pertama, terkait dengan ketersediaan dan kelengkapan data. Kedua, integrasi sistem baik antar-instansi maupun inter-instansi. Ketiga terkait lemahnya pengawasan internal.

Akhir kata, semoga Laporan Akhir Pelaksanaan Aksi PK periode 2021-2022 ini dapat menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan aksi pada periode berikutnya dan juga dapat memberikan nilai tambah dalam rangka kolaborasi dan sinergi pencegahan korupsi di Indonesia.

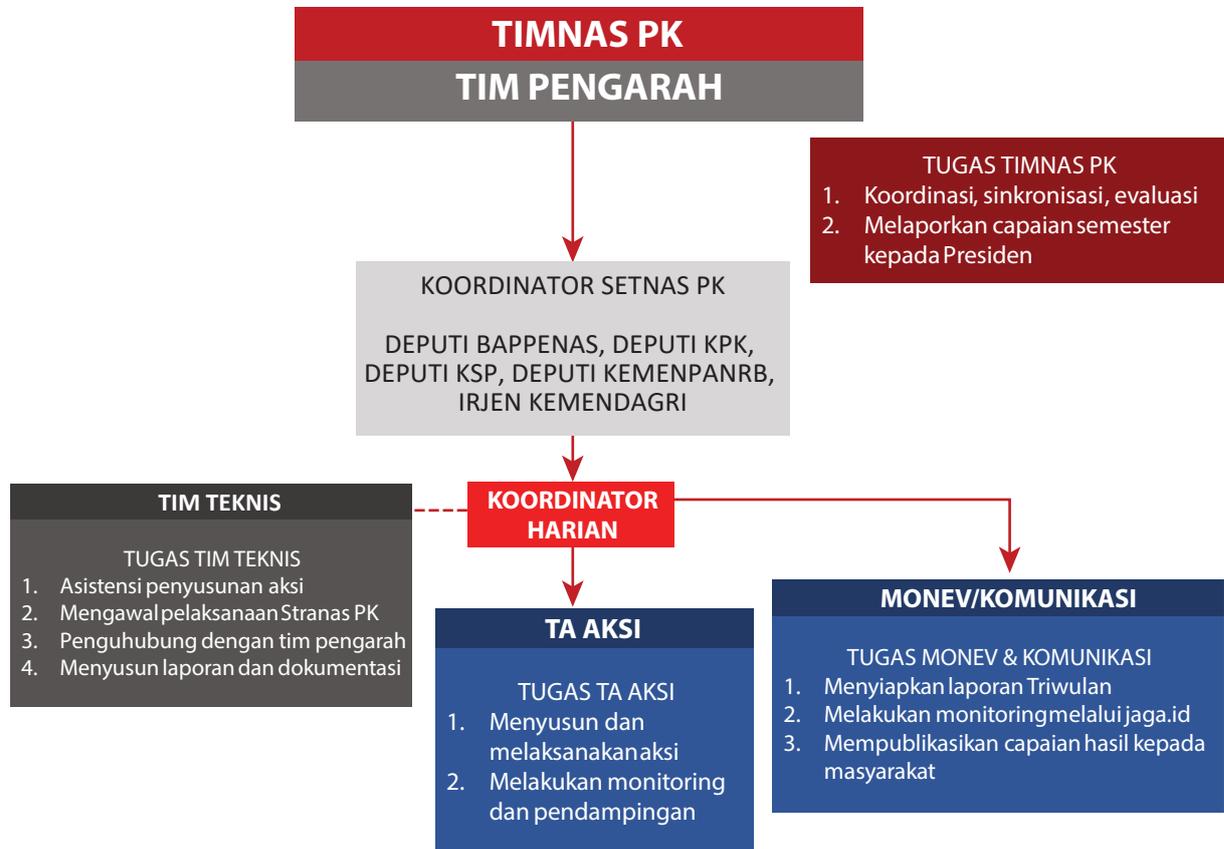
Jakarta, Februari 2023

Tim Nasional Pencegahan Korupsi

SEJARAH STRANAS PK

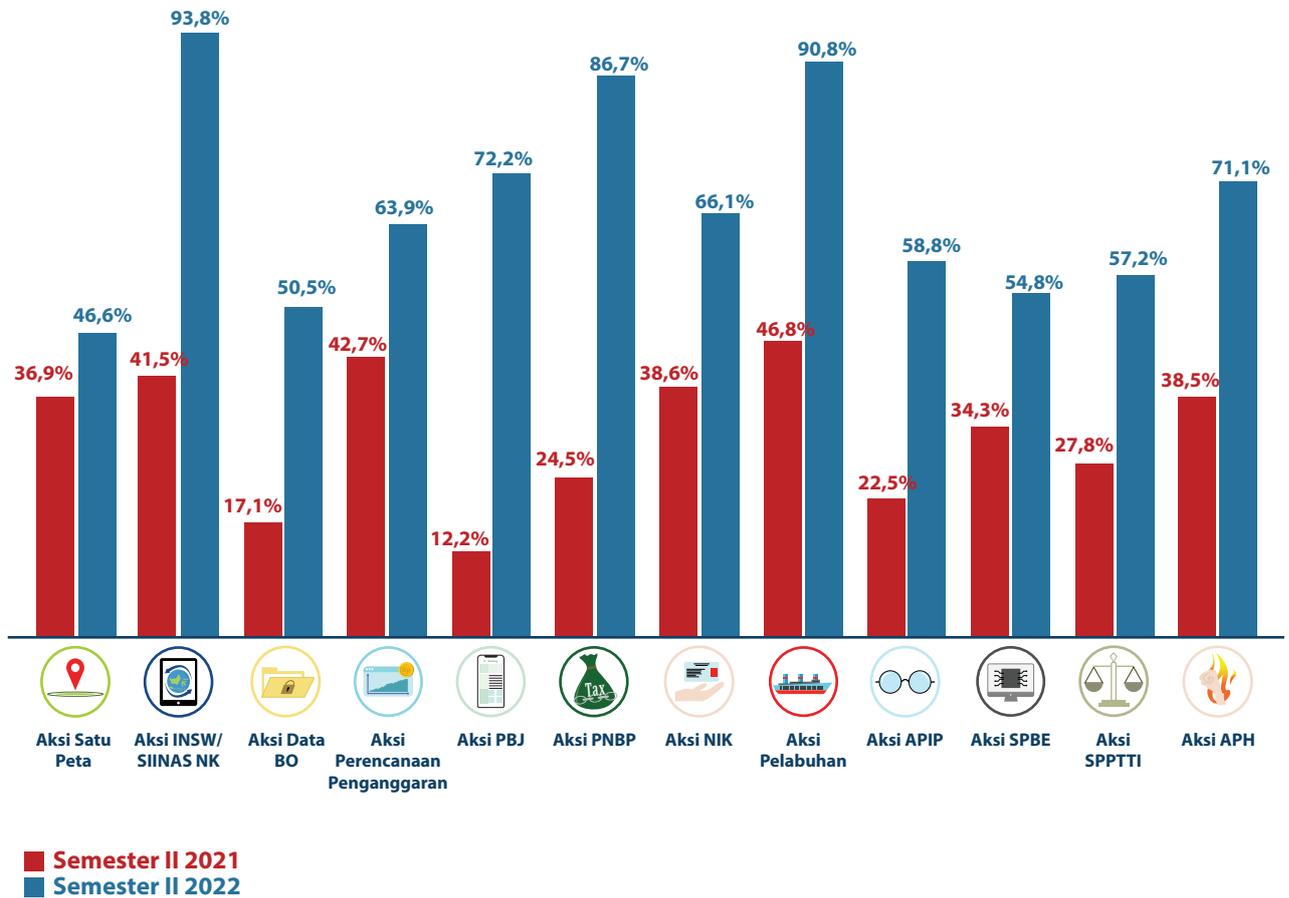


STRUKTUR DAN TUGAS STRANAS PK



GRAFIK CAPAIAN AKSI

Grafik Capaian Aksi PK semester II Tahun 2021 dan 2022



KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH PENANGGUNG JAWAB AKSI



Aksi Satu Peta

9 Kementerian/Lembaga

Badan Informasi Geospasial, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian

5 Provinsi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

42 Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Kabupaten Keerom, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Pemerintah Kabupaten Mappi, Pemerintah Kabupaten Merauke, Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Pemerintah Kabupaten Nabire, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Pemerintah Kabupaten Paser, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Sarmi, Pemerintah Kabupaten Seruyan, Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kota Palangkaraya, Pemerintah Kota Pekanbaru



Aksi INSW/ SIINAS NK

10 Kementerian/Lembaga

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pusat Statistik, Kantor Staf Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian



Aksi Data BO

13 Kementerian/Lembaga

Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan



Aksi Perencanaan Penganggaran

9 Kementerian/Lembaga

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5 Provinsi

Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur



Aksi PBJ

16 Kementerian/Lembaga

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34 Provinsi

Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara



Aksi PNBP

16 Kementerian/Lembaga

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

20 Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Lubuklinggau, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kota Palangkaraya, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pontianak



Aksi NIK

13 Kementerian/Lembaga

Badan Kepegawaian Negara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perusahaan Listrik Negara



Aksi Pelabuhan

16 Kementerian/Lembaga

Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet



Aksi APIP

3 Kementerian/Lembaga

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Aksi SPBE

9 Kementerian/Lembaga

Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Siber dan Sandi Negara, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas



Aksi SPPT TI

9 Kementerian/Lembaga

Badan Narkotika Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung



Aksi APH

5 Kementerian/Lembaga

Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SEJARAH STRANAS PK	ii
STRUKTUR DAN TUGAS STRANAS PK	iii
GRAFIK CAPAIAN AKSI	iv
KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH PENANGGUNG JAWAB AKSI	v
DAFTAR ISI	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
I. GAMBARAN UMUM STRANAS PK	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	2
3. Kelembagaan	2
4. Struktur Aksi PK	3
II. STRATEGI PELAKSANAAN DAN MONITORING EVALUASI	4
1. Pelaksanaan Aksi PK	4
2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	4
a. Sistem Monitoring	5
b. Mekanisme Evaluasi	6
3. Pelibatan Masyarakat Sipil	6
4. Strategi Komunikasi	7
III. LAPORAN CAPAIAN AKSI	8
1. Fokus I : Perizinan dan Tata Niaga	9
2. Fokus II : Keuangan Negara	18
3. Fokus III : Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi	38
IV. LAPORAN CAPAIAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH	57
1. Tabel Capaian Kementerian/Lembaga	57
2. Tabel Capaian Pemerintah Provinsi	108
3. Tabel Capaian Pemerintah Kabupaten/Kota	124
V. PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	144
VI. PENUTUP	147

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan aksi pencegahan korupsi (Aksi PK) tahun 2021-2022 melibatkan 48 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 57 Kabupaten/Kota yang diberi tanggung jawab melaksanakan 12 Aksi PK.

Berdasarkan hasil evaluasi dari tim independen, implementasi Stranas PK telah memberi kontribusi perubahan yang sangat positif. Stranas PK, oleh berbagai pemangku kepentingan, dianggap telah memainkan peran penting sebagai fasilitator yang membantu dan mempercepat proses koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah dalam rangka efektivitas pelaksanaan program. Salah satu hasil perubahan dan manfaat terbesar dari pelaksanaan Aksi PK 2021-2022 adalah terjadinya efisiensi sistem dan proses bisnis di pemerintahan yang memudahkan pengawasan terhadap risiko tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, masih ada banyak kendala dan tantangan yang perlu diatasi.

Hingga periode B24 dan selanjutnya, Stranas PK terus berupaya mempercepat pembenahan-pembenahan pada 3 aspek yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan aksi PK selama ini. Pertama, terkait dengan ketersediaan dan kelengkapan data. Kedua, integrasi sistem baik antar-instansi maupun inter-instansi. Ketiga terkait lemahnya pengawasan internal.

Hingga triwulan VIII (B24), dihitung dari total nilai capaian 12 Aksi beserta indikator outputnya maka nilai capaian pelaksanaan aksi Stranas PK adalah 61,6%. Secara umum, beberapa aksi berjalan cukup baik dan sebagian lainnya masih mengalami beberapa kendala sehingga capaiannya masih rendah. Capaian keberhasilan aksi sangat bergantung pada capaian di level output.

Selain upaya percepatan pelaksanaan aksi, Stranas PK secara aktif melakukan upaya-upaya komunikasi kepada publik melalui berbagai kanal komunikasi, seperti Website, Instagram, Youtube, Twitter, dan Facebook. Selain kanal-kanal media sosial, upaya komunikasi publik juga dilakukan secara interaktif dan langsung melalui serial webinar. Alhasil tingkat keterkenalan Stranas PK meningkat tajam, *sense of ownership* dan *engagement* mulai terlihat di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemda. *Coverage* media nasional juga ikut meningkat dalam kurun waktu setahun terakhir.

A. Laporan capaian aksi

Secara umum berdasarkan kategorisasi tingkat capaian di level output, dapat disimpulkan bahwa 3 aksi berada di tingkat capaian di atas 80%, 4 aksi capaiannya berkisar 60-79%, dan 5 aksi berada di tingkat capaian 40%-59%. Berikut rincian aksi berdasarkan tingkat capaiannya:

- a. Tingkat capaian di atas 80%: (1) Perbaikan integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan (93,8%); (2) Pembenahan tata kelola penerimaan negara pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Cukai (86,7%); (3) Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan (90,8%)
- b. Tingkat capaian antara 60%-79%: (1) Percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik (63,9%); (2) Penguatan implementasi pengadaan barang/jasa dan pembayaran berbasis elektronik (72,2%); (3) Pemanfaatan Data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sectoral (66,1%); (4) Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi (SPPT-TI) (71,1%)
- c. Tingkat capaian 40%-59%: (1) Percepatan kepastian perizinan sumber daya alam melalui implementasi kebijakan satu peta: piloting di 5 Provinsi (Riau, Kalteng, Kaltim, Sulbar, Papua) (46,6%); (2) Pemanfaatan data *Beneficial Ownership* (BO) untuk penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang/jasa (50,5%); (3) Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (58,8%); (4) Percepatan pembangunan sistem pemerintah berbasis elektronik (54,8%); (5) Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi (SPPT-TI) (57,2%)

1 Percepatan kepastian perizinan sumber daya alam melalui implementasi kebijakan satu peta: Piloting di 5 Provinsi (Riau, Kalteng, Kaltim, Sulbar, Papua)

46,6%

Dampak dari pelaksanaan aksi ini diharapkan dapat menutup celah praktik korupsi di sektor sumber daya alam, terselesaikannya sengketa tanah, dan terciptanya kepastian perizinan untuk para pelaku usaha. Namun hingga periode B24 berakhir, capaian output-output pada aksi ini masih berjalan lambat sehingga capaian pada level *outcome* dan dampak belum bisa diukur.

Berdasarkan hasil evaluasi tim independen, banyak tantangan dengan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi yang memengaruhi capaian aksi, di antaranya:

- Penetapan kawasan hutan memerlukan kehati-hatian karena banyak kawasan yang menjadi target penetapan merupakan lahan yang sudah digunakan masyarakat setempat secara turun temurun. Selain itu juga ada masalah terkait data dan dokumen tata batas yang tidak lengkap. Kehati-hatian ini diperlukan untuk menghindari konflik dengan masyarakat setempat
- Proses analisa, kompilasi, dan integrasi data ILOK/IUP belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena data-data pada Pemda terkait Surat Keputusan, Lampiran, dan Shapefile tidak tersedia atau tidak lengkap. Selain itu, kegiatan pengumpulan data ILOK dan IUP di daerah-daerah terkendala masalah sumber daya manusia. Banyak pemda masih kekurangan tenaga teknis GIS (geographical information system)
- Kendala-kendala tersebut sudah coba diatasi, misalnya untuk masalah SDM, Pemda Papua dan Riau melakukan kerja sama dengan World Resource Institute (WRI) dalam rangka mempercepat pengumpulan dan kompilasi data. Lalu terkait ketersediaan data, sudah diupayakan agar dilakukan melalui HGU namun sayangnya HGU dianggap sebagai data rahasia. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui perusahaan walaupun belum signifikan kontribusinya

Capaian output

- a. Penetapan kawasan hutan: dari target 18 juta hektar di 5 Provinsi (Riau, Kaltim, Kalteng, Sulbar, Papua) baru tercapai 3.025.104 hektar atau 17%
- b. Penetapan peta digital: dari target 42 kabupaten, 8 kabupaten telah memiliki peta digital berbasis RDTR yang terintegrasi dengan OSS, yaitu di Provinsi Kalteng ada kabupaten Gunung Mas, Kotawaringin Timur, dan Waringin Barat; di Provinsi Kaltim baru ada kabupaten Kutai Timur; di Provinsi Riau ada kabupaten Siak dan Pelalawan; di Provinsi Papua ada Kabupaten Jayapura dan Boven Digoel
- c. Integrasi ILOK dan IUP, berikut progres di 4 provinsi target:
 - Provinsi Riau: integrasi masih dilakukan secara parsial. Belum satupun kabupaten yang sudah selesai integrasi
 - Provinsi Sulbar: baru ada 1 kabupaten yang sudah selesai integrasi, yaitu Mamuju
 - Provinsi Kaltim: 3 kabupaten telah selesai integrasi, yaitu Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu
 - Provinsi Papua: 3 kabupaten (Keerom, Mappi, Merauke) telah selesai integrasi ILOK dan IUP
- d. Penyelesaian PITTI: belum terjadi banyak kemajuan hingga periode B24 berakhir. Dari 10 kab di Kalteng, tingkat capaian penyelesaian bervariasi dari 7% di kab Lamandau s.d. 80% di kab Barito Selatan
- e. Integrasi RZWP3K: belum satupun provinsi memiliki RZWP3K yang terintegrasi dengan RTRW

2 Perbaikan integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan

93,8%

Stranas PK mendorong perbaikan tata kelola impor dan ekspor melalui sistem data-simpul yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan-NK). Diharapkan penggunaan Sinan-NK dalam mengeluarkan kebijakan importasi untuk produk pangan dan kesehatan dapat menjadi lebih terbuka, berbasis data yang terintegrasi, dan transparan bagi para pelaku usaha dan masyarakat Indonesia. Sehingga akuntabilitas dari pelaksanaan impor dapat terjaga.

Berdasarkan hasil evaluasi tim independen, kehadiran Sinan-NK telah berkontribusi pada efisiensi dan transparansi sistem layanan izin usaha ekspor-impor. Sebelum ada Sinan NK, proses permohonan perizinan ekspor-impor dilakukan melalui platform masing-masing instansi teknis dan cenderung tertutup. Dengan kehadiran Sinan NK integrasi proses layanan mulai dari permohonan sampai penetapan komoditas menjadi lebih terbuka dan terukur. Seluruh data terkait permohonan izin impor saat ini dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat, baik itu data terkait pemohon dari dunia usaha maupun data terkait komoditas dan jumlah kebutuhan serta realisasinya.

Capaian output

- Terkait implementasi Neraca Komoditas; telah terbit Perpres No.32/2022 di bulan Februari. Saat ini proses penetapan persetujuan impor untuk 5 komoditas tahap I yaitu gula, beras, daging, garam, dan jagung (sesuai pasal 29 ayat 2) telah berjalan melalui Sinan NK. Sedangkan untuk 19 komoditas yang masuk dalam NK pada tahun 2022 menggunakan mekanisme penetapan NK otomatis berdasarkan data di aplikasi Sinan NK
- 1 Komoditas lainnya yaitu bawang putih masih menggunakan mekanisme NK transisi. Walaupun belum sepenuhnya menggunakan mekanisme NK, namun telah dilakukan integrasi sistem perizinan pertanian elektronik (Simpel) di Kementan dengan SINAN NK

3 Pemanfaatan data *Beneficial Ownership* (BO) untuk penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang/jasa

50,5%

Stranas PK mengawal dan mendorong tersedianya data *Beneficial Ownership* (BO) yang akurat dan terintegrasi yang dapat diakses oleh publik serta dapat juga dimanfaatkan untuk proses penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa. Pemanfaatan data BO diharapkan dapat menghilangkan penyalahgunaan korporasi untuk Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun hingga periode B24 berakhir, capaian output-output pada aksi ini masih berjalan lambat sehingga capaian pada level *outcome* dan dampak belum bisa diukur.

Berdasarkan hasil evaluasi tim independen, banyak kendala dengan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi yang memengaruhi capaian aksi, di antaranya:

- Belum tersedianya regulasi internal pada beberapa K/L untuk mengatur kewajiban deklarasi data BO bagi pengguna layanan dan integrasi data BO tersebut dengan sistem basis data BO di Ditjen AHU KemenkumHAM. Sehingga beberapa K/L merasa tidak ada kewajiban untuk mensyaratkan data BO bagi perusahaan pengguna layanan. Akibatnya pelaporan data BO di beberapa K/L masih belum maksimal
- Data BO yang sudah terdaftar pun belum dilakukan *cross check verification* terkait keaslian dan kebenaran data BO tersebut. Belum ada mekanisme yang mengatur terkait kualitas dan integritas data BO, termasuk mekanisme sanksi jika ditemukan data BO-nya tidak benar

Capaian output

- Korporasi yang telah mendeklarasi BO adalah 744.683 dari total 1.935.499 (38%). walaupun nota kesepahaman telah ditandatangani sejak 2019 dan ditindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penguatan dan Pertukaran Data BO antara Kemenkumham dengan Kemenkeu, KemenESDM, Kementan, Kementerian KUKM, dan Kementerian ATR/BPN, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Hanya KemenESDM dan Kementan yang sistem perizinannya sudah terkoneksi dengan sistem basis data AHU Online

Capaian output

- Akses publik terhadap data BO telah dibuka per 1 Juli 2022
- Untuk pemanfaatan data BO, hingga saat ini KemenkumHAM belum dapat mengembangkan sistem fitur untuk penyediaan akses Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap Data BO dengan alasan belum ada kebijakan atau perjanjian kerja sama mengenai dibukanya akses data BO bagi APH, kecuali dengan PPAK dan KPK. Walaupun demikian akses atau pemanfaatan data telah dilakukan secara manual

Percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik

63,9%

Stranas PK mendorong pembangunan sistem perencanaan program dan keuangan dari desa hingga pusat yang terintegrasi secara elektronik, termasuk menampilkan hasil-hasil pembangunan, misalnya panjang jalan yang dibangun, gedung sekolah yang direhabilitasi, fasilitas kesehatan yang dibangun yang kesemuanya ini dapat teragregasi di tingkat nasional mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan/penatausahaan hingga pelaporan atau audit. Dengan demikian Integrasi sistem secara elektronik ini akan mencegah korupsi dan intervensi pihak-pihak lain ke dalam anggaran karena perencanaannya transparan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada output integrasi perencanaan penganggaran di tingkat daerah, di temukan bahwa SIPD walaupun dianggap sudah dapat digunakan, namun masih butuh banyak penyempurnaan secara bertahap. Misalnya pada modul perencanaan penganggaran, perlu diterapkan sistem peralihan (*change over*) dari sistem SIPD monolitik ke SIPD *microservice*. Sebelum menerapkan SIPD *microservice*, perlu dipastikan terkait penyempurnaan fitur dan kualitas data, uji beban, rencana migrasi data, dan isu keamanan.

Pada modul penatausahaan dan akuntansi laporan keuangan, tim asesmen Pusilkom tidak merekomendasikan penggunaan SIPD *microservice* untuk penatausahaan dan akuntansi keuangan untuk tahun anggaran 2023. Penyebabnya karena SIPD *microservice* belum teruji secara menyeluruh, termasuk integrasi dengan SIKD milik Kemenkeu. Selain itu, masalah migrasi data perlu diurai secara rinci untuk mengurangi beban karena saat ini Pusdatin Kemendagri sudah memiliki beban migrasi data sudah cukup besar untuk migrasi data SIPD monolitik perencanaan penganggaran ke versi *microservice*.

Capaian output

- Integrasi di Pusat:
 - Kemenkeu dan Bappenas telah menandatangani MoU integrasi Krisna dan Sakti sejak 2021, lalu ditindaklanjuti dengan penetapan SOP penyederhanaan proses bisnis. Hasilnya, Krisna Renja (Bappenas) telah terhubung dengan Sakti RKA (Kemenkeu) melalui API service dan mendapatkan data balikan berupa referensi kode nomenklatur, alokasi dan target, serta lokasi administrasi meskipun masih terdapat perbedaan interpretasi atas data lokasi
 - LKPP dan Kemenkeu telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk membangun koneksi antara Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Mon-SAKTI) dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Integrasi SAKTI dan SIRUP saat ini telah berjalan pada proses awal yang memudahkan pengisian SIRUP oleh kementerian/lembaga, sehingga K/L tidak perlu lagi menginput ulang data/informasi yang sama. K/L cukup menginput sekali saja di SAKTI
- Integrasi di Daerah:
 - Modul perencanaan dan modul penganggaran pada SIPD sudah digunakan secara luas oleh 538 pemda
 - Modul penatausahaan SIPD versi monolitik telah digunakan oleh 295 pemkab/pemkot dan 21 pemprov; sementara modul akuntansi pelaporan pada SIPD monolitik telah digunakan oleh 90 Pemda. Oleh karenanya perlu dipastikan bahwa seluruh pemda menggunakan SIPD monolitik untuk penatausahaan dan akuntansi pelaporan agar terjadi percepatan aliran data secara terpusat
 - Walaupun SIPD sudah berjalan, namun beberapa pemda masih menemui banyak kendala teknis, salah satu misalnya Pemda belum dapat melakukan mirroring data yang ada di SIPD untuk bisa diintegrasikan dengan sistem yang ada di Pemda

**5 Penguatan implementasi pengadaan barang
jasa dan pembayaran berbasis elektronik**

72,2%

Aksi ini diharapkan dapat mencegah korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan cara optimalisasi mekanisme pengadaan barang dan jasa beserta sistem pembayarannya secara digital. Di antaranya adalah penggunaan e-katalog dan aktivasi *marketplace* serta pembayaran elektronik melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), *internet banking* atau mekanisme *payment gateway*.

Dengan demikian, proses transaksi dapat menjadi lebih efisien secara waktu dan biaya namun tetap transparan dan akuntabel. Mekanisme ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di sektor pengadaan karena minimnya pertemuan antara penyedia dan pengguna barang/jasa.

Berdasarkan hasil evaluasi tim independen, kehadiran Tokodaring (Bela Pengadaan) dan katalog elektronik telah berkontribusi pada efisiensi dan transparansi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan adanya *platform* Tokodaring dan E-Katalog, instansi-instansi pemerintah tidak perlu lagi melakukan kontrak dengan vendor-vendor penyedia barang/jasa. Cukup LKPP saja yang melakukan kontrak untuk memasukan vendor-vendor ke dalam sistem mereka sehingga instansi-instansi lain bisa langsung melakukan transaksi lewat sistem tersebut, layaknya mekanisme belanja *marketplace* pada umumnya. Sehingga proses transaksi menjadi lebih efisien dari sisi waktu. Selain itu, semua transaksi tercatat secara *real time* sehingga memudahkan pengawasan, termasuk dari sisi pelaporan keuangan dan pajak.

Capaian output

- a. Tersedianya sistem pembayaran elektronik (*e-payment*) dalam Pengadaan Barang/Jasa K/L/D
Progres: Target 6 regulasi terkait perpajakan dan pembayaran elektronik PBJ yang harus diselesaikan Kemenkeu dan Kemendagri, seluruhnya telah tercapai
- b. Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi
Progres: Dari target 10% Rencana Umum Pengadaan Langsung di bawah 50 juta untuk dibelanjakan Pemprov melalui Bela Pengadaan, sebanyak 31 Pemda telah melakukan transaksi belanja. Namun hanya 6 Pemprov (DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Bali, Jatim, Gorontalo) yang telah memenuhi target belanja 10% dari RUP. Untuk tingkat K/L, dari target 12 K/L, baru KemenPUPR yang sudah menggunakan platform Bela Pengadaan secara optimal
- c. Tersedia dan termanfaatkannya sistem informasi pengadaan barang/jasa konstruksi
Progres: Kementerian PUPR telah membangun Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) dan telah dimanfaatkan di 10 provinsi sejumlah minimal 30 paket
- d. Tersedia dan termanfaatkannya sistem informasi pengadaan alat kesehatan
Progres: Terjadi optimalisasi pemanfaatan katalog di Kemenkes sejak dikelola sendiri. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021, alkes dan obat-obatan merupakan katalog nasional dengan jumlah produk yang ditransaksikan sejumlah 37 produk. Sementara pada tahun 2022, katalog sektoral telah menjadi pusat pengadaan alkes dan obat-obatan dengan jumlah produk tayang mencapai 90 ribuan
- e. Pemanfaatan e-katalog
Progres: Dari 34 provinsi, seluruhnya telah melakukan transaksi belanja melalui e-katalog. 28 provinsi telah mencapai target pembelanjaan minimal 5 komoditas baru yang tayang pada e-katalog tahun 2021-2022; 6 provinsi lain belum mencapai target 5 komoditas, yaitu Kaltara, Sulteng, Sulbar, Maluku, Papua, Papua Barat;
Begitu juga di tingkat Pusat, dari 8 Kementerian, 7 K/L telah memenuhi target transaksi belanja, yaitu Kementan, KemenPUPR, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenhub, Kementan, BNPB, dan Kemenhan. Sementara Polri sudah melakukan transaksi belanja tetapi belum memenuhi target

6 **Pembenahan tata kelola penerimaan negara pada
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Cukai**

86,7%

Stranas PK mendorong pembenahan tata kelola yang dirasakan belum optimal, khususnya terkait pembagian dan penguatan kewenangan pada kementerian/lembaga. Mulai regulasi, metode perhitungan (struktur tarif) dan pemungutan, sampai ke pelaporan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil evaluasi tim independen, aplikasi Simbara adalah sebuah terobosan terhadap sistem pengawasan PNBP di sektor minerba karena mengintegrasikan begitu banyak sistem yang berjalan di masing-masing instansi, misalnya sistem Minerba One Map Indonesia (MOMI) milik KemenESDM; sistem Inaportnet tentang standar layanan kepelabuhanan milik Kemenhub; sistem Inatrade tentang perizinan ekspor-impor milik Kemendag; dan sistem PNBP Online (Simponi) milik Kemenkeu. Namun Pemanfaatan Simbara ini belum berjalan sempurna karena di internal KemenESDM sendiri masih terus dilakukan sinkronisasi dan integrasi data.

Hingga periode B24 berakhir, analisis data menggunakan Simbara baru pada tahap menghasilkan identifikasi masalah yang terjadi dalam pertukaran data, yang mana di sistem lama belum terpetakan, misalnya:

- Terjadi perbedaan data produksi dan perdagangan komoditas-komoditas di berbagai instansi. Sebagai contoh, pencatatan jumlah komoditas batubara di hulu, yaitu di Kementerian ESDM, berbeda dengan pencatatan di hilir, yaitu di Ditjen Anggaran Kemenkeu. Hal ini mengakibatkan adanya kemungkinan PNBP yang didapatkan negara kurang optimal karena perbedaan jumlah tersebut. Perbedaan data tersebut juga bisa disebabkan karena adanya praktik usaha ilegal;
- Sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi dapat mengakibatkan terjadi penggunaan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) berulang yang disinyalir untuk menghindari kewajiban membayar PNBP atau cukai;
- Adanya proses pembayaran PNBP hingga ekspor yang terlalu lama (misalnya jeda waktu selama 6 bulan sejak pembayaran NTPN hingga ekspor) dapat menjadi indikasi adanya praktik kecurangan untuk menghindari pembayaran PNBP

Capaian output

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sub-sektor sumber daya alam saat ini telah terbit PP 26/2022 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM (revisi terhadap PP 81/2018); dan secara teknis, Kemenkeu telah menerbitkan PMK 214/2021 tentang Pengawasan PNBP Mineral dan Batubara dan berkontribusi terhadap lahirnya aplikasi SIMBARA dalam rangka integrasi data dan proses bisnis yang dimiliki Kementerian/ Lembaga terkait, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan. Terdapat 2 tahap fokus pengembangan:
 - Tahap I; fokus di validasi ekspor (dokumen LS untuk ekspor). Saat ini, Ditjen Anggaran telah menyampaikan rekomendasi dan pemanfaatan data SIMBARA tahap I kepada Ditjen Minerba
 - Tahap II; lingkup validasinya ditambah yang domestik (validasi NTPN pada pengajuan warta keberangkatan). Saat ini telah dilakukan implementasi SIMBARA tahap II namun berdasarkan data analitik SIMBARA, masih ditemukan penyalahgunaan terhadap Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
- b. Untuk peningkatan akuntabilitas penghitungan PNBP Migas, dari 99 kelompok aset, berikut capaian tingkat kematangan KKKS dalam implementasi QA:
 - 95 *asset grup/field* (atau 96%) telah mencapai *maturity level* 5 (M5); tersisa 4 KKKS yang berada di bawah *maturity level* 3; dan 4 KKKS tidak dapat mengimplementasikan QA karena sudah tidak memproduksi yaitu: EMP Gebang, Sumatera Persada Energi, EMP Tonga dan Camar Resources Canada
- c. Untuk perbaikan pelayanan publik Pengujian Kendaraan Bermotor, dari 20 pemda *piloting*, 16 pemda (UP-UBKB) yang mengalami peningkatan dari akreditasi B ke A dan telah memanfaatkan transaksi elektronik untuk pembayaran retribusi, yaitu Kabupaten Wonogiri, Kota Pontianak, Kota Pekanbaru, Kota Palembang, Kota Palangkaraya, Kota Makassar, Kota Depok, Kota Banjarmasin, Kota Tangerang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Semarang, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blitar. 4 pemda masih tetap berakreditasi B, yaitu Kota Padang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Kampar

- d. Terkait penyusunan *roadmap* cukai, masih berjalan lambat. Baru tersedia rancangan final dalam bentuk Perpres dengan judul Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau Tahun 2023 – 2027. Roadmap ini akan menjadi arah kebijakan dan strategi terkait aspek keuangan, industri, pertanian, ketenagakerjaan, dan kesehatan atau yang berhubungan dengan aspek-aspek berikut yakni penerimaan negara, pengendalian konsumsi, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian peredaran produk cukai ilegal

7 Pemanfaatan Data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral

66,1%

Stranas PK mendorong pemanfaatan data kependudukan beserta transaksi administrasi kependudukan seperti kelahiran, kematian, pindah alamat dan datang yang terintegrasi sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam berbagai program subsidi pemerintah kepada masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil evaluasi tim independen, dari sisi proses bisnis, kehadiran Stranas PK telah berkontribusi pada perbaikan cara pengelolaan data, khususnya pencocokan dan integrasi data. Saat ini, secara rutin dan terjadwal, antara 1 sampai 3 bulan sekali dilakukan sinkronisasi data NIK dengan data penerima manfaat pada K/L teknis.

Pemanfaatan NIK sudah digunakan secara luas. Di sektor kesehatan, data BPJS sudah 100% menggunakan NIK. Layanan data vaksinasi juga menggunakan NIK sehingga pendistribusian vaksin dapat berjalan cepat dan lancar.

Capaian output

- DTKS telah diperbaiki akurasi sejak 2021 dengan memastikan setiap DTKS memiliki NIK yang divalidasi oleh Dukcapil Kemendagri. Jumlah DTKS hingga November 2022 adalah 148.638.683 jiwa dengan data padan NIK sejumlah 147.128.375 (98,99%). Seluruh penerima bansos berasal dari DTKS telah padan NIK kecuali untuk wilayah Papua dan Papua Barat
- Perbaikan tata kelola data PBI JKN telah dilakukan sehingga setiap PBI JKN berasal dari DTKS dengan demikian penyaluran PBI JKN telah dipastikan akurasi data administratifnya yaitu padan NIK dan padan DTKS
- Terkait penggunaan kartu tani, penebusan subsidi pupuk melalui kartu tani periode 2021-2022 adalah sebanyak 5.811.836 atau 60% dari total 9,8 juta kartu terdistribusi. Sementara penebusan pupuk melalui T Pubers adalah sebanyak 9.714.116 petani. Dengan demikian, total sebanyak 15.525.952 (90%) petani telah melakukan penebusan pupuk dari total data petani 17.228.855
- Tantangan besar terkait data balikan masih terjadi pada integrasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan: data kepemilikan kendaraan (Polri), data kepemilikan properti (Kemen ATR/BPN), dan data penerima subsidi listrik (PLN)

8 Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan

90,8%

Stranas PK mendorong peningkatan layanan pelabuhan dengan integrasi dan penyederhanaan birokrasi di 10 (sepuluh) pelabuhan laut utama. Pelbagai upaya coba dilakukan termasuk penyederhanaan alur pelayanan, penerapan transparansi dan standarisasi prosedur layanan melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan dan mengakomodasi pengaduan masyarakat. Diharapkan aksi akan berkontribusi pada turunnya biaya dan waktu layanan sehingga memudahkan dunia usaha dalam berinvestasi.

Berdasarkan hasil evaluasi dari tim independen, penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) sudah memiliki dampak positif terhadap penghematan biaya dan penurunan durasi pelayanan. Sebagai contoh sebelum adanya NLE, layanan karantina dan bea cukai (SSm QC) memerlukan dua kali pemeriksaan di waktu yang berbeda sehingga membutuhkan biaya operasional dan waktu pengerjaan dua kali lipat. Dengan adanya layanan SSm QC, kedua proses pemeriksaan tersebut digabungkan menjadi satu untuk menghemat biaya dan waktu. Dari sisi pengusaha, mereka juga

bisa mengurangi biaya operasional dengan signifikan karena secara garis besar para pengusaha tidak perlu mengalokasikan sumber daya untuk hadir secara fisik di kantor masing-masing layanan pelabuhan. Seluruh layanan sudah bisa diakses secara daring sehingga menghemat biaya transportasi dan biaya tenaga kerja dari sisi perusahaan. Alhasil, layanan SSm QC berhasil menurunkan waktu layanan dari rerata 3,23 hari menjadi 2,33 hari. Begitu juga dengan biaya timbun dan penarikan untuk pemeriksaan (*behandle*) terjadi penghematan sebesar 33,48% atau senilai 191,32 milyar rupiah.

Contoh positif lainnya terjadi pada layanan SSm Pengangkut. Sekarang permohonan layanan cukup dilakukan dengan satu kali submission melalui INSW. Pengguna layanan tidak perlu berulang kali mengajukan pengurusan ke KSOP, Bea Cukai, Karantina, dan Imigrasi sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Begitu juga dengan layanan pembayaran PNBP yang sudah terintegrasi melalui *single billing* PNBP sehingga pembayaran cukup dilakukan melalui satu rekening tunggal.

Capaian output

- a. Output terkait regulasi perbaikan tarif jasa kepelabuhanan baru menghasilkan draf surat edaran 3 kementerian (Kemenuh, Kemendagri, Kemenkeu)
- b. Output terkait regulasi perbaikan tarif jasa kepelabuhanan telah berhasil mencabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi namun regulasi baru yang dirancang Kemenuh, Kemenaker, dan Kemenkop UKM belum bisa ditetapkan
- c. Output terkait layanan NLE, dari 8 layanan yang menjadi target, seluruhnya telah tersedia, yaitu SSm Pengangkut, SSm QC, *Gate System*, *DO Online*, *SP2 Online*, *Trucking*, *Vessel* domestik, dan *Single billing* PNBP
- d. Output terkait penerapan 8 layanan, hasilnya cukup baik. 2 dari 8 layanan, yaitu SSm Pengangkut dan *Gate system* telah diterapkan di seluruh 14 pelabuhan; 6 layanan lain penerapannya sudah mencapai antara 6 pelabuhan sampai 12 pelabuhan
- e. Output terkait perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan juga cukup baik progresnya, yaitu:
 - Pembentukan mekanisme koordinasi dan komunikasi CIQP sudah pada tahap menghasilkan perjanjian kerja sama mengenai mekanisme koordinasi antara Ditjen Perhubungan Laut (Kemenuh), Ditjen Bea Cukai (Kemenkeu), Ditjen Imigrasi (KemenkumHAM), Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kemenkes)
 - Pembentukan Badan Karantina Nasional, RPP-nya sudah melewati tahapan harmonisasi di KemenkumHAM dan saat ini sedang proses penetapan oleh Presiden
 - Telah lahir satu sistem layanan operator pelabuhan melalui sistem layanan kapal terpadu (PINISI) dan saat ini sedang proses integrasi dengan layanan lain

9 Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

58,8%

Aksi ini bertujuan untuk memperkuat APIP dari 2 aspek utama, yaitu kelembagaan dan sumber daya manusia. Dengan demikian, penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan independensi dan kinerja APIP dalam melakukan kerja-kerja pengawasan, sehingga penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah menjadi efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil evaluasi dari tim independen, penguatan kelembagaan APIP untuk meningkatkan independensi APIP, sebenarnya sudah dilakukan bertahap sejak tahun 2019. Di tahun 2019, dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa APIP bisa langsung melaporkan temuan-temuannya kepada Gubernur atau Kementerian Dalam Negeri lewat Inspektorat Provinsi. Namun fakta di lapangan menyatakan bahwa penguatan ini belum berjalan efektif karena faktor psikologis dan kultur birokrasi yang ewuh pakewuh dan "asal bapak senang" masih sangat kental. Belum lagi dengan mutasi pegawai yang masih sering ditemukan menimpa pegawai-pegawai yang vokal, termasuk pegawai APIP.

Upaya lain untuk peningkatan kelas jabatan fungsional auditor dan PPUPD yang sudah berhasil dilakukan tahun lalu pun tidak berdampak pada menguatnya independensi, melainkan pada kesejahteraan pegawai APIP. Dampak positif lainnya adalah munculnya persepsi positif terhadap jabatan APIP, yang sekarang dianggap lebih disegani.

Capaian output

- a) Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di kementerian/lembaga/pemerintah daerah
Progres: upaya pemenuhan jumlah APIP (Auditor dan PPUPD) masih belum ada progres signifikan karena belum ada usulan jumlah kebutuhan pemenuhan SDM APIP (PPUPD) yang akan diisi. Kendala utama ada pada lambatnya pelaksanaan pemetaan dan penghitungan kebutuhan APIP secara keseluruhan
- b) Menguatnya independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk penetapan kelas jabatan fungsional APIP
Progres: Capaian output ini cukup baik. Penetapan kelas jabatan untuk JF Auditor dan JF PPUPD telah ditetapkan oleh KemenPANRB dan sudah dikirim surat edaran dari BPKP dan Kemendagri kepada seluruh K/L/D

10 Percepatan pembangunan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)

54,8%

Stranas PK mendorong manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional agar dapat meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan, juga dapat menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pada aksi ini tidak dilakukan evaluasi *outcome* sehingga tidak tersedia informasi terkait hasil atau kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan aksi ini. Hanya alaporan capaian output yang dapat dipaparkan.

Capaian output

- a. Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/D yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional
 - Penetapan Perpres Arsitektur SPBE akhirnya tercapai pada periode B24. Pengesahan Perpres Arsitektur SPBE No 132/2022 ini diharapkan dapat melahirkan keterpaduan layanan digital baik di tingkat instansi maupun lintas instansi
 - Untuk mengantisipasi keterlambatan penerbitan Perpres, KemenPANRB mengambil langkah alternatif dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
 - KemenPANRB telah menetapkan 51 kementerian/lembaga dan 15 pemprov beserta kabupaten/kota di dalamnya yang akan dijadikan piloting penerapan Arsitektur SPBE. Saat ini sedang dilakukan pendampingan teknis oleh Kedeputusan Bidang Kelembagaan dan tata Laksana KemenPANRB
- b. Tersedia layanan pengaduan pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR!
 - Hingga periode B24 berakhir, terdapat 60 instansi pusat dan 290 instansi daerah yang telah terdaftar pada SPLP (sistem penghubung layanan pemerintah) untuk integrasi dengan SP4N LAPOR dan ada 136 IPPD dan OPD yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk memanfaatkan Aplikasi SP4N LAPOR
 - Kemkominfo telah menyusun RPM kebijakan umum penyelenggaraan audit TIK yang saat ini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM
- c. Jumlah aplikasi umum yang ditetapkan
Progres: output ini baru diberlakukan pada periode B18. Dari hasil pemetaan dan evaluasi Tim Koordinasi SPBE Nasional, telah disepakati ada 6 aplikasi yang akan direviu kelayakannya untuk ditetapkan sebagai aplikasi umum, yaitu Krisna, e-Monev, SIPD, JDIHN, SIMAN, dan PPI. Hingga saat ini, 4 aplikasi (Krisna, e-Monev, SIPD, JDIHN) telah diajukan dan masih dalam tahap persiapan penetapan sebagai aplikasi umum

1 Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi (SPPT-TI)

57,2%

Aksi penguatan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) menjadi salah satu aksi prioritas Stranas PK dengan mendorong pertukaran dan pemanfaatan data perkara secara elektronik antar lembaga penegak hukum, sehingga diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada aksi ini tidak dilakukan evaluasi *outcome* sehingga tidak tersedia informasi terkait hasil atau kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan aksi ini. Hanya laporan capaian output yang dapat dipaparkan.

Capaian output

- Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang melalui sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT TI)

Progres:

- Untuk tingkat kesesuaian wilayah, secara rerata (B03-B24) dengan memperhitungkan konsistensi kesesuaian wilayah di setiap bulan maka progres capaian seluruh LPH adalah sebagai berikut: Polri 71,76%; Kejaksaan 85,30%; MA 81,98%; Ditjen PAS 61,04%
- Untuk jenis dokumen yang dipertukarkan, secara rerata dengan memperhitungkan konsistensi jumlah/jenis dokumen yang dipertukarkan di setiap bulan maka progres capaian seluruh LPH adalah: Polri adalah 59,85%; Kejaksaan 80,82%; MA 45,60%; Ditjen PAS 89,58%
- Untuk tingkat kesegaran data terlihat masih sangat rendah. Jika dihitung secara rerata selama B03-B24 maka progres capaian seluruh LPH adalah: Polri 20,45%; Kejaksaan 20,02%; MA 48,15%; Ditjen PAS 59,30%

- Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara yang dipertukarkan lewat SPPT-TI

Progres: terdapat empat LPH yang telah memanfaatkan data penanganan perkara, yaitu Polri, Ditjen PAS (KemenkumHAM), MA, dan Kejagung. KPK masih dalam proses integrasi sistem SINERGI dan SPPT-TI sehingga belum bisa bertukar data

- Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT-TI

Progres: Output ini fokus pada penguatan Puskarda dan infrastruktur SPPT-TI. Beberapa proses telah dilakukan seperti perancangan *dashboard* SPPT-TI dan rancangan fitur penelusuran perkara yang dilakukan Kemenkominfo; operasionalisasi infrastruktur Puskarda yang mendukung *high availability* dan juga audit sistem keamanan elektronik yang sedang dikembangkan BSSN

12 Penguatan integritas Aparat Penegak Hukum

71,1%

Aksi ini diharapkan dapat meningkatkan integritas APH dengan memperbaiki dan mempertimbangkan kelayakan kesejahteraan APH dengan remunerasi dan fasilitas yang lebih memadai serta Perbaikan Standar Biaya Khusus (SBK) penanganan perkara tipikor.

Pada aksi ini tidak dilakukan evaluasi *outcome* sehingga tidak tersedia informasi terkait hasil atau kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan aksi ini. Hanya laporan capaian output yang dapat dipaparkan.

Hingga periode B24 berakhir, walaupun cukup baik nilai capaiannya namun hasil yang diharapkan dari aksi ini belum tercapai karena capaian 71% baru menggambarkan proses-proses yang telah dilalui seperti telah selesainya konsep rumusan penyesuaian tunjangan dan rumusan standar biaya.

Capaian output

a. Peningkatan kesejahteraan Aparat Penegak Hukum (APH)

Progres: Kejagung (Bagian Ortala) telah selesai menyusun konsep usulan terkait penyesuaian remunerasi APH dan saat ini telah diusulkan kepada KemenPANRB dan Setneg untuk direviu; Sementara Polri sudah mengirimkan usulan penyesuaian tunjangan kinerja hingga 80% kepada KemenPANRB dan Kemenkeu. Namun tanggapan dari Kemenkeu untuk saat ini kenaikan tunjangan kinerja belum dapat dipenuhi dengan alasan ada kebijakan moratorium

b. Penguatan akuntabilitas penanganan perkara

Progres: Untuk Polri, sudah ada usulan standar biaya penanganan perkara Tipikor yang diajukan Bareskrim kepada ASRENA Polri. Saat ini, tim ASRENA sedang membahas dengan Kemenkeu; Sementara Kejagung lebih memilih mengusulkan penggunaan Standar Biaya Khusus (SBK) dari pada Standar Biaya Umum (SBU) karena perbedaan biaya per wilayah sangat besar. Saat ini Biro Perencanaan Kejaksaan RI telah menyiapkan usulan Standar Biaya penanganan perkara berdasarkan 3 cluster wilayah

BAB I

GAMBARAN UMUM STRANAS PK

1 LATAR BELAKANG

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi secara terus menerus. Pada tingkat internasional, Pemerintah juga aktif terlibat dalam berbagai inisiatif global untuk memerangi korupsi. Salah satunya melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC 2003) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014. Strategi yang terdapat dalam Stranas PPK meliputi strategi-strategi: pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang undangan, kerja sama internasional dan penyelamatan aset, dan budaya anti korupsi, serta mekanisme pelaporan yang hanya menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi.

Namun demikian, sinergi dan koordinasi di antara Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah masih menjadi masalah besar yang belum dapat diselesaikan dalam pelaksanaan Stranas PPK. Sehingga dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai inisiatif pencegahan korupsi, tidak hanya terbatas pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan dalam Stranas PPK, melainkan perlu juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Untuk menjawab persoalan di atas, Stranas PPK diganti menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi dilaksanakan dengan cara kolaboratif dan bersinergi bersama Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, KPK, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat sipil. Upaya sinergitas tersebut diwujudkan melalui penetapan fokus dan sasaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

2 TUJUAN

- Memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi;
- Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*), bukan hanya luaran kegiatan (*output*), dengan capaian yang terukur;
- Meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, daerah, maupun dengan kebijakan strategis KPK

3 KELEMBAGAAN

Pelaksanaan Stranas PK dikelola oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri dari 5 kementerian/lembaga, yaitu:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri);
3. Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB);
5. Kantor Staf Presiden (KSP)

Untuk mendukung kelancaran tugas, Timnas PK dibantu oleh Tim Pengarah yang terdiri dari pejabat eselon I dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Sementara pengelolaan secara operasional dilakukan Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK), yang berkedudukan di KPK, dengan komposisi: 1 (satu) orang Koordinator Harian, 17 (tujuh belas) orang Tenaga Ahli, dan 28 (dua puluh delapan) orang Tim Teknis yang mewakili 5 (lima) anggota Timnas PK, serta 9 (sembilan) orang tenaga pendukung teknis dan administrasi.

4 STRUKTUR AKSI PK

Di bawah koordinasi Timnas, aksi-aksi pencegahan korupsi saat ini diharapkan menjadi lebih fokus dan terukur, tidak lagi bersifat generik, sehingga lebih mudah dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian. Terdapat 3 Fokus dan 12 Aksi, beserta sejumlah output triwulan yang telah disusun dan dilaksanakan sampai saat ini.

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

1 FOKUS 1 PERIZINAN DAN TATA NIAGA



Aksi PK 1

Percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam melalui implementasi kebijakan satu peta: Piloting di 5 Provinsi (Riau, Kalteng, Kaltim, Sulbar, Papua)



Aksi PK 2

Perbaikan integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan



Aksi PK 3

Pemanfaatan data *Beneficial Ownership* (BO) untuk penanganan perkara, perizinan dan pengadaan barang jasa

2 FOKUS 2 KEUANGAN NEGARA



Aksi PK 4

Percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik



Aksi PK 5

Penguatan implementasi pengadaan barang jasa dan pembayaran berbasis elektronik



Aksi PK 6

Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenaan PNBP dan Pendapatan Lainnya



Aksi PK 7

Pemanfaatan Data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral

3 FOKUS 3 PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI



Aksi PK 8

Pemangkas birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan



Aksi PK 9

Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)



Aksi PK 10

Percepatan pembangunan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)



Aksi PK 11

Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi



Aksi PK 12

Penguatan integritas Aparat Penegak Hukum (APH)

BAB II

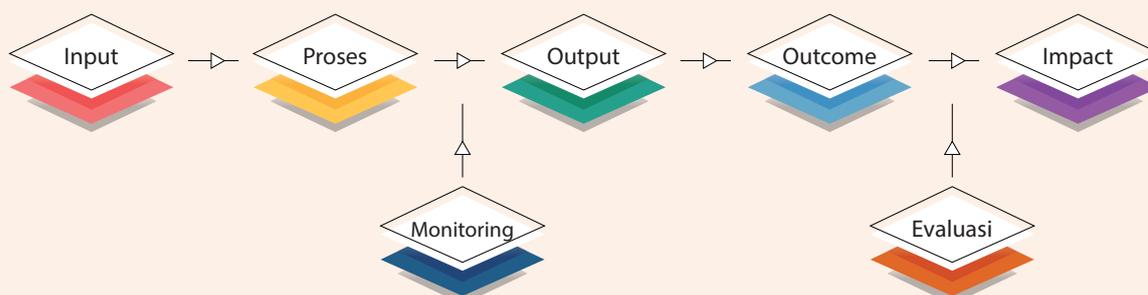
STRATEGI PELAKSANAAN DAN MONITORING EVALUASI

1. Pelaksanaan Aksi PK

- Pada tahap perencanaan, Tenaga Ahli Setnas PK melakukan koordinasi dan diskusi mendalam bersama Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D) guna menyepakati dan menetapkan target triwulan, data dukung, dan kuantifikasi capaian sebagai dasar pelaksanaan aksi. Target-target yang telah disepakati dan ditetapkan kemudian ditayangkan melalui aplikasi <https://jaga.id/monitoring>
- Guna memastikan pelaksanaan Aksi PK yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Pemda berjalan sesuai target yang disepakati, Setnas PK memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dan pembahasan dengan unit kerja teknis pada masing-masing K/L/D sebagai pelaksana aksi. Tempat pelaksanaannya dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tempat kedudukan Setnas PK atau dilaksanakan di masing-masing K/L/D
- Mekanisme pendampingan dilakukan melalui rapat koordinasi formal dan non-formal antara tenaga ahli Setnas PK dan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab aksi. Tempat pelaksanaannya dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tempat kedudukan Setnas PK atau dilaksanakan di masing-masing K/L/D. di masa pandemi Covid 19, pendampingan dan monitoring lebih banyak dilakukan secara daring/online
- Pendampingan yang dilakukan Setnas PK dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan aksi, termasuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti masalah dan kendala yang dihadapi oleh unit teknis penanggung jawab aksi
- Guna mensinergikan upaya-upaya pencegahan korupsi, pelaksanaan Aksi PK juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan unit kerja KPK lainnya seperti Litbang, Dikyanmas, PJKAKI, Korwil, dan PINDA (Manajemen Informasi-MI)

2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Secara umum, kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) dimaksudkan untuk melakukan deteksi dini apakah Aksi PK telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan target yang disepakati atau tidak. Jika aktivitas dan output secara terus-menerus. Sementara kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengukur hasil dan dampak pada kurun waktu tertentu, biasanya pada akhir program akan selesai.



Agar seluruh pelaksanaan aksi PK dapat dimonitor dan dikendalikan maka Setnas PK telah mengembangkan beberapa instrumen monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien. Berikut gambaran umum mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

a. Sistem Monitoring

- Sistem aplikasi JAGA dengan tautan <https://jaga.id/monitoring> dikembangkan untuk menyederhanakan mekanisme pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Pun dari sisi Setnas PK menjadi lebih efisien dalam melakukan monitoring pencapaian output dan indikator K/L/D pada tiap triwulan.
- Target-target output dan indikator yang telah ditetapkan wajib dikerjakan dan dilaporkan oleh K/L/D pada batas waktu pelaporan yang ditentukan Setnas PK sebagai berikut:

Periode	Batas Akhir Pelaporan	Masa Verifikasi
B03 dan B15	25 Maret tahun berjalan	26 Maret - 08 April
B06 dan B18	25 Juni tahun berjalan	26 Juni - 09 Juli
B09 dan B21	24 September tahun berjalan	25 September – 07 Oktober
B12 dan B24	17 Desember tahun berjalan	18 - 24 Desember

- Pelaporan oleh K/L/D yang dilakukan melalui jaga.id/monitoring berisi dua hal utama. Pertama, klaim capaian berupa narasi yang menggambarkan progres pelaksanaan/pemenuhan indikator K/L/D. Kedua, K/L/D harus dapat membuktikan klaim capaian dengan mengunggah data dukung yang sesuai. Misalnya, jika indikator yang harus dipenuhi adalah penerbitan peraturan menteri maka data atau dokumen yang diunggah adalah Peraturan Menteri yang telah disahkan menjadi dokumen negara
- Ketika melewati batas waktu yang telah ditentukan di atas, pelaporan secara otomatis ditutup dan dikunci oleh sistem. Pada saat itulah masa verifikasi berlangsung, di mana Tenaga Ahli Setnas PK yang berjumlah 17 orang melakukan verifikasi terhadap data dukung dokumen yang disampaikan K/L/D guna memastikan apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan klaim pemenuhan indikator (capaian). Jika tidak sesuai, Tenaga Ahli Setnas PK dapat melakukan klarifikasi kepada K/LD atau bisa juga langsung memberikan pengurangan nilai sesuai pedoman penilaian yang ditetapkan
- Sistem aplikasi jaga.id/monitoring atau jaga.id/stranas juga dapat mengeluarkan rekapitulasi data secara kuantitatif jika kita ingin mengetahui persentase (%) capaian per K/L/D atau capaian per Aksi. Dengan demikian data-data kuantitatif tersebut dapat memudahkan tim Monev Setnas PK melakukan rekapitulasi laporan kemajuan triwulan kepada Timnas PK
- Selain melalui aplikasi jaga.id/monitoring, kegiatan monitoring juga dilakukan dengan metode kunjungan lapangan (*field visit*) untuk verifikasi faktual secara langsung mengenai capaian yang dilaporkan pada aplikasi Jaga. Kunjungan lapangan pada Kementerian/Lembaga/Pemda dilakukan dengan mendatangi langsung unit-unit teknis pelaksana aksi dan juga inspektorat; melakukan diskusi dan tanya jawab; dan memverifikasi secara faktual dokumen data dukung yang sebelumnya sudah dilaporkan

b. Mekanisme Evaluasi

- Secara umum, program evaluasi Stranas PK dapat melingkupi tiga area berikut: 1) evaluasi untuk memastikan apakah pola intervensi selama ini sudah tepat; 2) evaluasi atau pengukuran outcome terhadap setiap aksi; 3) evaluasi dampak dengan penekanan pada persepsi publik atau pengguna sebagai penerima manfaat
- Yang paling mungkin dilakukan Stranas PK dalam waktu dekat adalah evaluasi atau pengukuran outcome terhadap 12 aksi pencegahan korupsi. Tim Monev bersama Tenaga Ahli Stranas PK lainnya telah menyusun indikator outcome dan metode pengukuran. Diharapkan hasil dari pengukuran outcome dapat menggambarkan perubahan sistem dan kebijakan yang dilahirkan Stranas PK telah berkontribusi terhadap pencegahan korupsi secara sistemik

3. Pelibatan Masyarakat Sipil

Pelibatan masyarakat sipil dalam kerangka program pencegahan korupsi pada prinsipnya bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan, namun juga merupakan upaya kesadaran bersama guna mendukung pencapaian target-target pencegahan korupsi secara lebih nyata dan berkesinambungan. Berikut gambaran proses bagaimana Stranas PK melibatkan masyarakat sipil dalam aksi-aksi pencegahan korupsi sejak tahun 2018:

- Pada tahun 2018, paling sedikit 18 CSO nasional telah terlibat dalam beberapa pertemuan dan koordinasi guna membahas perumusan dan penyusunan Aksi PK. Di antara CSO-CSO tersebut adalah TII, ICW, Kemitraan, Auriga, PWYP, Fitra, IBC, LeIP, MAPPI, CSGAR, CITA, Lakpesdam, IPW, IBL, Pattiro, PSHK, FWI, WRI
- Pada tahun 2019-2020, diseminasi dan monitoring pelaksanaan aksi-aksi PK juga telah dilakukan di daerah-daerah dengan melibatkan LSM lokal, media, dan akademisi di 27 provinsi Setnas PK. Lalu secara khusus, Tim Monev melakukan pemantauan pelaksanaan aksi di daerah dengan menggandeng ICW dan TII berserta jaringan CSO lokal di beberapa Provinsi yakni Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara
- Pada medio 2020, Setnas PK kembali menggandeng CSO nasional seperti TII dan ICW serta IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) untuk melakukan pengukuran outcome terhadap 7 aksi PK
- Selain CSO, pemangku kepentingan lain seperti UNODC, UNDP, USAID, AIPJ2, GIZ, The Asia Foundation, dan World Bank adalah mitra pembangunan yang terlibat aktif membantu dan bekerja sama dengan Setnas PK. UNDP, UNODC, USAID, dan AIPJ2 aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemantauan aksi di daerah. UNDP juga aktif bekerja sama dengan Stranas PK menyiapkan instrumen-instrumen komunikasi publik. UNODC, TAF, dan World Bank menaruh perhatian pada advokasi aksi Perencanaan-Penganggaran Berbasis Elektronik, walaupun sampai saat ini hanya UNODC yang konkrit bekerja sama dengan Stranas PK. Sementara GIZ aktif ikut dalam pendampingan aksi Penetapan Kawasan Hutan dan Implementasi Kenijakan Satu Peta

3. Strategi Komunikasi

Pada periode pertama (2019-2020), Stranas PK sebagai sebuah program pencegahan korupsi belum terlalu dikenal, baik oleh Kementerian/Lembaga maupun masyarakat luas. Sehingga upaya-upaya yang sangat aktif terus dilakukan, selain berkoordinasi secara intensif, juga perlu strategi komunikasi yang lebih sistematis sehingga dapat memberi ruang bagi Stranas PK memperkenalkan, membangun, dan menciptakan interaksi antara Stranas PK dan *stakeholders* lainnya, termasuk pemerintah dan masyarakat umum.

Melalui kanal-kanal komunikasi, Stranas PK dapat mengkomunikasikan kepada publik kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan, output atau capaian apa yang dihasilkan dan perubahan apa saja yang sudah terjadi yang berkontribusi terhadap upaya pencegahan korupsi. Oleh karenanya mulai periode kedua (2021-2022), secara aktif dilakukan upaya-upaya komunikasi kepada publik. Berikut merupakan sosial media yang telah dimiliki oleh Stranas PK:



Instagram @stranaspk_official



Akun Youtube **StranasPK_Official**



Website: Untuk meningkatkan komunikasi kepada seluruh stakeholders Stranas PK, Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi melakukan perubahan dalam domain website Stranas PK yang dahulunya adalah www.stranaspk.kpk.go.id, saat ini telah berubah menjadi www.stranaspk.id.



Akun Twitter @stranas_pk



Akun Facebook **Stranas PK**

BAB III

LAPORAN CAPAIAN AKSI

Pelaksanaan aksi pencegahan korupsi (Aksi PK) tahun 2021-2022 melibatkan 48 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 57 Kabupaten/Kota yang diberi tanggung jawab melaksanakan 12 Aksi PK.

Berdasarkan hasil evaluasi dari tim independen, implementasi Stranas PK telah memberi kontribusi perubahan yang sangat positif. Stranas PK, oleh berbagai pemangku kepentingan, dianggap telah memainkan peran penting sebagai fasilitator yang membantu dan mempercepat proses koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah dalam rangka efektivitas pelaksanaan program. Salah satu hasil perubahan dan manfaat terbesar dari pelaksanaan Aksi PK 2021-2022 adalah terjadinya efisiensi sistem dan proses bisnis di pemerintahan yang memudahkan pengawasan terhadap risiko tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, masih ada banyak kendala dan tantangan yang perlu diatasi.

Hingga periode B24 dan selanjutnya, Stranas PK terus berupaya mempercepat pembenahan-pembenahan pada 3 aspek yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan aksi PK selama ini. Pertama, terkait dengan ketersediaan dan kelengkapan data. Kedua, integrasi sistem baik antar-instansi maupun inter-instansi. Ketiga terkait lemahnya pengawasan internal.

Hingga triwulan VIII (B24), dihitung dari total nilai capaian 12 Aksi beserta indikator outputnya maka nilai capaian pelaksanaan aksi Stranas PK adalah 61,6%. Secara umum, beberapa aksi berjalan cukup baik dan sebagian lainnya masih mengalami beberapa kendala sehingga capaiannya masih rendah. Capaian keberhasilan aksi sangat bergantung pada capaian di level output.

Note :

Nilai persentase yang ditampilkan adalah nilai akumulasi – dari triwulan I (B03) sampai dengan triwulan VIII (B24) – atau selama 2 tahun pelaksanaan aksi. Di mana progres nilai capaian aksi maupun output di setiap triwulan dihitung berdasarkan capaian seluruh indikator yang telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah selaku pelaksana aksi. Dengan prinsip kolaborasi dan sinergi maka K/L/D yang melaksanakan indikator yang sama akan memperoleh nilai yang sama pula atas capaian indikator tersebut



FOKUS 1 : PERIZINAN DAN TATA NIAGA

1.

Percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam melalui implementasi kebijakan satu peta: Piloting di 5 Provinsi (Riau, Kalteng, Kaltim, Sulbar, Papua)

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Penggunaan beragam format peta telah menimbulkan konflik pemanfaatan ruang

Selama ini, berbagai pemangku kepentingan menggunakan peta dengan format yang berbeda-beda sehingga menimbulkan konflik sosial, sengketa tanah, dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang.

Ketidaktepastian peruntukan di areal kawasan hutan juga merupakan salah satu yang dapat menghambat laju investasi, pembangunan infrastruktur, dan efektifitas tata kelola hutan itu sendiri, seperti rehabilitasi lahan dan perlindungan daerah tangkapan air. Sehingga masalah ini juga dapat menjadi sumber utama konflik tenurial antar berbagai pihak.

Diharapkan aksi ini dapat menyediakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga dapat memberikan kepastian tenurial yang digunakan sebagai basis dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan berbagai kebijakan, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang untuk usaha dan investasi.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	21,9	32,8	32,9	36,9	38,2	39,3	43,7	46,6

Dari hasil monitoring hingga triwulan VIII (B24), tergambar bahwa realisasi capaian **Aksi Kebijakan Satu Peta** adalah **46,6%**. Secara kualitatif, nilai 46,6% ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada lima output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Kelima output tersebut adalah (a) Ditetapkannya kawasan hutan 100% (17%), (b) Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua (31,6%), (c) Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua (60,7%), (d) Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah (42,1%) dan (e) Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua (20,2%).

Berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:

**terdapat koreksi nilai pada periode B06*



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	<p>Output 1 Ditetapkannya kawasan hutan di 5 Provinsi (Kaltim, Kalteng, Sulbar, Papua, dan Riau)</p> <p>Indikator</p> <p>a. Luas kawasan hutan sesuai SK untuk 5 Provinsi (Kaltim, Kalteng, Sulbar, Papua, dan Riau) adalah sejumlah 57.989.655 ha</p> <p>b. Dari 57.936.540 ha tersebut, luas kawasan hutan di 5 Provinsi yang belum ditetapkan adalah 18.056.925 ha</p> <p>c. Rincian Kawasan Hutan yang belum ditetapkan di 5 Provinsi adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaltim: 412.850 ha(4,92%) - Kalteng: 8.625.551 ha (67,81%) - Sulbar: 30.382 ha (2,78%) - Papua: 5.698.153 ha (18,75%) - Riau: 3.289.990 ha (60,85%) 	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		2%	2%	2%	5%	7%	8%	9%	17%
		<ul style="list-style-type: none"> • Target luasan kawasan hutan yang harus ditetapkan KLHK di 5 provinsi hingga Desember 2022 adalah 18.056.925 ha. Namun sampai triwulan VIII (B24) penetapan kawasan hutan baru mencapai 2,984,986 ha (17%) atau naik 8% dari periode sebelumnya • Hingga laporan ini ditulis, terdapat SK yang sedang dalam proses penandatanganan Menteri LHK seluas 3.234.862 ha. Sehingga terdapat potensi penambahan penetapan kawasan hutan di 5 Provinsi seluas 6.259.967 ha • Sejak tahun 2021 kendala-kendala yang menghambat pencapaian output berikut masih terjadi hingga akhir tahun 2022 ini, di antaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Masalah keamanan dalam pelaksanaan tata batas pada daerah-daerah rawan; - Dokumen tata batas atau penetapan yang tidak lengkap; - Keterbatasan anggaran dan SDM 							

2	<p>Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua</p> <p>Indikator Jumlah RDTR pada 42 Kab/Kota: Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Bengkalis, Berau, Boven Digoel, Gunung Mas, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Jayapura, Kampar, Kapuas, Katingan, Keerom, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kuantan Singingi, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Lamandau, Mahakam Ulu, Mamuju, Mamuju Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Murung Raya, Nabire, Palangkaraya, Pasangkayu, Paser, Pekanbaru, Pelalawan, Penajam Paser Utama, Pulang Pisau, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Sarmi, Seruyan, Siak, dan Sukamara</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		5,1%	15,2%	15,2%	17,6%	18,1%	21,6%	24,5%	31,6%
		<ul style="list-style-type: none"> • Dari 42 kab/kota di 5 provinsi yang menjadi target Stranas PK, terdapat 8 kabupaten/kota telah memiliki peta digital berbasis RDTR yang terintegrasi dengan OSS, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Provinsi Kalteng: ada 3 kabupaten dari 14 kabupaten/kota <i>piloting</i>, yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Waringin Barat - Provinsi Kaltim: ada 1 kabupaten (dari 7 kabupaten/kota <i>piloting</i>), yaitu Kabupaten Kutai Timur - Provinsi Riau: ada 2 kabupaten (dari 10 kabupaten/kota <i>piloting</i>), yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan - Provinsi Papua: ada 2 kabupaten (dari 10 kabupaten/kota <i>piloting</i>), yaitu Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Boven Digoel - Provinsi Sulbar: dari 3 kabupaten/kota <i>piloting</i>, belum satupun RDTR terintegrasi OSS • 3 kabupaten sudah ada penetapan RDTR dan saat ini sedang proses integrasi OSS, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Kutai Barat 							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
3	<p>Output 3 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi <i>piloting</i>: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua</p> <p>Indikator Integrasi ILOK pada 23 Pemda dan Integrasi IUP pada 25 Pemda, 4 PITTI tersedia, 28 rekomendasi tersedia</p> <p><i>Note:</i> Proses kompilasi dan integrasi ILOK dan IUP bersifat sangat dinamis. Data SK, lampiran peta dan peta digital yang disampaikan Pemerintah Daerah diverifikasi oleh BIG dengan parameter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen perizinan 2. Konsistensi topologi: IGT tidak boleh ada gap dan overlap dalam satu IGT 3. Akurasi posisi: IGT dilakukan pengujian akurasi posisi relatif terhadap layer Garis Pantai dan Batas Administrasi pada Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dengan skala 1:50.000 4. Standar kelengkapan dan konsistensi data atribut <p>Penyampaian data oleh Kab/Kota dikordinasikan di tingkat Provinsi. Seringkali, data yang disampaikan oleh Kab/Kota berubah jumlahnya (berkurang ataupun bertambah) baik SK, lampiran peta maupun peta digitalnya. Oleh karena itu, capaian triwulan masing-masing Kab/Kota seringkali mengalami perubahan (tidak selalu setiap triwulan mengalami kenaikan, ada kalanya capaiannya lebih rendah dari triwulan sebelumnya)</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		56,4%	57,2%	57,5%	57,5%	60,1%	51%	59%	60,7%
		<p>Dari 24 Pemda target integrasi ILOK di 4 provinsi, baru ada 6 Kabupaten yang capaian integrasi ILOK dan IUP-nya sangat baik (di atas 90%), yaitu: Mamuju, Mahakam Ulu, Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Berau. Berikut rinciannya per provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Riau Belum ada satupun kabupaten yang selesai integrasi ILOK dan IUP. Hanya Kabupaten Bengkalis yang sudah selesai integrasi ILOK, namun belum selesai integrasi IUP. Saat ini sedang dilakukan asistensi bekerja sama dengan CSO lokal Eye on the Forest 2. Provinsi Kalimantan Timur Dari 7 kabupaten, terdapat 6 kabupaten yang sangat baik (di atas 90%) proses kompilasi dan integrasinya, yaitu Mahakam Ulu, Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, dan Berau 3. Provinsi Papua Proses kompilasi dan integrasi ILOK dan IUP sawit telah selesai. Tahap selanjutnya adalah penyusunan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT 4. Provinsi Sulawesi Barat <ul style="list-style-type: none"> - Dari 3 kabupaten, hanya Mamuju yang telah selesai integrasi ILOK dan IUP sawit. Dua kabupaten lainnya (Pasangkayu, Mamuju Tengah) masih melakukan integrasi IUP secara parsial - Saat ini tim asistensi dari CSO lokal terus mendampingi proses kompilasi untuk Pemprov Sulbar, Pemkab Pasangkayu, dan Pemkab Mamuju Tengah 							

4	<p>Output 4 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Pemprov Kalimantan Tengah</p> <p>Indikator Jumlah tindak lanjut lokus ada 14 kab/ kota Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Palangkaraya, Pulang pisau, Seruyan dan Sukamara</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		1%	12,1%	12,1%	24,6%	24,6%	42%	42%	42,1%
		<ul style="list-style-type: none"> • Capaian sampai Triwulan VIII (B24) hanya meningkat sedikit dari triwulan sebelumnya, peningkatan hanya terjadi pada kabupaten Kotawaringin Timur • Berikut persentase ketuntasan per kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah hingga TW VIII: <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Barito Selatan: 80% - Kabupaten Barito Timur: 47% - Kabupaten Barito Utara: 62% - Kabupaten Gunung Mas: 49% - Kabupaten Kapuas: 60% 							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
4	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Katingan: 44% - Kabupaten Kota Palangkaraya: 35% - Kabupaten Kotawaringin Barat: 11% - Kabupaten Kotawaringin Timur: 40% - Kabupaten Lamandau: 7% - Kabupaten Murung Raya: 79% - Kabupaten Pulang Pisau: 33% - Kabupaten Seruyan: 26% - Kabupaten Sukamara: 10%

<p>5 Output 5 Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua</p> <p>Indikator Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di 5 Provinsi; Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, Riau, Sulawesi Barat</p>	<table border="1" data-bbox="724 674 1420 801"> <thead> <tr> <th>B03</th> <th>B06</th> <th>B09</th> <th>B12</th> <th>B15</th> <th>B18</th> <th>B24</th> <th>B24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1%</td> <td>1%</td> <td>1%</td> <td>15,4%</td> <td>15,4%</td> <td>20,2%</td> <td>20,2%</td> <td>20,2%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Dari 5 Provinsi yang menjadi target Stranas PK untuk integrasi RZWP3K dengan RTRW, belum ada satupun yang terintegrasi • Berikut beberapa catatan proses yang dapat disampaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Riau: Belum ada penetapan Perda RZWP3K, namun dokumen final sudah disetujui Kementerian Kelautan dan Perikanan - Sulawesi Barat: Perda RZWP3K telah ditetapkan pada 2014, karena adanya perubahan substansi RZWP3K, maka perlu dilakukan penyesuaian. Saat ini penyusunan materi teknis perairan pesisir sedang proses finalisasi - Papua: telah mendapat Persetujuan Teknis (Pertek) dari Menteri Kelautan dan Perikanan pada 31 Mei 2022. Saat ini dalam proses integrasi materi teknis darat dan laut serta penyusunan KLHS - Kalimantan Timur: Perda lama tahun 2016 sedang direvisi. Saat ini sedang proses penyusunan materi teknis perairan pesisir dan berita acara peta dasar - Kalimantan Tengah: Perda lama tahun 2012 sedang direvisi dan saat ini baru pada tahap penyusunan materi teknis 	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B24	B24	1%	1%	1%	15,4%	15,4%	20,2%	20,2%	20,2%
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B24	B24										
1%	1%	1%	15,4%	15,4%	20,2%	20,2%	20,2%										

2.

Perbaikan integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan strategis dan kesehatan

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Izin impor komoditas strategis rawan korupsi karena tidak berbasis data tunggal yang akurat, serta perizinan tidak transparan

Pelaksanaan impor disinyalir sering tidak tepat waktu dan jumlah. Misalnya saat pemerintah melakukan impor besar-besaran pada saat panen raya atau kelambatan impor saat paceklik. Hal ini menyebabkan ketersediaan dan harga barang tertentu di pasar domestik sulit diprediksi. Kondisi ini bukan saja merugikan produsen lokal tapi juga konsumen dan mengancam stabilitas nasional. Di sisi lain kelangkaan barang yang terjadi dapat merupakan sebuah kondisi yang sengaja diciptakan oleh para pemburu rente guna mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan mendorong pemerintah membuka keran impor.

Aksi ini bertujuan agar tersedia data yang akurat disertai mekanisme pengawasan melekat berbasis risiko yang menjadi dasar rujukan bersama seluruh perumus kebijakan terkait impor. Sistem Nasional Neraca Komoditas (S-NANK atau SIINAS NK) yang disediakan pada portal National Single Window (INSW) dapat menjadi sarana untuk menjaga akuntabilitas dari pelaksanaan impor.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	N/A	N/A	13,8	41,5	69,7	74,4	74,4	93,8

Dari hasil monitoring pada triwulan VIII (B24), tergambar bahwa realisasi capaian Aksi **Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan** adalah **93,8%**. Artinya ada progres cukup signifikan pada periode ini. Nilai ini merupakan hasil kontribusi dari capaian pada satu output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) atau secara spesifik terkait pada 3 aspek penilaian sebagaimana diuraikan pada kolom output di bawah.

Berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
<p>1 Output 1 Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan (alat kesehatan, vaksin) sebagai basis pengambilan kebijakan</p>	<p>Berikut progres output yang dapat disampaikan berdasarkan 3 aspek pengukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait ketersediaan data realisasi impor; <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 5 komoditas pangan strategis dari target 6 komoditas batch 1 yang datanya sudah mengalir melalui sistem nasional neraca komoditas (SINAS NK), yakni gula, beras, daging, garam, dan jagung • 1 Komoditas lainnya yaitu bawang putih masih menggunakan mekanisme NK transisi. Walaupun belum sepenuhnya menggunakan mekanisme NK, namun telah dilakukan integrasi sistem perizinan pertanian elektronik (Simpel) di Kementan dengan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
<p>1 Indikator Indikator penilaian dibagi ke dalam 3 aspek dengan bobot nilai yang berbeda, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah tersedia data realisasi impor yang sinkron (tidak melampaui) dengan data kebutuhan impor nasional (konsumsi nasional dikurangi data ketersediaan nasional) (50%) 2. Telah terbit Perpres Neraca Komoditas (25%) 3. Telah ada penyepakatan elemen data final (25%) <p><i>*per periode B18, dilakukan perubahan komoditas kesehatan dari vaksin dan masker menjadi narkotika, psikotropika, dan prekursor. Perubahan ini berdasarkan hasil kesepakatan antara Stranas PK, LNSW, dan Kementerian Kesehatan, mengingat pandemi Covid-19 sudah menurun sehingga kebutuhan masker dan vaksin sudah tidak menjadi gejala pasokan dan realisasi</i></p>	<p>SINAS NK. Mekanisme ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 Perpres 32/2022, di mana pengajuan persetujuan impor/ekspor (PI/PE) untuk komoditas bawang putih telah dilakukan melalui SINAS NK</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terkait implementasi Perpres Neraca Komoditas; telah terbit Perpres No.32/2022 di bulan Februari 2022. Sejak tahun 2021, telah dilakukan penetapan Neraca Komoditas untuk komoditas tahap I (sesuai pasal 29 ayat 2) yang dikawal Stranas PK yaitu Beras, Daging, Gula, Garam, dan Jagung. Dengan demikian, penerbitan PI/PE untuk komoditas tersebut berdasarkan Neraca Komoditas 3. Terkait penyepakatan elemen data, seluruh komoditas sudah selesai. Khusus untuk pengaliran data produk narkotika, psikotropika, dan prekursor (realisasi impor), saat ini baru pada tahap: <ul style="list-style-type: none"> - Penyepakatan alur pengajuan RKT yang telah diimplementasikan dalam modul pengajuan RKT yang telah dibangun; - Penyepakatan elemen data pengajuan RKT yang diimplementasikan dalam bentuk dokumen Pedoman Integrasi Aplikasi (PIA) antara sistem INSW dengan sistem Kemenkes

3.

Pemanfaatan data *Beneficial Ownership* (BO) untuk penanganan perkara, perizinan dan pengadaan barang jasa

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Tingginya penyalahgunaan korporasi untuk Tipikor, TPPU, Pendanaan Terorisme maupun penghindaran pajak

Saat ini, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi berkembang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Salah satu yang sering disalahgunakan adalah korporasi. Penggunaan korporasi untuk menyembunyikan aset yang dihasilkan tindak pidana korupsi dan pencucian uang semakin marak dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Diharapkan aksi ini dapat membuka jalan bagi pemanfaatan data BO untuk pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan pidana perpajakan.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	9,6	10,1	12,5	17,1	22,2	38,3	46	50,5

Dari hasil monitoring hingga triwulan VIII (B24), tergambar bahwa realisasi capaian **aksi Pemanfaatan BO** adalah **50,5%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada tiga output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. ketiga output yang mengalami kemajuan tersebut adalah (a) Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (38%), (b) Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa (57,5%). Dan (c) Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat (100%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	Output 1 Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait Indikator Jumlah korporasi yang sudah mendeklarasikan BO	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		20%	21%	23%	25%	26%	29%	37%	38%
		<ul style="list-style-type: none"> Nilai capaian output 1 pada Triwulan VIII (B24) adalah 38% 							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
<p>1 Output 1</p> <p><i>Note:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah korporasi aktif angkanya bersifat dinamis karena setiap bulan selalu ada penambahan korporasi baru dan juga pengurangan korporasi lama yang sudah tidak aktif Korporasi terdiri dari PT, Yayasan, Perkumpulan, CV, Firma, PP, dan Koperasi* Jumlah korporasi aktif per Des 2020: 2.014.203 Jumlah korporasi deklarasi BO per Des 2020: 330.021 (16.38%) <p>*Per periode B21, data BO pada Koperasi dan Perkumpulan tidak dimasukkan sebagai faktor penilaian</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah korporasi aktif (PT, Yayasan, CV, Firma, PP) per Desember 2022 adalah 1.935.499; yang telah mendeklarasi BO adalah 744.683 (38,47%) Walaupun telah dilakukan nota kesepahaman sejak 2019 dan ditindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penguatan dan Pertukaran Data BO antara Kemenkumham dengan Kemenkeu, KESDM, Kementan, Kementerian KUKM, Kementerian ATR/BPN, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Baru ada KemenESDM dan Kementan yang sistem perizinannya sudah terkoneksi dengan sistem basis data AHU Online. Akibatnya pelaporan data BO oleh K/L tersebut masih belum maksimal Berikut progres integrasi sistem di K/L dengan sistem basis data BO Ditjen AHU KemenkumHAM: <ul style="list-style-type: none"> Kemenkeu telah menerbitkan surat izin S-472/M-K.03/2022 tanggal 25 Mei 2022 untuk memberikan data dan informasi perpajakan. Hingga tanggal 13 Desember 2022, Ditjen Pajak telah menyelesaikan proses persiapan pertukaran data internal dengan melakukan kegiatan <i>User Acceptance Test</i>. Saat ini proses pertukaran data sedang dilakukan KemenESDM telah membangun sistem pelayanan/perizinan dengan mewajibkan syarat data BO dan KSWP bagi badan usaha yang mengajukan layanan/izin. Saat ini, aplikasi BO Kementerian ESDM telah terintegrasi dengan layanan basis data BO di Ditjen AHU KemenkumHAM (bo.ahu.go.id) melalui mekanisme <i>web service/API (Application Programming Interface)</i> dan integrasi NPWP milik Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan Sistem perizinan di Kementan (Siperibun) telah mensyaratkan data BO dan saat ini telah terkoneksi dengan sistem basis data BO pada AHU Online, walaupun baru berjalan satu arah. Hingga 13 Desember 2022 sebanyak 857 perusahaan (33,476%) telah deklarasi data BO dari 2.560 perusahaan perkebunannya yang melaporkan profil usaha perkebunannya pada SIPERIBUN OJK sedang dalam tahap pengembangan Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) dengan fitur pengisian informasi BO pada proses perizinan oleh OJK. Saat ini, SIPUTRI sudah melalui proses <i>User Acceptance Test (UAT)</i> untuk memastikan sistem, termasuk modul BO, telah memadai Kemenkop UKM telah menerapkan persyaratan BO bagi koperasi yang mengajukan proses pelayanan/perizinan namun belum dilakukan dengan sistem Online, sehingga belum dapat diintegrasikan dengan sistem basis data BO AHU Online K/L lain seperti Kementerian ATR/BPN, Kemendag dan KLHK belum membangun sistem basis data BO yang terintegrasi

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
2	<p>Output 2 Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat</p> <p>Indikator Terbukanya akses untuk publik*</p> <p><i>*indikator ini berlaku per B18 sebagai revisi terhadap indikator sebelumnya yang berbunyi: Jumlah akses layer publik. Perubahan ini dilakukan karena indikator sebelumnya dianggap sulit diukur secara obyektif</i></p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		1%	1%	1%	1%	1%	100%	100%	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai capaian output 2 sampai Triwulan VIII (B24) ini adalah 100%. Artinya pemenuhan indikator ini telah tercapai dengan dibukanya akses publik oleh KemenkumHAM per 1 Juli 2022 • Namun demikian, KemenkumHAM perlu terus mengupdate jumlah akses yang dilakukan publik 							
3	<p>Output 3 Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa</p> <p>Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah akses layer APH untuk kebutuhan penegakan hukum Jumlah pengajuan izin sektor ekstraktif dan perkebunan yang data BO nya diverifikasi oleh Pemberi izin Jumlah pengadaan barang dan jasa yang data BO korporasi pesertanya terverifikasi 	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		1%	1%	4%	11,4%	20,6%	41,09%	49,3%	57,5%
		<p>Nilai capaian output 3 sampai Triwulan VIII (B24) mengalami beberapa kemajuan walaupun belum terlalu signifikan. Kemajuan ini karena kontribusi dari beberapa K/L, khususnya Kementan dan KemenESDM pada indikator (b). Berikut progres dan kendala yang dapat disampaikan pada 3 indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KemenkumHAM belum dapat mengembangkan sistem fitur untuk penyediaan akses Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap Data BO dengan alasan belum ada kebijakan atau perjanjian kerja sama mengenai dibukanya akses data BO bagi APH, kecuali dengan PPAK dan KPK. Walaupun demikian akses atau pemanfaatan data telah dilakukan secara manual melalui surat permohonan dari LPH kepada KemenkumHAM. Yang terlapor sudah memanfaatkan data adalah KPK (melalui <i>application programming interface</i>), PPAK (secara Online), Kejaksaan dan kepolisian (secara manual) b. Proses perizinan di kementerian/lembaga pun belum sepenuhnya memanfaatkan data BO sebagai penapis. Hanya KemenESDM dan Kementan yang telah memanfaatkan data BO tersebut melalui web service; BKPM baru pada tahap komitmen menerapkan data BO sebagai penapis perizinan di OSS; di Kemen ATR/BPN, basis data BO terkait pemohon HGU belum dilakukan secara online; untuk KLHK, pemohon perizinan di sektor kehutanan belum didukung regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk deklarasi BO. Perlu dilakukan PKS antara KLHK dan KemenkumHAM c. Pemanfaatan data BO oleh korporasi peserta pengadaan barang dan jasa sudah pada tahap menyepakati substansi draf final perjanjian kerja sama (PKS). Saat ini telah dilakukan <i>legal drafting</i> untuk penandatanganan terhadap rancangan PKS antara KemenkumHAM dan LKPP. Sebelumnya telah dilakukan proses penyepakatan elemen data terkait pemilik manfaat dan juga klausul-klausul tentang peran, hak, dan kewajiban masing-masing pihak 							



FOKUS 2 : KEUANGAN NEGARA

4. Percepatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Perencanaan dan penganggaran adalah fase rawan korupsi

Masalah utama sistem perencanaan dan penganggaran nasional saat ini adalah tidak terintegrasi dan juga kurang sinerginya sistem perencanaan dan penganggaran baik secara horizontal di Pusat dan di Daerah maupun secara vertikal antara Pusat dengan Daerah. Seringkali terjadi apa yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan. Pengalokasian anggaran juga tidak mencerminkan prioritas yang ditetapkan. Akibatnya terjadi inefisiensi, inefektivitas dan tingginya risiko korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan utama aksi ini adalah mengupayakan tersedianya suatu sistem yang menjamin teragregasinya data dan informasi secara elektronik pada semua tahap siklus penganggaran, mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan/ penatausahaan hingga pelaporan atau audit.

Dengan demikian Aksi ini diharapkan dapat menciptakan: 1) proses perencanaan dan penganggaran yang transparan, partisipatif, dan akuntabel; 2) dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas; 3) program dan belanja pemerintah yang berorientasi pada *outcome*.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	0	18,6	40,6	42,7	47,7	50,6	57,3	69,9

Dari hasil monitoring hingga Triwulan VIII (B24), tergambar bahwa realisasi capaian **aksi Integrasi perencanaan-penganggaran** adalah **69,9%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada keseluruhan tiga output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Ketiga output tersebut adalah: (a) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat (80%), (b) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah (70%), (c) Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah (50%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	<p>Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat</p> <p>Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di K/L</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		0%	25%	60%	60%	65%	70%	75%	80%
		<p>Nilai capaian output 1 hingga Triwulan VIII (B24) ini berjalan cukup baik. Berikut disampaikan beberapa proses yang telah dilakukan terkait integrasi Krisna-Sakti:</p> <p>A. Integrasi Krisna-Sakti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai tindak lanjut dari MoU integrasi Krisna dan Sakti maka pada periode B21 lalu telah ditetapkan SOP penyederhanaan proses bisnis perencanaan penganggaran. SOP ini ditandatangani Deputi Bidang Pendanaan Bappenas dan Dirjen Anggaran Kemenkeu • Bappenas dan Kementerian Keuangan telah mengadakan berbagai pertemuan teknis dengan hasil sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - KRISNA Renja telah terhubung dengan SAKTI RKA melalui API <i>service</i> dan telah mendapatkan data balikan berupa Referensi kode nomenklatur, alokasi dan target serta lokasi administrasi. Sehingga KRISNA Renja dapat menampilkan fitur komparasi antara data Renja dan data RKA K/L, meskipun masih terdapat perbedaan interpretasi atas data lokasi - Persiapan teknis fitur interkoneksi sistem perencanaan (KRISNA Renja) dan sistem penganggaran (SAKTI RKA) akan mulai digunakan pada tahun anggaran 2023; Saat ini sedang terus dilakukan uji coba pemanfaatan fitur penyalarsan Renja dan RKA pada aplikasi SAKTI, terutama pada 6 K/L berikut: Bappenas, Kemenkeu, KemenPANRB, KemenPUPR, BPK, dan KPK - Meski pertukaran data antara KRISNA dan SAKTI telah berjalan dengan baik, bahkan sudah ditambahkan fitur untuk penyalarsan Renja KL dan RKA KL pada aplikasi SAKTI namun masih ada tantangan besar ke depan yaitu terkait sinergi pengukuran kinerja antara kinerja program yang dilakukan Bappenas melalui aplikasi e-monev, kinerja anggaran oleh Kemenkeu melalui aplikasi mon-sakti, dan kinerja instansi oleh KemenPANRB melalui e-lakip/e-sakip. Idealnya ketiga pengukuran ini bisa disinergikan dan menggunakan prinsip berbagi pakai data sehingga KL tidak melakukan pelaporan berkali-kali untuk hal yang semestinya sama 							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala																
<p>1 Output 1</p>	<p>B. Integrasi SAKTI-SIRUP</p> <ul style="list-style-type: none"> Proses membangun koneksi antara Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Mon-SAKTI) dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sudah mulai dilakukan. LKPP dan Kemenkeu telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Interkoneksi kedua aplikasi tersebut. PKS ini bertujuan untuk meningkatkan keterhubungan antara aplikasi MonSAKTI dengan aplikasi SIRUP sehingga dapat meningkatkan kecepatan tata kelola, penyediaan akses, dan ketepatan pemrosesan pembayaran atas pengadaan barang/jasa pemerintah Menurut LKPP, <i>two-way traffic</i> SAKTI dan SIRUP saat ini telah berjalan pada proses awal yang memudahkan pengisian SIRUP oleh Kementerian/Lembaga, sehingga K/L tidak perlu lagi menginput ulang data/informasi yang sama antara SAKTI. Artinya K/L cukup menginput sekali saja di SAKTI Pilot project implementasi integrasi aplikasi SIRUP dengan aplikasi SAKTI telah dilakukan pada 15 K/L. Saat ini hasil integrasi SIRUP - SAKTI sudah dapat dilakukan penarikan data RKA-KL. Perlu disampaikan bahwa aplikasi KRISNA dan SAKTI bukan merupakan aplikasi yang didesain untuk mengumumkan rencana Umum Pengadaan (RUP), sehingga pengumuman RUP tetap dilakukan melalui aplikasi SIRUP. Integrasi ini dapat mendorong kementerian/lembaga untuk mengumumkan RUP pada aplikasi SIRUP mendahului tahun anggaran. Upaya tersebut berpotensi mempercepat realisasi anggaran belanja pemerintah dan meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa 																
<p>2 Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah</p> <p>Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Daerah</p>	<table border="1" data-bbox="722 1361 1418 1485"> <thead> <tr> <th>B03</th> <th>B06</th> <th>B09</th> <th>B12</th> <th>B15</th> <th>B18</th> <th>B21</th> <th>B24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>40%</td> <td>40%</td> <td>45%</td> <td>50%</td> <td>60%</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai capaian output 2 hingga Triwulan VIII (B24) ini masih belum mengalami banyak kemajuan. Namun terus berproses secara perubahannya. Berikut beberapa informasi yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Khusus untuk modul perencanaan dan modul penganggaran pada SIPD sudah digunakan secara luas oleh 538 pemda Menurut Kemendagri, seluruh Pemda telah menginput RKPD 2022 melalui SIPD. Dengan demikian, untuk modul perencanaan sampai penetapan APBD, sudah tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak menggunakan SIPD karena sudah ajeg 	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	0%	25%	40%	40%	45%	50%	60%	70%
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24										
0%	25%	40%	40%	45%	50%	60%	70%										

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
<p>2 Output 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modul penatausahaan SIPD versi monolitik telah digunakan oleh 295 pemkab/pemkot dan 21 pemprov; sementara modul akuntansi pelaporan pada SIPD monolitik telah digunakan oleh 90 Pemda. Oleh karenanya perlu dipastikan bahwa seluruh pemda menggunakan SIPD monolitik untuk penatausahaan dan akuntansi pelaporan agar terjadi percepatan aliran data secara terpusat. Berdasarkan hasil asesmen Pusilkom UI, tidak disarankan untuk tahapan penatausahaan dan akuntansi pelaporan tahun anggaran 2023 menggunakan SIPD <i>microservice</i> karena integrasi SIPD <i>microservice</i> untuk penatausahaan dan akuntansi pelaporan belum diuji. Ditambah lagi saat ini Pusdatin Kemendagri sedang melakukan migrasi SIPD monolitik modul perencanaan penganggaran ke SIPD <i>microservice</i> sehingga beban migrasi data akan sangat besar saat ini • Terkait integrasi SIPD dan SIMDA Web (FMIS), secara khusus, pada bulan Juli 2022 lalu telah dicapai kesepakatan antara BPKP dan Kemendagri untuk integrasi di daerah melalui penyatuan SIPD dengan SIMDA Web (FMIS). Guna mempercepat integrasi tersebut, Stranas PK menggandeng Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Pusilkom UI). Berdasarkan hasil asesmen, Pusilkom menyarankan agar integrasi dilakukan secara bertahap dengan beberapa skenario • Walaupun SIPD sudah berjalan, namun beberapa Pemda masih menemui kendala-kendala teknis, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> - Kendala pada akses terutama pada saat <i>peak season</i> di mana seluruh Pemda mengakses dalam waktu bersamaan. Akibatnya menghambat proses pencairan. Misalnya pada saat verifikasi aspirasi/usulan Pemkot/Pemkab dan masyarakat umum. Disarankan ada peningkatan kapasitas server SIPD di pusat atau menggunakan <i>server</i> di daerah - Pemda belum dapat melakukan <i>mirroring</i> data yang ada di SIPD untuk bisa diintegrasikan dengan sistem yang ada di Pemda - Aplikasi SIPD kurang efisien dari sisi waktu, khususnya terkait proses input rincian obyek karena harus memilih kode rekening yang sama berulang kali jika rincian obyeknya banyak - <i>Help desk</i> SIPD di Kemendagri kurang responsif, begitu juga dengan user manual dan video tutorial yang tidak <i>updated</i> ikut menyulitkan pemda mengatasi kendala-kendala teknis yang ditemui di lapangan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
3	<p>Output 3 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah</p> <p>Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		0%	10%	30%	35%	40%	40%	45%	50%
		<ul style="list-style-type: none"> • Output ini belum mengalami kemajuan signifikan hingga periode VIII (B24) ini. Berikut beberapa informasi yang dapat disampaikan: • Penyusunan RPP Bagan Akun Standar yang mengalami kendala sejak tahun 2019, pada saat ini disepakati untuk digabung penyusunannya dengan RPP Sinergi Kebijakan Fiskal, sehingga menjadi satu RPP saja, yaitu RPP tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang selanjutnya akan didetailkan ke dalam regulasi PMK • Untuk itu, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 317/KMK.07/2022 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional. Draf RPP telah disusun dan disetujui substansinya oleh Kemendagri, Kemenko Perekonomian, Bappenas, dan Kemenkeu. Saat ini draf RPP sudah diajukan ke KemenkumHAM untuk proses harmonisasi • Dari sisi teknis, saat ini koneksi antara SIPD dan SIKD Kemenkeu telah dilakukan melalui penghubung yang dikembangkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu yakni Sinergi 4 dan Sinergi 5. Sejak awal November 2022, sudah terdapat 95 pemda pengguna SIPD yang dapat mengirimkan Data Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) ke DJPK secara riil <i>time</i> menggunakan Sinergi 5 • Integrasi pusat dan daerah juga mencakup integrasi dengan Keuangan Desa. Dalam hal ini, Kemendes dan BPKP telah memberikan saran dan masukan agar proses integrasi SISKEUDES dengan SIPD dapat dilakukan secara paralel bersamaan dengan penyatuan SIMDA-SIPD • Pusdatin Kemendagri sudah mulai membangun proses interoperability antara SIPD dengan sistem aplikasi lain seperti KRISNA, SAKTI dan SIRUP LKPP. Namun untuk proses integrasi SIPD dengan SISKEUDES masih pada tahap awal pembahasan 							

5.

Penguatan implementasi pengadaan barang/jasa dan pembayaran berbasis elektronik

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Proses pengadaan barang dan jasa masih banyak menggunakan cara konvensional yang tidak transparan

Walaupun sudah diinisiasi sejak lama, masih sedikit K/L/D yang menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa secara modern menggunakan platform elektronik dan digital.

Seperti diketahui, pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional telah menimbulkan banyak pemborosan anggaran dan kecurangan atau penipuan karena proses pengadaan yang berjalan lama dan rumit. Pun harga dan spesifikasi barang/jasa yang dirilis tidak transparan dan tidak standar.

Aksi ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme pembayaran secara digital dalam proses pengadaan barang dan jasa, misalnya melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, *internet banking* atau mekanisme *payment gateway* yang sudah berkembang saat ini. Selain itu proses transaksi belanja barang/jasa didorong menggunakan *platform marketplace* dan katalog elektronik.

Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa pemerintah akan menjadi transparan dan efisien secara waktu dan biaya, serta dapat menurunkan angka korupsi di sektor pengadaan karena minimnya pertemuan antara penyedia dan pengguna barang/jasa secara tatap muka.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	1,4	1,3	7	12,2	22,6	36,3	59,0	72,2

Dari hasil monitoring hingga Triwulan VIII (B24), tergambar bahwa realisasi capaian **aksi Penguatan implementasi pengadaan barang jasa dan pembayaran berbasis elektronik** adalah **72,2%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada keseluruhan lima output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Kelima output tersebut adalah: (a) Tersedianya sistem pembayaran elektronik (e-payment) dalam Pengadaan Barang/Jasa K/L/D (100%), (b) Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi (41,8%), (c) Tersedia dan termanfaatkannya sistem informasi pengadaan barang/jasa konstruksi (100%), (d) Tersedianya dan termanfaatkannya sistem informasi Pengadaan alat kesehatan (100%), dan (e) Pemanfaatan e-katalog (90,7%).

**nilai pada periode B06 terlihat lebih kecil (menurun) dibandingkan B03 karena ada penyesuaian rumusan output dan indikator. Ada output dan indikator yang dihapus, ada pula yang mengalami penambahan. Dengan demikian, perubahan nilai ini bukan karena capaiannya menurun*

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	<p>Output 1 Tersedianya sistem pembayaran elektronik (<i>e-payment</i>) dalam Pengadaan Barang/Jasa K/L/D</p> <p>Indikator Penetapan regulasi tentang <i>e-payment</i> untuk belanja online</p> <p><i>Note:</i> Terdapat 6 regulasi yang menjadi target dari output ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang ditetapkan Menteri Keuangan (PMK) 2. Regulasi tentang Revisi PMK 231/2019 terkait Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 3. Regulasi tentang marketplace di Bela Pengadaan sebagai Pengusaha Kena Pajak 4. Regulasi tentang tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri 5. Regulasi tentang Elektronifikasi Transaksi di Pemerintah Daerah (ETP) yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri 6. Regulasi tentang Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri 	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		0,4%	7,1%	65%	70%	85%	100%	100%	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai capaian output 1 hingga Triwulan VIII (B24) telah tercapai sempurna 100%. Berikut keseluruhan penetapan 6 regulasi yang dijadikan target (3 milik Kemenkeu dan 3 milik Kemendagri): <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terbit PMK 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah 2. Telah terbit PMK 59/2022 tentang Perubahan Atas PMK 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Bagi Instansi Pemerintah 3. Telah terbit PMK 58 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, dan/atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah 4. Telah ditetapkan regulasi tentang tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 (Permendagri 27 Tahun 2021) 5. Telah terbit Permendagri Nomor 56/2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 6. Telah terbit Permendagri Nomor 79/2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD • Dengan terpenuhinya seluruh target dari output ini maka ke depan, Kemenkeu dan Kemendagri perlu mengawal implementasi regulasi diawali dengan tahap sosialisasi, terutama terkait: <ul style="list-style-type: none"> - PMK 58/2022 dan PMK 59/2022, di mana Kemenkeu perlu menyosialisasikan kepada <i>marketplace</i> dan UMKM agar kedua regulasi tersebut dapat terimplementasi dengan baik - Permendagri 79/2022 tentang Juknis penggunaan KKP daerah agar Pemda segera dapat menerapkan penggunaan KKP dalam transaksi belanja elektronik 							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala							
<p>2 Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi</p> <p>Indikator</p> <p>a. Monitoring progres implementasi Bela Pengadaan oleh LKPP</p> <p>b. 10% pengadaan langsung di bawah 50 jt (Pemprov) dan 200 juta (K/L) dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKP/KKPD atau mekanisme <i>e-payment</i> lainnya</p> <p>c. Meningkatnya jumlah UMKM yang menjadi penyedia di PPMSE Bela Pengadaan</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
	N/A	N/A	5,5%	7,5%	20,6%	34,8%	37,5%	41,8%
	<p>Berikut laporan kemajuan pada periode TW VIII (B24) yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait indikator (a), LKPP telah melakukan beberapa perbaikan terhadap sistem Bela Pengadaan, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada lagi pembatasan komoditas untuk berbelanja di Bela Pengadaan - 39 PPMSE sudah menayangkan produk yang bisa ditransaksikan di Bela Pengadaan - Pencatatan transaksi sudah bisa disajikan secara <i>real-time</i> kecuali data dari 3 PPMSE - <i>Dashboard</i> sudah menampilkan jumlah transaksi dari instansi berdasarkan tahun anggaran • Terkait indikator (b), terjadi peningkatan pemanfaatan Bela Pengadaan oleh pemprov walaupun belum banyak yang melakukan transaksi minimal 10% dari jumlah pagu belanja langsung. Berikut progres transaksi oleh Pemprov untuk periode tahun 2021 dan 2022 yang dapat disampaikan: <ul style="list-style-type: none"> - 6 pemprov (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, dan Gorontalo) yang telah melakukan transaksi belanja langsung 10% dari Rencana Umum Pengadaan langsung barang di bawah 50 juta, baik pada tahun 2021 maupun 2022 - 18 pemprov (Banten, DIY, Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Lampung, Riau, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sumsel, Sumut, Sumbar, NTT, Kepri, Babel, Kaltim) telah membelanjakan 10% langsung barang di bawah 50 juta untuk periode tahun 2022 saja - 7 pemprov (Bengkulu, Kaltara, Aceh, NTB, Sulut, Maluku, Maluku, Sulbar) sudah melakukan transaksi belanja tetapi belum mencapai target 10% dari RUP - 2 pemprov (Sulbar, Papua, Papua Barat) belum memanfaatkan <i>platform</i> Bela Pengadaan; • Untuk tingkat K/L, dari target 12 K/L baru KemenPUPR yang sudah menggunakan platform Bela Pengadaan secara optimal untuk belanja langsung barang di bawah 200 juta • 10 K/L lainnya, yaitu Kemenkop UKM, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkes, KLHK, Kemenpar, Kemenhub, kemenperin, Kementan, Polri telah memanfaatkan platform Bela Pengadaan namun belum mencapai transaksi belanja 10% dari rencana umum pengadaan (RUP) langsung barang di bawah 200 juta • Kemenhan dan BNPB belum memanfaatkan Bela Pengadaan • Terkait indikator (c), hingga periode B24, terdapat peningkatan jumlah UMKM yang masuk menjadi Penyedia di Bela Pengadaan, yakni sejumlah 305.251 							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
3	<p>Output 3 Tersedia dan termanfaatkannya sistem informasi pengadaan barang/jasa konstruksi</p> <p>Indikator Tersedianya sistem informasi menyangkut penyedia, harga dan spesifikasi barang</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		N/A	N/A	25%	25%	25%	50%	50%	100%
		<p>Terjadi kemajuan signifikan pada periode B24 ini: berikut progres yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kementerian PUPR telah membangun Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) dan telah dimanfaatkan di 10 provinsi sejumlah minimal 30 paket dengan kategori hijau (penerapan selesai sebelum tanggal 31 Desember 2022 (hingga penetapan oleh PPK)), yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Sumatera Selatan (5 paket) Sumatera Utara (1 paket) Jawa Barat (3 paket) Kalimantan Timur (1 paket) Jawa Timur (6 paket) Jawa Tengah (3 paket) Kalimantan Selatan (2 paket) Aceh (4 paket) Sulawesi Selatan (3 paket) Papua (2 paket) 							
4	<p>Output 4 Tersedianya dan termanfaatkannya sistem informasi pengadaan alat kesehatan</p> <p>Indikator Tersedianya daftar informasi yang menyangkut penyedia, harga dan spesifikasi alat kesehatan*</p> <p><i>*Indikator ini mengalami penyesuaian pada B15 seiring terjadinya perubahan kebijakan di Kemenkes yang kembali menyediakan sistem e-katalog</i></p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		N/A	N/A	0%	0%	25%	75%	90%	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Nilai capaian output 4 pada Triwulan VIII (B24) bertambah signifikan menjadi 100%. Kemajuan ini hasil dari upaya Kemenkes mengelola kembali katalog sektoral dari sebelumnya katalog nasional di bawah pengelolaan LKPP. Dengan demikian, proses pengadaan alat kesehatan akan dioptimalkan melalui sistem e-katalog Terjadi optimalisasi pemanfaatan katalog di Kemenkes sejak dikelola sendiri. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021, alkes dan obat-obatan merupakan katalog nasional dengan jumlah produk yang ditransaksikan sejumlah 37 produk. Sementara pada tahun 2022, katalog sektoral telah menjadi pusat pengadaan alkes dan obat-obatan dengan jumlah produk tayang mencapai 90 ribuan 							
5	<p>Output 5 Pemanfaatan e-katalog</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		N/A	N/A	10,3%	13%	21,3%	34,1%	71,5%	90,7%

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
<p>5 Indikator</p> <p>a. Pembelian 5 komoditas baru pada katalog lokal 34 Provinsi</p> <p>b. Jumlah pembelian secara online (<i>purchase order</i>) pada katalog sektoral di 8 Kementerian/Lembaga</p> <p><i>Note:</i> Output 5 adalah penggabungan dua indikator lama, yakni katalog sektoral dan katalog lokal ke dalam 1 output dan mulai diberlakukan per periode B09. Dengan demikian nilai yang muncul pada B03 dan B06 lalu menjadi tidak relevan</p>	<p>Dari hasil monitoring pada 34 Provinsi dan 7 K/L pada periode TW VIII (B24) ini, berikut progres capaian yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator (a): Pemanfaatan e-katalog Lokal <ul style="list-style-type: none"> - 28 provinsi telah mencapai target pembelian minimal 5 komoditas baru yang tayang pada e-katalog tahun 2021-2022, yakni Sumut, Sumsel, Sumbar, Sulut, Sultra, Sulsel, Riau, NTT, NTB, Maluku, Lampung, Kepri, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Jatim, Jateng, Jabar, Jambi, Gorontalo, DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Bengkulu, Banten, Babel, Bali, Aceh - 6 provinsi sudah melakukan transaksi belanja namun belum mencapai 5 komoditas, yaitu: Kaltara, Sulteng, Sulbar, Maluku, Papua, Papua Barat • Pemanfaatan e-katalog sektoral (Pusat) <ul style="list-style-type: none"> - Dari target 8 K/L, 7 K/L telah menyediakan minimal 5 produk katalog dan telah melakukan transaksi belanja, yakni KemenPUPR Kemenkes, Kemenhub, Kemendikbud, Kementan, BNPB, dan Kemenhan - Polri pada tahun 2021 telah melakukan transaksi belanja pada 4 produk katalognya dengan jumlah sekitar 154 milyar, namun pada tahun 2022 belum terdapat penambahan produk dan transaksi pada katalog sektoral polri

6.

Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembinaan PNBPN dan Pendapatan Lainnya

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Tata kelola penerimaan negara pada PNBPN dan Cukai ditemukan banyak masalah

Pada saat ini penerimaan negara melalui PNBPN tidak optimal dikarenakan sejumlah masalah, mulai dari regulasi, mekanisme dan struktur pelaksana yang masih perlu dilakukan pembenahan tata kelola. Pembenahan tersebut dilakukan dengan memperbaiki cara menghitung, memungut, dan melaporkan pendapatan yang bersumber dari PNBPN. Oleh sebab itu diperlukannya pembahasan optimalisasi penerimaan negara melalui pembenahan pengelolaan PNBPN pada K/L tertentu dan PNBPN Migas. Dengan demikian akan tercipta: (a) satu data minerba antar K/L; (b) peningkatan Kepatuhan dan efektifitas pengawasan sektor Minerba; dan (c) optimalisasi penerimaan negara bukan pajak.

Adapun permasalahan penerimaan negara pada sektor cukai adalah *potential loss* penerimaan negara yang diakibatkan oleh manajemen yang salah dan adanya produk cukai ilegal. Cara pengelolaan yang belum optimal ditandai dengan regulasi yang tidak secara komprehensif dapat mengakomodasi variabel yang berkontribusi pada pendapatan cukai dan mekanisme perhitungan serta pemungutan yang lemah atau belum sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara.

Oleh karenanya melalui Aksi ini, diharapkan optimalisasi penerimaan negara dari PNBPN dan sektor cukai dapat tercapai.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	N/A	N/A	2,1	24,5	31,9	55,4	64,6	86,7

Dari hasil monitoring hingga Triwulan VIII (B24), tergambar bahwa realisasi capaian aksi **Pembinaan tata kelola penerimaan negara pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) dan Cukai** adalah **86,7%**. Secara kualitatif, nilai capaian ini mengalami kemajuan pada 4 output berikut: (a) Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi sub-sektor SDA (80%), (b) Optimalisasi Penerimaan Negara melalui peningkatan akuntabilitas sektor swasta, dengan indikator peningkatan akuntabilitas perhitungan PNBPN Migas (96%); (c) Optimalisasi penerimaan negara melalui perbaikan pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor (88,8%); dan (d) Memaksimalkan potensi cukai Hasil Tembakau (50%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala							
<p>1 Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi sub-sektor SDA</p> <p>Indikator</p> <p>a. Regulasi hasil penyesuaian untuk intensifikasi penerimaan negara dari royalti batubara dan Kompensasi Denda DMO untuk sub-sektor Batubara dan Emas tersedia; dan</p> <p>b. Proses layanan mulai dari permohonan, penetapan tarif, pembayaran sampai dengan pelaporan telah terintegrasi</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
	N/A	N/A	25%	25%	50%	62,5%	62,5%	80%
	<p>Berikut adalah deskripsi kemajuan yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target terhadap revisi terhadap regulasi PP 81/2018 telah tercapai dengan terbitnya PP 26/2022 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM. Kemenkeu juga sebelumnya telah menerbitkan PMK 214/2021 tentang Pengawasan PNBP Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/ Lembaga • PMK tersebut telah berkontribusi pada akselerasi dan penguatan pengawasan tata kelola batubara, terutama dengan lahirnya aplikasi SIMBARA yang dapat mengintegrasikan data dan proses bisnis batubara pada Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia • Terdapat 2 komoditas yang di kawal Stranas PK yaitu Emas (diganti Timah dan Nikel) dan Batubara. Hingga saat ini tata kelola data komoditas Batubara dan Timah sudah dilakukan melalui aplikasi Simbara. • Pengawasan melalui SIMBARA ini akan dilakukan secara menyeluruh, dalam rantai pengelolaan usaha, mulai dari dokumen, uang, barang, orang, dan jasa pengangkutan/transportasi. Kepatuhan atas ketentuan domestic market obligation (DMO) pun tak luput dari pengawasan SIMBARA • Terdapat 2 tahap fokus pengembangan: <ul style="list-style-type: none"> - Tahap I; fokus di validasi ekspor (dokumen LS untuk ekspor). Saat ini, Ditjen Anggaran telah menyampaikan rekomendasi dan pemanfaatan data SIMBARA tahap I kepada Ditjen Minerba - Tahap II; lingkup validasinya ditambah yang domestik (validasi NTPN pada pengajuan warta keberangkatan). Saat ini telah dilakukan implementasi SIMBARA tahap II namun berdasarkan data analitik SIMBARA, masih ditemukan penyalahgunaan terhadap Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), misalnya: <ul style="list-style-type: none"> ◦ NTPN-nya adalah domestik namun dalam praktiknya digunakan untuk ekspor NTPN tidak valid, ◦ NTPN jangka waktu penggunaannya lebih dari 2 bulan, ◦ NTPN yang terdaftar atas nama badan usaha A tapi digunakan oleh badan usaha B ◦ NTPN digunakan beberapa kali dari yang seharusnya 							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala																
<p>2 Output 2 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui peningkatan akuntabilitas sektor swasta</p> <p>Indikator Meningkatnya akuntabilitas perhitungan PNPB Migas dengan menurunkan diskrepansi dalam perhitungan penerimaan PNPB Migas. Dengan target dari 68 KKKS: 50% mencapai <i>maturity level V</i>; dan 50% mencapai <i>maturity level III</i></p> <p><i>Note</i> Berdasarkan masukan dari Tim Monitoring dan Evaluasi penerapan QA maka per periode B18 dilakukan penyesuaian metode penilaian, di mana tingkat kematangan KKKS dalam implementasi QA tidak dinilai berdasarkan jumlah KKKS yang mencapai level III-V namun berdasarkan jumlah kelompok aset yang telah dapat menyumbang PNPB yakni sebanyak 99 aset grup.</p> <p>Perubahan ini dilakukan karena masing-masing field memiliki karakteristik yang berbeda. Sampai akhir tahun 2022, telah dilakukan kurang lebih 173 kali proses evaluasi atas LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) internal masing-masing field oleh Tim Tim Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pedoman Sistem Jaminan Kuantitas (Quantity Assurance) pada Kegiatan Operasional Pemroduksian Minyak dan Gas Bumi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 156.K/HK.02/DJM/2021 pada tanggal 28 September 2021</p>	<table border="1" data-bbox="722 338 1420 465"> <thead> <tr> <th>B03</th> <th>B06</th> <th>B09</th> <th>B12</th> <th>B15</th> <th>B18</th> <th>B21</th> <th>B24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>12%</td> <td>16%</td> <td>55%</td> <td>76%</td> <td>96%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berikut catatan progres yang dapat disampaikan pada output ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan implementasi sistem <i>quantity assurance</i> (QA) pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (QA) telah dilakukan dari <i>batch</i> 1-2 pada tahun 2021 dan <i>batch</i> 3-5 pada tahun 2022 Sepanjang tahun 2021-2022, mulai dilakukan pendampingan proses adaptasi penerapan QA Berdasarkan hasil evaluasi sampai B24 ini, dari 99 kelompok aset (<i>asset group</i> atau <i>field</i>), berikut capaian tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) dalam implementasi QA: <ul style="list-style-type: none"> 95 <i>asset grup/field</i> (atau 96%) telah mencapai <i>maturity level 5</i> (M5) Hanya tersisa 4% yang berada di bawah <i>maturity level 3</i> Terdapat 4 KKKS yang tidak dapat mengimplementasikan QA karena sudah tidak berproduksi yaitu: EMP Gebang, Sumatera Persada Energi, EMP Tonga dan Camar Resources Canada Terdapat 3 KKKS yang menyampaikan surat penundaan implementasi QA di tahun 2022 yaitu Perusda Benuo Taka, Star Energy dan Energy Equity Epic Sengkang Pada tanggal 31 Desember 2021, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 756/KEP/BSN/12/2021 (SNI) 9040:2021 tentang Sistem Jaminan Kuantitas untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas sub-Bidang Migas-Persyaratan atau disingkat SNI Quantity Assurance (QA) Migas Adaptasi SNI ini dilakukan selama tahun 2022 melalui pendampingan oleh Tim Evaluasi Penerapan SNI 9040:2021 tersebut. Pada akhir tahun 2022, telah disiapkan Rancangan Peraturan Menteri ESDM yang akan mewajibkan semua KKKS menerapkan SNI 9040:2021 Dalam rangka penerapan SNI 9040 :2021 secara <i>mandatory</i>, sejak September 2022 lalu mulai juga dipersiapkan beberapa kelembagaan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> LDP (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan); berperan mengeluarkan pernyataan <i>certificate of training completion for certain competency unit & element (transcript)</i> LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi); berperan untuk mengeluarkan pernyataan: <i>certificate of examination for certain competency scheme with score and passing grade</i> 	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	0%	0%	0%	12%	16%	55%	76%	96%
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24										
0%	0%	0%	12%	16%	55%	76%	96%										

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala																
<p>2 Output 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LSPRO (Lembaga Sertifikasi/Standarisasi Produk); berperan mengeluarkan pernyataan <i>certificate of examination for system product and/or service compliance that adhere to certain standard</i> i.e. SNI 9040:2021 - LVV (Lembaga Verifikasi dan Validasi); berperan mengeluarkan pernyataan: <i>statement of qualification for quantity information in the specific time period with certain bias, noise and associated risks/materiality</i> 																
<p>3 Output 3 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>*Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A pada 20 Kab kota di Kabupaten Blitar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Mimika, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Tangerang, Kota Banjarmasin, Kota Depok, Kota Lubuklinggau, Kota Makassar, Kota Padang, Kota Palangkaraya, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Pontianak, dan Kabupaten Wonogiri</p> <p><i>*Rumusan indikator ini merupakan salah satu indikator yang baru diberlakukan per periode B09</i></p>	<table border="1" data-bbox="724 707 1422 831"> <thead> <tr> <th>B03</th> <th>B06</th> <th>B09</th> <th>B12</th> <th>B15</th> <th>B18</th> <th>B21</th> <th>B24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>31%</td> <td>55%</td> <td>65%</td> <td>88,8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai capaian output 2 pada Triwulan VIII (B24) terjadi peningkatan. Berikut progres yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari 20 pemda <i>piloting</i>, 16 Pemda (Kabupaten wonogiri, Kota Pontianak, Kota Pekanbaru, Kota Palembang, Kota Palangkaraya, Kota Makassar, Kota Depok, Kota Banjarmasin, Kota Tangerang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Semarang, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blitar) telah memenuhi target output ini karena telah: <ol style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan Perda/Perbup/Perwali yang telah disesuaikan dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat 19/2021 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; b. Mendapatkan akreditasi A; c. Memanfaatkan transaksi elektronik untuk pembayaran retribusi • 3 pemda telah menerbitkan peraturan daerah/bupati/walikota dan telah menerapkan pembayaran elektronik, namun belum terakreditasi A, yaitu: Kota Padang, Kota Lubuk Linggau, Kab Mimika. Tahap selanjutnya menunggu pelaksanaan akreditasi oleh pihak Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Darat) • 1 pemda lainnya (kabupaten Kampar) masih berjalan lambat, sampai periode B24 baru menerbitkan peraturan bupati/walikota, namun belum memberlakukan pembayaran retribusi secara elektronik sehingga masih belum terakreditasi A 	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	N/A	N/A	0%	25%	31%	55%	65%	88,8%
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24										
N/A	N/A	0%	25%	31%	55%	65%	88,8%										
<p>4 Output 4 Memaksimalkan potensi cukai Hasil Tembakau</p>	<table border="1" data-bbox="724 1850 1422 1973"> <thead> <tr> <th>B03</th> <th>B06</th> <th>B09</th> <th>B12</th> <th>B15</th> <th>B18</th> <th>B21</th> <th>B24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	0%	0%	0%	25%	25%	50%	50%	50%
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24										
0%	0%	0%	25%	25%	50%	50%	50%										

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
<p>4 Indikator Memaksimalkan potensi cukai dari produsen rokok (HT)</p> <p>Dengan target penilaian berikut:</p> <p>a. Tersedianya Pembaharuan <i>Roadmap</i> Komprehensif (2022-2026) yang meliputi kebijakan untuk optimalisasi penerimaan negara, pengendalian konsumsi, keberlangsungan tenaga kerja dan peredaran produk cukai ilegal (75%);</p> <p>b. Revisi PMK 146 tahun 2017 terkait dengan struktur tarif (25%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait penyesuaian regulasi tentang struktur tarif, sudah terbit: (a) PMK 192 tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret dan Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris; (b) PMK 193 tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya • Terkait penyusunan roadmap yang menjadi target utama dari output ini, saat ini masih dalam tahap draf RPerpres dengan judul Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau Tahun 2023 – 2027. Rapat rapat pembahasan pasal per pasal masih terus dilakukan • <i>Roadmap</i> ini diharapkan dapat menjadi arah kebijakan dan strategi terkait aspek keuangan, industri, pertanian, ketenagakerjaan, dan kesehatan atau yang berhubungan dengan aspek-aspek berikut yakni penerimaan negara, pengendalian konsumsi, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian peredaran produk cukai ilegal

7.

Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektorial Berbasis NIK

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Inefisiensi anggaran karena data penerima bantuan sosial yang belum akurat dan penerimaan pajak yang belum optimal

Pandemi *Corona Virus* 2019 membuat Pemerintah menyelenggarakan berbagai program bantuan untuk mengatasi dampak dari situasi ini. Sejumlah program bantuan atau subsidi baru telah diselenggarakan oleh berbagai K/L dengan mekanisme pendataan dan penyaluran yang berbeda-beda. Hal ini membuat tumpang tindih data penerima bantuan tidak dapat dihindari.

Aksi ini mendorong efektivitas dan efisiensi pendataan dan penyaluran program bantuan dan subsidi dengan memastikan integritas data penerima. NIK dijadikan *primary key* dalam pengelolaan data termasuk didalamnya pepadanan, pertukaran dan integrasi data untuk meningkatkan akurasi administratif data penerima bantuan sosial.

Selain efisiensi anggaran, Stranas PK juga ingin mendorong optimalisasi penerimaan pajak melalui integrasi data keuangan. Hal ini akan dilakukan dengan mendorong berbagi pakai data dalam menganalisa sasaran ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	15,5	17,3	22,4	24,7	56,2	59	61,9	66,1

Dari hasil monitoring hingga triwulan VIII (B24), tergambar bahwa realisasi capaian aksi **Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektorial Berbasis NIK** adalah **66,1%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi pada dua output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Dua output tersebut adalah (a) Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (64,5%), (b) Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak (72%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		21%	25,7%	46%	51,3%	51,7%	55,3%	59%	64,5%

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
<p>1 *Indikator</p> <p>a. Jumlah ketepatan DTKS dan data penerima bansos Kemensos sesuai data kependudukan dan sesuai kriteria kemiskinan</p> <p>b. Jumlah ketepatan penerima BPUM tahun 2021 sesuai dengan data kependudukan</p> <p>c. Jumlah ketepatan penyaluran subsidi pupuk menggunakan kartu tani atau metode verifikasi sesuai data kependudukan</p> <p>d. Jumlah ketepatan PBI JKN sesuai data kependudukan dan sesuai DTKS</p> <p>e. Jumlah ketepatan penerima subsidi listrik dan elpiji sesuai dengan data kependudukan dan sesuai DTKS</p> <p>f. Integrasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan: Data penerima bansos, data penerima vaksin, data PNS, data kepemilikan kendaraan dan data kepemilikan properti termutakhir</p>	<p>Nilai capaian output 1 pada Triwulan VIII (B24) adalah 59,0% atau meningkat tipis dari periode sebelumnya. Berikut gambaran capaian yang telah dilakukan:</p> <p>1. Terkait ketepatan DTKS dan data penerima bansos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DTKS telah diperbaiki akurasi sejak 2021 dengan memastikan setiap DTKS memiliki NIK yang divalidasi oleh dukcapil Kemendagri dan terus dimutakhirkan setiap bulan. Berikut perkembangan pemutakhiran hingga data hingga periode B24: <ul style="list-style-type: none"> - DTKS 14 September : jumlah DTKS padan NIK adalah 147.100.916 dari 148.609.625 atau sekitar 98,98% - DTKS 19 Oktober : jumlah DTKS padan NIK adalah 147.179.435 dari 148.688.138 atau sekitar 98,99% - DTKS 15 November : jumlah DTKS padan NIK adalah 147.128.375 dari 148.638.683 atau sekitar 98,99% <p>2. Terkait ketepatan penerima BPUM sesuai dengan data kependudukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran BPUM sudah mencapai 100%. Data penerima BPUM adalah 12,8 juta (data B09) dan sebanyak 12,7 juta (99,4%) sudah disalurkan sampai periode B12 • Indikator output ini dianggap selesai di tahun 2021. Diharapkan Kemenkop UKM dapat mempertahankan kualitas data penerima bantuan bila BPUM diadakan kembali di tahun 2022 <p>3. Terkait ketepatan penyaluran subsidi pupuk menggunakan kartu tani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi belum optimal pasalnya dari 15,5 juta kartu tercetak hanya 9.8 juta kartu terdistribusi, dan petani yang memanfaatkan kartu tani tersebut sebanyak 2.943.478 (30%) di tahun 2021 • Pada tahun 2022, jumlah pemanfaatan kartu tani bertambah sebanyak 2.868.358. Dengan demikian total jumlah pemanfaatan kartu tani sepanjang periode 2021-2022 adalah 5.811.836 atau sekitar 60 persen dari total kartu yang terdistribusi • Untuk menggenjot pemanfaatan subsidi pupuk, Kementan juga mengembangkan mekanisme T-PUBERS untuk melakukan verifikasi penebusan menggunakan NIK. Pada tahun 2021, sebanyak 9.714.116 petani melakukan penebusan dengan mekanisme verifikasi T-Pubers. Sehingga total sebanyak 15.525.952 (90%) petani telah melakukan penebusan pupuk dari total data petani 17.228.855 tahun 2021 <p>4. Terkait ketepatan penerima subsidi listrik dan elpiji sesuai dengan data kependudukan dan sesuai DTKS, dari 32.725.036 data penerima subsidi listrik yang telah disinkronkan dengan DTKS, hasilnya sebagai berikut:</p>

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
<p>1 Output 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 7.726.847 data NIK sama; NAMA sama • 1.185.268 data NIK sama; kemiripan NAMA \geq 79% • 1.038.657 data orang ter-<i>flag</i> meninggal • 9.384.287 data NIK <i>invalid</i> • 5.464.665 data tidak padan DTKS • 1.372.857 data ganda tidak terpilih • 6.552.455 data NIK sama namun kemiripan nama dibawah 79% <p>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah persentase data NIK invalid, ganda tidak terpilih, dan tidak padan DTKS = 49,6% • Jumlah persentase data NIK sama, kemiripan nama $<$ 79% = 20% • Sehingga data yang dapat dikategorikan padan NIK dan DTKS (termasuk meninggal) = 30,4% <p>5. Terkait ketepatan PBI JKN sesuai data kependudukan dan sesuai DTKS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejak Oktober 2021, regulasi terkait penggunaan DTKS sebagai basis data PBI JKN telah diterapkan oleh Kemensos, BPJS Kesehatan, dan Kemenkes • PBI JKN sudah 100% padan DTKS. Berdasarkan SK 146/HUK/2021 tentang penetapan PBI JKN November 2021 maka data PBI JKN terdiri dari 84.083.895 jiwa (dari DTKS padan NIK) dan 51.494 Bayi Baru Lahir belum ber NIK <p>6. Terkait integrasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan: (a) data kepemilikan kendaraan, (b) data penerima vaksin, (c) data penerima bansos, (d) data PNS, (e) data data kepemilikan properti termutakhir, berikut progres yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait data kepemilikan kendaraan; Divisi TI Polri telah memberikan data balikan dengan jumlah data 2.520.227 NIK, namun data balikan dengan tres id dan nomor STNK, tidak disertai flag jenis kendaraan. Berdasarkan data korlantas pada tahun 2021-2022 terdapat lebih dari 2 juta data laporan BPKP kendaraan baru • Terkait data penerima vaksin; pengiriman data balikan dari Kemenkes ke dukcapil dilakukan secara rutin (per triwulan). Untuk tahun 2022, data Januari-Maret; April-Juni; Juli-Agustus telah dikirimkan Kemenkes ke dukcapil Kemendagri. Dukcapil Kemendagri baru dapat melakukan sinkronisasi data hingga bulan April 2022 saja. Data LAMPID (lahir-mati-pindah-datang) penerima vaksin yang telah disinkronkan datanya belum mengalir dari dukcapil ke Kemenkes

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
<p>1 Output 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait data penerima bansos: <i>data by name by address</i> (BNBA) dari DTKS Juni 2022 (semester I) telah dikirimkan oleh Kemensos dan telah diterapkan pada aplikasi monitoring transaksi milik dukcapil • Terkait data PNS; data PNS tahun 2021 telah dilakukan sinkronisasi. Untuk data tahun 2022 data balikan semester I dan II tahun 2022 telah dikirimkan BKN ke dukcapil Kemendagri, namun belum ada laporan dilakukannya sinkronisasi • Terkait data kepemilikan properti; pada tahun 2021 telah dilakukan pengiriman data balikan dan sinkronisasi pada data kependudukan. Untuk periode tahun 2022, Kementerian ATR/BPN telah menyampaikan data balikan ke dukcapil namun belum ada laporan untuk sinkronisasi data

<p>2 Output 2 Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak</p> <p>Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah wajib pajak hasil analisa integrasi data pelayanan publik berbasis NIK Jumlah penerimaan pajak hasil analisa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak <p>Dengan adanya perpres penggunaan NIK dan/atau NPWP pada pelayanan publik serta UU HPP telah diatur penggunaan NIK sebagai <i>key element</i> dalam pendataan dan berbagi pakai data serta penghimpunan data untuk analisa data perpajakan, maka target2 pada output ini tidak perlu lagi dilaporkan pada periode berikutnya</p>	<table border="1" data-bbox="722 880 1418 1003"> <thead> <tr> <th>B03</th> <th>B06</th> <th>B09</th> <th>B12</th> <th>B15</th> <th>B18</th> <th>B21</th> <th>B24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>2,7%</td> <td>2,7%</td> <td>72%</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2021, Stranas PK mengawal berbagi pakai data Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain (ILAP) prioritas berbasis NIK. Data-data yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain Data Kependudukan, data kepemilikan tanah, data kendaraan dan data imigrasi, badan hukum dan data <i>beneficial ownership</i> (BO) dengan hasil sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Data imigrasi, badan hukum dan BO telah dibagikan oleh Kementerian Hukum dan HAM - Data kepemilikan tanah telah dibagikan oleh Kementerian ATR BPN - Data kendaraan belum bisa didapatkan dari Kepolisian RI karena membutuhkan payung hukum yang dibutuhkan oleh Polri. DJP mendapatkan data kendaraan dari Pemerintah Provinsi - Data Kependudukan bisa didapatkan dari Kementerian Dalam Negeri • Hasil pengolahan data-data dari ILAP adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Sampai Desember 2021, total Data Sasaran Ekstensifikasi hasil pengolahan data dari berbagai K/L adalah 193.435 - 85.312 data selesai ditindaklanjuti dengan kesimpulan 15.565 menjadi wajib pajak baru dan 63.680 dinyatakan tidak diterbitkan NPWP 	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	0%	0%	2,7%	2,7%	72%	N/A	N/A	N/A
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24										
0%	0%	2,7%	2,7%	72%	N/A	N/A	N/A										

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
2 Output 2	<ul style="list-style-type: none">• Pada September 2021 telah diterbitkan Perpres terkait pencantuman dan pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam pelayanan publik. Selain itu pada November 2021 telah diterbitkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah mengatur penggunaan NIK sebagai key element dalam pendataan dan berbagi pakai data serta penghimpunan data untuk analisa data perpajakan• Dengan aturan itu maka mekanisme berbagi pakai data telah memiliki dasar hukum yang mengikat bagi Kementerian/Lembaga sehingga sejak tahun 2022, output ini tidak lagi dikawal Stranas PK



FOKUS 3 : PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI

8. Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Tidak ada kepastian waktu dan biaya layanan

Kawasan pelabuhan yang merupakan sentra pertukaran dan mobilisasi logistik dan orang dianggap rawan akan praktik korupsi. Sebagai pintu gerbang (*gateway*) suatu negara atau daerah, kawasan ini dianggap belum menerapkan tata kelola pelayanan yang bersih dan berintegritas.

Birokrasi pelayanan pelabuhan kita masih rumit dan panjang karena melibatkan unit-unit layanan dari banyak *stakeholders*, swasta dan pemerintah, yang tidak terintegrasi sehingga menimbulkan biaya logistik yang mahal serta waktu layanan yang tidak pasti.

Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan layanan pelabuhan dengan menyederhanakan proses bisnis sehingga dapat memberi kepastian waktu layanan dan mengurangi tingginya biaya logistik di pelabuhan saat ini.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	N/A	N/A	26,9	33,8	48,3	56,5	69,5	90,8

Dari hasil monitoring hingga triwulan VIII (B24), tergambar bahwa realisasi capaian **aksi Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan** adalah **90,8%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada lima output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Lima output tersebut adalah (a) Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antar kewenangan pusat dan daerah (50%), (b) Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui (85%), (c) Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK (100%), (d) Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem (91,2%), dan (e) Perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan (82,5%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	<p>Output 1 Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah</p> <p>Indikator Terbitnya regulasi tentang layanan jasa kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan Pusat dan Daerah</p> <p><i>Note:</i> Terdapat tiga aspek yang menjadi pertimbangan penilaian: a. Jika draf atau rancangan final sudah tersedia maka dinilai 25%; b. Jika regulasinya sudah ditetapkan maka dinilai 50% c. Regulasi telah tersosialisasikan 25%</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		N/A	N/A	0%	25%	50%	50%	50%	50%
		<p>Hingga periode B24 berakhir, nilai capaian output ini masih sama dengan capaian pada periode B15. Berikut catatan progres yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regulasi perbaikan layanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan Batam yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah, seharusnya sudah diterbitkan pada akhir tahun 2022 namun hingga periode B24 berakhir, Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Kementerian yaitu Kemenhub, Kemenkeu, Kemendagri tersebut masih belum ditandatangani. Dengan demikian upaya pemisahan kewenangan antara regulator dan operator di BP Batam belum tercapai. Berikut materi pokok draf SEB tersebut: <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai dengan hierarki kepelabuhanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Kewenangan pemerintah daerah, termasuk kewenangan provinsi untuk pengelolaan/ pemanfaatan/penggunaan ruang laut dalam batas 12 (dua belas) mil, yang tidak diikuti dengan kewenangan pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam UU HKPD, tidak dapat dikenakan pungutan Kementerian Perhubungan melakukan percepatan penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumentasi (P3D) Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Pelabuhan Pengumpulan Lokal sesuai dengan amanat UU Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kesiapan masing-masing pemerintah daerah Surat Edaran Bersama ini jika ditetapkan maka akan berlaku umum untuk seluruh pelabuhan di daerah, tidak hanya pelabuhan Batam. Dengan demikian pungutan ganda jasa kepelabuhanan diharapkan tidak akan terjadi lagi 							
2	<p>Output 2 Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui</p> <p>Indikator Terbitnya regulasi tentang tata kelola kelembagaan dan tarif jasa TKBM</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		N/A	N/A	0%	50%	75%	85%	85%	85%
		<p>Hingga periode B24 berakhir, nilai capaian output ini masih sama dengan capaian pada periode B18. Berikut catatan progres yang dapat disampaikan:</p>							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala																
<p>2 Output 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi pada bulan Juni 2022, namun demikian, perlu disampaikan bahwa Penataan TKBM dalam aksi Stranas PK bukan dimaksudkan untuk menghilangkan peran koperasi dalam aktivitas bongkar muat di pelabuhan dan menghilangkan keberadaan TKBM, tetapi justru bertujuan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, termasuk peningkatan perlindungan terhadap TKBM • Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Perhubungan secara terpisah menyusun kebijakan terkait perbaikan tata kelola TKBM sebagai pengganti SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk peningkatan perlindungan TKBM, Kementerian Ketenagakerjaan segera memfinalisasi draf rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang muatan materinya antara lain mengatur perlindungan dan hubungan kerja antara pemberi kerja bongkar muat dengan para TKBM b. Kementerian Koperasi dan UKM akan menyiapkan skema pemberdayaan koperasi dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat sesuai ketentuan PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan menjaga keselarasannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 17 tahun 2008 dan PP No 31 Tahun 2021 c. Kementerian Perhubungan mengkaji dan menyesuaikan regulasi yang saat ini berlaku sehingga memberikan ruang bagi badan usaha, termasuk koperasi untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat di pelabuhan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No 17 tahun 2008 dan PP No 31 Tahun 2021 • Walaupun SKB sebelumnya telah dicabut namun hingga periode B24 ini, kebijakan baru pengganti SKB tersebut belum ditetapkan. Konsekuensinya, perbaikan pengelolaan TKBM belum terimplementasi di lapangan 																
<p>3 Output 3 Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK</p> <p>Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersediannya Layanan SSm Pengangkut b. Tersediannya Layanan SSm <i>Quarantine Custom</i> c. Tersedianya layanan <i>autogate system</i> d. Tersedianya layanan DO <i>Online</i> 	<table border="1" data-bbox="724 1608 1422 1733"> <thead> <tr> <th>B03</th> <th>B06</th> <th>B09</th> <th>B12</th> <th>B15</th> <th>B18</th> <th>B21</th> <th>B24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>44%</td> <td>52,7%</td> <td>64,3%</td> <td>71,7%</td> <td>83,4%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hingga periode B24 berakhir, nilai capaian output ini terpenuhi dengan baik. Walaupun masih ada beberapa catatan penyempurnaan pada beberapa layanan. Berikut catatan progres yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hampir seluruh layanan sudah tersedia dengan progres capaian berikut: <ul style="list-style-type: none"> - SSm Pengangkut; untuk Kedatangan sudah tersedia, Keberangkatan dan Domestik masih <i>in progress</i> 	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	N/A	N/A	44%	52,7%	64,3%	71,7%	83,4%	100%
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24										
N/A	N/A	44%	52,7%	64,3%	71,7%	83,4%	100%										

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala																
<p>3 Indikator</p> <p>e. Tersedianya layanan <i>SP2 Online</i> f. Tersedianya layanan <i>vessel domestik</i> g. Tersedianya layanan <i>trucking</i> h. Tersedianya layanan <i>payment</i> dengan <i>single billing</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - SSm QC; Impor dan Ekspor sudah tersedia - <i>Gate system</i>; sudah tersedia - <i>DO Online</i>; sudah tersedia - <i>SP2 Online</i>; sudah tersedia - <i>Trucking</i>: STID sudah tersedia, TBS masih <i>in progres</i> - <i>Vessel domestik</i>; sudah tersedia - <i>Single billing</i> PNBP; sudah tersedia 																
<p>4 Output 4</p> <p>Diterapkannya pelayanan kepela- buhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem</p> <p>Indikator</p> <p>a. Digunakannya sistem aplikasi prasyarat SSm Pengangkut di 10 Pelabuhan b. Digunakannya sistem layanan SSm QC di 10 Pelabuhan c. Digunakannya sistem layanan <i>autogate</i> di 10 Pelabuhan d. Digunakannya sistem layanan <i>DO Online</i> di 10 Pelabuhan e. Digunakannya sistem layanan <i>SP2 Online</i> di 10 Pelabuhan f. Digunakannya sistem layanan <i>vessel domestik</i> di 10 Pelabuhan g. Digunakannya sistem layanan <i>trucking</i> di 10 Pelabuhan h. Digunakannya sistem layanan <i>payment</i> dengan <i>single billing</i> di 10 Pelabuhan</p>	<table border="1" data-bbox="724 607 1422 730"> <thead> <tr> <th>B03</th> <th>B06</th> <th>B09</th> <th>B12</th> <th>B15</th> <th>B18</th> <th>B21</th> <th>B24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>30,7%</td> <td>39,3%</td> <td>47,7%</td> <td>48,3%</td> <td>70,8%</td> <td>91,2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hingga periode B24 berakhir, nilai capaian output 4 mengalami kemajuan cukup signifikan. Berikut catatan kemajuan yang dapat disampaikan:</p> <p>a. Sistem layanan SSm Pengangkut sudah diimplementasikan secara penuh di 14 pelabuhan, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Batam, Balikpapan, Merak, Samarinda, Kendari, Dumai, Palembang, Pontianak, Lampung</p> <p>b. Sistem layanan SSm QC sudah diimplementasikan secara penuh di 12 dari 14 pelabuhan, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Balikpapan, Merak, Samarinda, Kendari, Palembang, Pontianak, Lampung</p> <p>c. Layanan <i>DO Online</i> dengan SLA telah diimplementasikan secara penuh pada 6 dari 14 Pelabuhan, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Batam</p> <p>d. Layanan <i>SP2 Online</i> dengan SLA telah diimplementasikan secara penuh pada 10 dari 14 Pelabuhan, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Batam, Samarinda, Palembang, Pontianak, Lampung</p> <p>e. Layanan <i>Gate System</i> telah diimplementasikan secara penuh di 14 pelabuhan, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Batam, Balikpapan, Merak, Samarinda, Kendari, Dumai, Palembang, Pontianak, Lampung</p> <p>f. Layanan <i>Vessel Domestik</i> telah diimplementasikan secara penuh pada 11 dari 14 Pelabuhan, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Balikpapan, Merak, Samarinda, Palembang, Pontianak, Lampung</p> <p>g. Layanan <i>Trucking</i>, untuk STID atau single truck identification data telah diimplementasikan di 11 pelabuhan, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Batam, Merak, Samarinda, Kendari, Pontianak, Lampung. Sementara untuk TBS atau terminal <i>booking system</i> baru dalam tahap rencana implementasi</p> <p>h. Layanan pembayaran PNBP dengan <i>single billing</i> sudah tersedia dan telah diimplementasikan di 6 pelabuhan</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	N/A	N/A	30,7%	39,3%	47,7%	48,3%	70,8%	91,2%
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24										
N/A	N/A	30,7%	39,3%	47,7%	48,3%	70,8%	91,2%										

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
5	<p>Output 5 Perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan</p> <p>Indikator</p> <p>a. Menguatnya pengawasan terhadap layanan jasa kepelabuhanan melalui pembentukan mekanisme koordinasi dan komunikasi CIQP</p> <p>b. Terimplementasinya Badan Karantina Indonesia (Kementan, KKP, dan KLHK) sebagai satu sistem tunggal yang menyatukan fungsi karantina dan pengawasan mutu</p> <p>c. Terwujudnya satu sistem layanan operator pelabuhan dengan pengawasan melekat dalam sistem layanan</p> <p>d. Tersedianya standar layanan jasa kepelabuhanan non-pemerintah oleh otoritas/penyelenggara pelabuhan</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		N/A	N/A	N/A	N/A	3,2%	23%	36,5%	82,5%
		<p>Hingga periode B24 berakhir, nilai capaian output 5 mengalami kemajuan cukup signifikan. Berikut catatan kemajuan yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait indikator (a); empat Ditjen kementerian, yakni (1) Ditjen Perhubungan Laut-Kemenhub; (2) Ditjen Bea Cukai-Kemenkeu; (3) Ditjen Imigrasi-KemenkumHAM; (4) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Kemenkes. PKS ini ditandatangani pada bulan Juli 2022. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi di antara 4 pihak meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan - Pelayanan kegiatan kepabeanaan di pelabuhan - Pelayanan kegiatan keimigrasian di pelabuhan - Pelayanan kegiatan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan • Terkait indikator (b); hingga Desember 2022, Rancangan Perpres Badan Karantina Nasional dan Rancangan Peraturan Pemerintah telah melewati tahap harmonisasi di KemenkumHAM dan saat ini telah disampaikan ke Presiden untuk proses penetapan • Terkait indikator (c), sudah ada kemajuan dengan lahirnya sistem layanan kapal terpadu (PINISI) dan saat ini sedang berproses pengintegrasian, di mana INAPORTNET dijadikan sebagai katalisator sistem layanan pemerintahan terhadap sistem-sistem layanan yang masih terpisah-pisah seperti MOS, VASA, VESPA, dan sistem BP Batam. Hingga periode B24, sistem tersebut telah diimplementasikan di 14 pelabuhan • Terkait indikator (d), saat ini telah dilakukan kajian oleh Kemenkeu tentang relevansi dan signifikansi PPJK, terutama dari sisi regulasi. Namun masih perlu dilakukan pendalaman untuk identifikasi dan analisis tersebut dari perspektif praktik di lapangan, apakah keberadaan PPJK berkontribusi negatif pada biaya dan waktu layanan kepabeanaan 							

9.

Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Program Pembangunan

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Independensi dan kinerja APIP masih lemah

Penguatan peran APIP telah lama didorong oleh berbagai pihak. Salah satu momentum penguatannya adalah pada saat diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Namun demikian, kerangka regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat meningkatkan independensi dan kinerja APIP.

Terdapat 4 aspek mendasar yang perlu didorong dalam upaya penguatan fungsi dan peran APIP, antara lain aspek kuantitas dan kualitas SDM, aspek independensi dalam hal kelembagaan dan kewenangan, aspek anggaran, serta aspek peningkatan proses bisnis.

Aksi ini bertujuan untuk memperkuat APIP dalam 2 aspek utama, yaitu kuantitas sumber daya manusia dan independensi kelembagaan. Dengan demikian, penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan independensi APIP dalam melakukan tugas pengawasan.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	1,3	3	11,3	22,5	39,5	56,8	57,5	58,8

Dari hasil monitoring hingga triwulan VIII (B24), tergambar bahwa realisasi capaian **aksi Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pembangunan** adalah **58,8%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada dua output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Dua output tersebut adalah (a) Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (17,5%), (b) Penguatan independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk peningkatan kelas jabatan fungsional APIP (100%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	Output 1 Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		2,67%	3,67%	4%	10%	11,5%	13,5%	15%	17,5%

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala																
<p>1 Indikator</p> <p>a. Jumlah SDM PPUPD yang terpenuhi sesuai usulan</p> <p>b. Jumlah SDM Auditor yang terpenuhi sesuai usulan</p>	<p>Hingga periode B24 berakhir, progres capaian pada output ini belum mengalami perubahan signifikan, menunjukkan bahwa seluruh indikator pada output 1 masih berjalan lambat, berikut catatannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait indikator jumlah SDM PPUPD, belum ada progres signifikan karena belum ada usulan jumlah kebutuhan pemenuhan SDM APIP (PPUPD) yang akan diisi. Namun terdapat beberapa langkah yang telah dilakukan Kemendagri, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan beberapa surat kepada K/L/D pada bulan Maret-Mei 2022 terkait: penyusunan kebutuhan JFPPUPD; pelaksanaan uji kompetensi perpindahan jabatan JF-PPUPD - Itjen kemendagri telah menyusun estimasi perkiraan kebutuhan JFPPUPD secara nasional, yakni sejumlah 24.000 - Untuk pemenuhan kebutuhan tahap awal, telah diusulkan untuk fokus pada sejumlah daerah prioritas dari semula 117 pmda menjadi 97 pmda • Terkait indikator jumlah kebutuhan JF Auditor, dapat disampaikan beberapa hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Penghitungan kebutuhan SDM Auditor belum ada langkah konkrit yang dilaporkan BPKP. Menurut Pusat Pembinaan (Pusbin) JFA BPKP, penentuan prioritas pemenuhan JFA bukan menjadikan tanggungjawab dari Pusbin JFA namun harus berasal dari kajian, permintaan, arahan dari satker, unit satuan kerja, dan institusi lain di luar Pusbin JFA. Namun demikian Stranas PK berharap bahwa BPKP dapat mengambil inisiatif untuk melakukan pemetaan kondisi saat ini dan kondisi ideal - Terkait revisi regulasi JFA, KemenPANRB telah menetapkan PermenPANRB No. 48/2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor 																
<p>2 Output 2</p> <p>Penguatan independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk peningkatan kelas jabatan fungsional APIP</p> <p>Indikator</p> <p>a. Penetapan kelas jabatan fungsional PPUPD</p> <p>b. Penetapan kelas jabatan fungsional auditor</p>	<table border="1" data-bbox="724 1480 1422 1608"> <thead> <tr> <th>B03</th> <th>B06</th> <th>B09</th> <th>B12</th> <th>B15</th> <th>B18</th> <th>B21</th> <th>B24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,83%</td> <td>2,17%</td> <td>18,5%</td> <td>35%</td> <td>67,5%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai capaian output 2 pada Triwulan VIII (B24) telah terpenuhi dengan baik sejak periode B18. Namun masih perlu tetap dimonitor penerapan aturan baru ini di lapangan. Berikut rincian capaiannya:</p> <p>a. Terkait kelas jabatan PPUPD, KemenPANRB telah menetapkan melalui surat Menteri PANRB No. B/644/M.SM.04.00/2022 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada tanggal 13 Mei 2022. Selanjutnya Kemendagri menyampaikan kepada seluruh instansi Pengguna PPUPD terkait penetapan kelas jabatan fungsional melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29/2787/SJ tanggal 24 Mei 2022</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	0,83%	2,17%	18,5%	35%	67,5%	100%	100%	100%
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24										
0,83%	2,17%	18,5%	35%	67,5%	100%	100%	100%										

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
2 Output 2	b. Terkait kelas jabatan Auditor, KemenPANRB telah menetapkan Kelas Jabatan bagi JF Auditor melalui Surat Nomor B/25/M.SM.04.00/2022. Selanjutnya BPKP telah meneruskan ke seluruh APIP mengenai penetapan kelas jabatan tersebut melalui surat Kepala BPKP Nomor S-81/K/JF/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Auditor

10. Percepatan Pembangunan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintah belum dilakukan secara terpadu

Saat ini, hampir seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah telah memanfaatkan teknologi informasi (TI) dalam menjalankan tata kelola dan sistem pemerintahan. Namun, penggunaan TI tersebut cenderung parsial dan berbasis ego-sektoral. Dalam layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan, terdapat beragam aplikasi yang digunakan, di mana masing-masing sistem tidak terhubung, tidak terstandar, rentan keamanan, dan belum didukung oleh SDM yang memadai.

Hal ini justru mengakibatkan penerapan TI menjadi tidak efisien dan tidak efektif dalam layanan dan manajemen pemerintahan.

Dengan demikian, aksi ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang cepat, responsif, profesional, dan transparan. Juga akan mempermudah pemerintah merumuskan kebijakan yang cepat dan tepat berbasis data.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	12,2	20,7	21,8	28,4	28,4	36,8	40,5	54,8

Dari hasil monitoring hingga triwulan VIII (B24), tergambar bahwa realisasi capaian **aksi Percepatan pembangunan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)** adalah **54,8%**. Nilai 54,8% ini adalah hasil kontribusi dari capaian periode B03-B18 yang tersebar pada 4 output berikut: (a) Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional (68,2%), (b) Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional (52,5%), (c) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR! (65%), dan (d) Meningkatnya penggunaan aplikasi umum oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (25%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	Output 1 Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		13,6%	31,8%	31,8%	45,5%	45,5%	47,7%	50,0%	68,2%

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala																
<p>1 Indikator</p> <p>a. Ditetapkannya Perpres tentang Arsitektur SPBE</p> <p>b. Jumlah K/L/D yang memiliki Arsitektur SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional - 10 K/L (B24) - 50 Pemda (B24)</p> <p><i>Note</i> Kendala pada penetapan Arsitektur SPBE membuat sebagian besar output sulit terpenuhi. Oleh karenanya Stranas PK melakukan beberapa penyesuaian, termasuk penambahan output baru terkait peningkatan penetapan dan penggunaan aplikasi umum oleh K/L/D dan output terkait pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh K/L/D. Penambahan ini mengakibatkan terjadi penyesuaian nilai secara otomatis pada level aksi, sementara pada level output dan indikator nilainya tetap sama</p>	<p>Hingga periode B24 berakhir, nilai capaian output 1 naik cukup signifikan menjadi 68,2%. Capaian ini terjadi pada indikator penetapan Perpres Arsitektur SPBE. Berikut progres capaian yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah sekian waktu tidak ada perkembangan, penetapan Perpres Arsitektur SPBE akhirnya tercapai pada periode B24. Pengesahan Perpres Arsitektur SPBE No 132/2022 ini diharapkan dapat melahirkan keterpaduan layanan digital baik di tingkat instansi maupun lintas instansi • KemenPANRB telah menetapkan 15 Pemda yang menjadi piloting penetapan Arsitektur SPBE Nasional, yaitu: Aceh, Riau, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat • Dengan ditetapkannya Perpres tentang Arsitektur SPBE, Tim Koordinasi SPBE saat ini perlu memperkuat upaya sosialisasi, diseminasi, asistensi dan pengawalan kepada KL dan Pemda agar dapat mengadopsi, mengadaptasi dan menerapkan Arsitektur SPBE dengan benar • Saat ini baru ada 2 instansi pusat yang menetapkan arsitektur SPBE, yakni BRIN dan KemenPANRB 																
<p>2 Output 2</p> <p>Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional</p> <p>Indikator</p> <p>a. Ditetapkannya PermenPANRB tentang Peta Rencana SPBE Nasional</p> <p>b. Jumlah K/L/D yang memiliki Peta Rencana SPBE yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional - 10 K/L (B24) - 50 Pemda (B24)</p>	<table border="1" data-bbox="722 1146 1420 1272"> <thead> <tr> <th>B03</th> <th>B06</th> <th>B09</th> <th>B12</th> <th>B15</th> <th>B18</th> <th>B21</th> <th>B24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>45%</td> <td>50%</td> <td>52,5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai capaian output 2 sangat bergantung pada pemenuhan capaian pada output 1 yakni penetapan Perpres Arsitektur SPBE. Berhubung Perpres Arsitektur SPBE baru ditetapkan di periode B24 maka progres pada output ini belum berubah signifikan. Berikut beberapa informasi yang dapat disampaikan:</p> <p>a. Sudah ada rangkaian pembahasan RPermenPANRB tentang Peta Rencana SPBE Nasional dan draf Peta Rencana SPBE Nasional terutama dengan beberapa K/L yang terlibat dalam sektor-sektor layanan prioritas yang akan dimasukkan dalam Peta Rencana SPBE Nasional, namun belum ada penetapannya. Hingga periode B24, KemenPANRB baru mengantisipasi dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 18/2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE</p> <p>b. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana No. B/319/KT/03/2022 tentang Pelaksanaan Pendampingan Teknis SPBE pada Pemerintah Daerah, telah ditetapkan 15 Pemda yang menjadi piloting penetapan peta rencana SPBE Nasional, yaitu: Aceh, Riau, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	25%	30%	30%	30%	30%	45%	50%	52,5%
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24										
25%	30%	30%	30%	30%	45%	50%	52,5%										

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
3	<p>Output 3 Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR!</p> <p>Indikator</p> <p>a. Prosentase aplikasi instansi yang telah terintegrasi/terkonsolidasi dengan SP4N LAPOR!</p> <p>b. Diterapkannya aplikasi SP4N LAPOR versi 3.2 lanjutan</p> <p>c. Ditetapkannya dan tersedianya jabatan fungsional analisis pengelola pengaduan</p> <p><i>Note</i> Kemenkominfo telah menyusun pedoman integrasi SP4N LAPOR melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mendukung interoperabilitas data antar layanan pemerintah berskala Nasional. SPLP dapat menghubungkan aplikasi sejenis dengan skalabilitas tingkat daerah kepada aplikasi umum yang skalabilitasnya menjangkau tingkat nasional</p> <p>Pada tahun 2021, terdapat 4 lembaga yang mengirimkan asesmen pendahuluan, yaitu LKPP, Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Malang, Pemkab Mojokerto. Pada tahun 2022, terdapat 3 lembaga yang telah mengirimkan asesmen pendahuluan yaitu Pemkot Tasikmalaya, Pemkab Karawang dan Pemda Jawa Tengah</p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		N/A	8,9%	13,9%	27,2%	27,2%	31,7%	33,9%	65%
		<p>Hingga periode B24 berakhir, nilai capaian output 3 mengalami kemajuan berarti, berikut beberapa informasi yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait indikator integrasi dan konsolidasi aplikasi SP4N LAPOR, Kemenkominfo telah menyusun pedoman integrasi SP4N LAPOR melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mendukung interoperabilitas data antar layanan pemerintah berskala Nasional. SPLP diharapkan dapat menghubungkan aplikasi sejenis dengan skalabilitas tingkat daerah kepada aplikasi umum yang skalabilitasnya menjangkau tingkat nasional • Terkait indikator penerapan aplikasi SP4N LAPOR, berikut catatan progres yang dapat disampaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Menurut Kemenkominfo, terdapat 60 instansi pusat dan 290 instansi daerah yang telah terdaftar pada SPLP untuk integrasi dengan SP4N LAPOR dan ada 136 IPPD dan OPD yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk memanfaatkan Aplikasi SP4N LAPOR. data dukung terkait informasi ini agar dapat di unggah pada jaga.id/monitoring - Kemkominfo telah menyusun RPM kebijakan umum penyelenggaraan audit TIK yang saat ini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM - BRIN/BPPT telah melaksanakan Audit Aplikasi Umum dan BSSN telah melaksanakan Audit Keamanan Aplikasi Umum terhadap aplikasi SP4N LAPOR berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan audit TIK • Terkait indikator JF analis, progresnya masih berjalan di tempat, sama seperti posisi pada periode B12: <ul style="list-style-type: none"> - Naskah Akademik dan konsep Pembina JF telah disusun. Juga telah dibentuk Tim Perumus JF Analisis Pengaduan Pelayanan Publik - Secara internal, Deputi Bidang SDM Aparatur dan Deputi Bidang Pelayanan Publik di KemenPANRB sedang dalam proses pembahasan pembentukan JF Pelayanan Publik. Di antara substansi isu yang dibahas adalah terkait nomenklatur JF yang akan digunakan, apakah JF Analisis Pelayanan Publik atau JF Analisis Pengaduan Pelayanan Publik. Isu lainnya terkait instansi pembina yang hingga saat ini belum ada keputusan siapa yang menjadi instansi pembina - KemenPANRB akan melakukan kajian ulang terkait pembentukan JF Analisis Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik, karena saat ini sedang dilaksanakan pembahasan internal terkait transformasi SDM di kedeputian SDM Aparatur 							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
4	<p>Output 4* Meningkatnya penggunaan aplikasi umum oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah</p> <p>Indikator Jumlah aplikasi umum yang ditetapkan Tim Koordinasi SPBE</p> <p><i>*Output 4 adalah output tambahan yang baru diberlakukan per periode pelaporan B18</i></p>	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10%	15%	25%
		<ul style="list-style-type: none"> Karena output ini diberlakukan pada masa pelaporan TW VI (B18) maka capaian yang dapat dilaporkan adalah bahwa Tim Koordinasi SPBE telah melakukan pemetaan jumlah dan jenis aplikasi yang akan ditetapkan sebagai aplikasi umum Dari hasil pemetaan dan evaluasi, diusulkan paling sedikit 5 aplikasi berikut yang akan ditetapkan sebagai aplikasi umum. Berikut status kemajuannya: <ul style="list-style-type: none"> a. Aplikasi eMonev sebagai aplikasi bidang pemantauan pembangunan nasional; status saat ini, sudah dilakukan pembahasan rancangan KepmenPANRB tentang Penetapan Aplikasi e-Monev Sebagai Aplikasi Umum SPBE b. Sistem Informasi KRISNA menjadi Aplikasi Umum bidang Perencanaan; status saat ini, sedang dilakukan reviu persyaratan proses bisnis, data dan informasi, TIK, dan keamanan aplikasi KRISNA c. Aplikasi SIPD sebagai aplikasi bidang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik di tingkat daerah; status saat ini, sudah dilakukan pembahasan rancangan KepmenPANRB tentang Penetapan Aplikasi SIPD Sebagai Aplikasi Umum SPBE d. Aplikasi JDIHN sebagai aplikasi bidang dokumentasi dan informasi hukum; status saat ini, sudah diajukan dan sedang dipersiapkan Dokumen Persyaratan Penetapan e. Aplikasi INSW; status saat ini, belum ada pengajuan f. Aplikasi SIMAN sebagai aplikasi bidang manajemen aset negara; status saat ini, belum ada laporan progres g. Aplikasi PPID sebagai aplikasi bidang pengelolaan informasi; status saat ini, belum ada laporan progres 							

11. Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Penanganan perkara berjalan lambat dan tidak transparan

Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi/data antar aparat penegak hukum. Tantangan pada era teknologi informasi juga masih belum ditangani dengan baik. Kehadiran teknologi informasi belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan.

Oleh karenanya aksi ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergi pendataan penanganan perkara pidana korupsi serta koordinasi dan supervisi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang melibatkan seluruh instansi penegakan hukum. Sehingga harapannya proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, transparan, dan adil.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	N/A*	N/A*	14,7**	27,8	36,2	48	53,9	57,2

Dari hasil monitoring hingga triwulan VIII (B24), tergambar bahwa realisasi capaian **aksi Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi** adalah **57,2%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada keseluruhan tiga output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Ketiga output tersebut adalah: (a) Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) (52,6%), (b) Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI (44,2%), (c) Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI (86,7%).

Note

* Pada periode B06, sistem penilaian dihitung per triwulan. Sementara per periode B09 dilakukan penyesuaian penghitungan di mana sistem penilaian dihitung secara berkelanjutan (kumulatif) sampai 8 triwulan. Dengan demikian, nilai yang muncul pada periode B03 (0%) dan B06 (39,77%) menjadi tidak relevan untuk ditampilkan. Karena nilai periode B06 hasil penyesuaian adalah 6,1%

**Nilai 14,7% adalah nilai hasil penghitungan progres capaian yang merupakan akumulasi sampai periode B09. Di mana nilai B03 dan B06 berdasarkan hasil penghitungan baru adalah 0% dan 6,1%. Sehingga nilai pada periode B09 mengalami kenaikan sekitar 8% dibandingkan periode B06

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	<p>Output 1 Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPTTI)</p> <p>Indikator Satker Polri, Kejagung, Ditjen PAS, dan MA di 212 Wilayah Implementasi dan Satker KPK telah mengirimkan data penanganan perkara yang sesuai dengan Pedoman Pertukaran Data yang berlaku</p> <p><i>Note:</i> Output dan indikator ini dinilai berdasarkan 3 aspek, yaitu: (1) kesesuaian wilayah; (2) jumlah dan jenis dokumen yang dipertukarkan; (3) kesegaran data</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian wilayah: kesesuaian dengan target wilayah implementasi di tingkat Kab/Kota (total 212 Wilayah Implementasi/212 satker Pertukaran data: Jenis dokumen yang dipertukarkan berdasarkan pedoman pertukaran data yang berlaku, terdapat pengaturan mengenai jumlah dan jenis data yang harus dikirimkan LPH atau dipertukarkan, sbb: <ul style="list-style-type: none"> MA ada 21 jenis dokumen yang harus dipertukarkan Polri ada 6 jenis dokumen yang harus dipertukarkan Kejaksaan ada 14 jenis dokumen yang harus dipertukarkan Ditjen PAS 3 jenis dokumen yang harus dipertukarkan Kesegaran data: mengacu pada pedoman pertukaran data, pertukaran data secara digital dilakukan paling lambat 3 hari setelah tanggal pada dokumen (data segar) 	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		N/A	N/A	15%	21,4%	27,4%	38,4%	47%	52,6%
		<p>Hingga periode B24 berakhir, secara keseluruhan nilai capaian output 1 belum mengalami kemajuan signifikan. Berikut progres capaian yang dapat disampaikan, berdasarkan 3 aspek penilaian (tingkat kesesuaian wilayah, pertukaran jenis dokumen, dan tingkat kesegaran data):</p> <p>Polri</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk tingkat kesesuaian wilayah, secara rerata (B03-B24) dengan memperhitungkan konsistensi kesesuaian wilayah di setiap bulan maka progres capaian Polri sampai B24 adalah 71,76% (dari nilai ideal 100%); Untuk jenis dokumen yang dipertukarkan, secara rerata dengan memperhitungkan konsistensi jumlah/-jenis dokumen yang dipertukarkan di setiap bulan maka progres capaian Polri sampai B24 adalah 59,85% (dari nilai ideal 100%); Untuk tingkat kesegaran data terlihat masih sangat rendah. Jika dihitung secara rerata selama B03-B24 maka progres capaian Polri sampai B24 adalah 20,45% (dari nilai ideal 100%) <p>Kejagung</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk tingkat kesesuaian wilayah, secara rerata (B03-B24) dengan memperhitungkan konsistensi kesesuaian wilayah di setiap bulan maka progres capaian Kejagung sampai B24 adalah 85,30% (dari nilai ideal 100%); Untuk jenis dokumen yang dipertukarkan, secara rerata dengan memperhitungkan konsistensi jumlah/-jenis dokumen yang dipertukarkan di setiap bulan maka progres capaian Kejagung sampai B24 adalah 80,82% (dari nilai ideal 100%); Untuk tingkat kesegaran data masih sangat rendah. Jika dihitung secara rerata selama B03-B24 maka progres capaian Kejagung sampai B24 adalah 20,02% (dari nilai ideal 100%) <p>Mahkamah Agung</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk tingkat kesesuaian wilayah, secara rerata (B03-B24) dengan memperhitungkan konsistensi kesesuaian wilayah di setiap bulan maka progres capaian MA sampai B24 adalah 94,37% (dari nilai ideal 100%); 							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala
<p>1 Output 1</p>	<p>Mahkamah Agung</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk jenis dokumen yang dipertukarkan, secara rerata dengan memperhitungkan konsistensi jumlah/- jenis dokumen yang dipertukarkan di setiap bulan maka progres capaian MA sampai B24 adalah 45,60 (dari nilai ideal 100%); Untuk tingkat kesegaran data masih sangat rendah. Jika dihitung secara rerata selama B03-B24 maka progres capaian MA sampai B24 adalah 48,15% (dari nilai ideal 100%) <p>KemenkumHAM (Ditjen PAS)</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk tingkat kesesuaian wilayah, secara rerata (B03-B24) dengan memperhitungkan konsistensi kesesuaian wilayah di setiap bulan maka progres capaian Ditjen PAS sampai B24 adalah 61,04% (dari nilai ideal 100%); Untuk jenis dokumen yang dipertukarkan, secara rerata dengan memperhitungkan konsistensi jumlah/- jenis dokumen yang dipertukarkan di setiap bulan maka progres capaian Ditjen PAS sampai B24 adalah 89,58% (dari nilai ideal 100%); Untuk tingkat kesegaran data masih sangat rendah. Jika dihitung secara rerata selama B03-B24 maka progres capaian Ditjen PAS sampai B24 adalah 59,30% (dari nilai ideal 100%) <p>KPK</p> <ol style="list-style-type: none"> Hingga periode B24 berakhir, KPK baru melakukan pertukaran data untuk jenis dokumen S23 <p>Kemenko Polhukam</p> <ol style="list-style-type: none"> Selaku Koordinator Pokja SPPT TI, Kemenko Polhukam telah melakukan fungsi koordinasi dan monitoring dengan baik Kemenko Polhukam (Deputi Bidang Hukum) secara reguler setiap triwulan telah melakukan rapat koordinasi monitoring atas pertukaran data, pemanfaatan data, dan menyampaikan hasil laporan bulanan yang isinya mencakup: (a) jenis dokumen yang dipertukarkan oleh LPH; (b) kesesuaian dengan target wilayah implementasi; (c) tingkat mutu data, (d) tingkat kesegaran data

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala							
<p>2 Output 2 Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI</p> <p>Indikator Satker Polri, Kejagung, MA, dan Ditjen PAS di 212 Wilayah Implementasi telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara serta Satker KPK telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara</p> <p>Target pemanfaatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Polri: P16, Surat Lepas, dan SPHMP Kejagung: SPDP; Petikan Putusan MA: P16, P31, SPHMP PAS Ditjen PAS: BA17, P48, Petikan Putusan 	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
	N/A	N/A	10,2%	19%	26,6%	34,4%	41,2%	44,2%
	<p>Nilai capaian output 2 pada Triwulan VIII (B24) adalah 44,2%. Berikut progres capaian yang dapat disampaikan:</p> <p>Polri</p> <ul style="list-style-type: none"> Hingga triwulan VIII (B24), Polri telah mengirimkan laporan pemanfaatan namun berdasarkan laporan monitoring Pokja SPPT TI, hanya ada pemanfaatan data terhadap dokumen P16: sementara Surat Lepas dan SPHMP belum terjadi pemanfaatan Dengan demikian progres capaian Polri dalam pemanfaatan data masih belum maksimal <p>Kejagung Berdasarkan laporan monitoring dari Kemenko Polhukam untuk pemanfaatan data, pada periode B24, tidak terdapat pemanfaatan data oleh Kejagung, namun demikian secara keseluruhan performa Kejagung pada output ini cukup baik</p> <p>Mahkamah Agung Berdasarkan laporan monitoring dari Kemenko Polhukam pada periode B24, MA telah melakukan pemanfaatan data atas 2 dokumen secara penuh, yaitu : P16 A dan SPHMP PAS 10. Dengan demikian nilai MA secara keseluruhan dari periode B03 hingga B24 cukup konsisten melakukan pemanfaatan data</p> <p>KemenkumHAM (Ditjen PAS)</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil monitoring dari Kemenko Polhukam, Ditjen Pemasarakatan telah meneruskan data yang diterima ke satker tujuan dan melaporkannya ke Koordinator SPPT TI, sehingga Ditjen menjadi yang paling konsisten dalam melakukan pemanfaatan data Di antara pemanfaatan yang dilakukan Ditjen PAS ialah BA 17, P-48, dan Petikan Putusan. Namun demikian pada periode B24 ini terjadi gangguan pada Sistem Database Pemasarakatan (SDP) sehingga tidak terjadi pemanfaatan data <p>KPK Hingga periode pelaporan triwulan VIII (B24) ini, pemanfaatan data oleh KPK tidak terjadi karena aplikasi SINERGI belum digunakan untuk perutukan data meskipun sudah siap secara sistem</p>							

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala																
<p>2 Output 2</p>	<p>Kemenko Polhukam</p> <ul style="list-style-type: none"> Selaku Koordinator Pokja SPPT TI, Kemenko Polhukam telah melakukan fungsi monitoring dengan baik Kemenko Polhukam secara reguler tiap triwulan melakukan Rakor monitoring atas pertukaran data, pemanfaatan data, dan menyampaikan hasil laporan bulanan yang isinya mencakup jenis dokumen yang dipertukarkan oleh LPH, kesesuaian dengan target wilayah implementasi, tingkat mutu data, tingkat kesegaran data, serta pemanfaatan data/dokumen 																
<p>3 Output 3 Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI</p> <p>Indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> Sistem pertukaran dan pemanfaatan data bisa berfungsi dan beroperasi dengan baik Tersedianya sistem database BNN untuk SPPT TI 	<table border="1" data-bbox="724 712 1422 837"> <thead> <tr> <th>B03</th> <th>B06</th> <th>B09</th> <th>B12</th> <th>B15</th> <th>B18</th> <th>B21</th> <th>B24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>21,6%</td> <td>53,3%</td> <td>66,7%</td> <td>86,7%</td> <td>86,7%</td> <td>86,7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hingga periode B24 berakhir, nilai capaian output 3 ini masih sama dengan capaian pada periode B21. Berikut catatan progres yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Terkait indikator (a): Beberapa proses telah dilakukan di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> Untuk "operasionalisasi infrastruktur pertukaran data yang mendukung <i>high availability</i> dan tingkat ketersediaan Puskarda sudah dibangun oleh BSSN dengan berkoordinasi dengan Kemenkominfo terkait arsitekturnya. Saat ini sudah berjalan baik Standar keamanan dan kerahasiaan data, dalam hal ini Pedoman Keamanan Data dan Informasi SPPT-TI telah disusun BSSN dan saat ini dalam tahap revisi setelah mendapatkan masukan dari Pokja SPPT-TI. Namun hingga saat ini belum ada informasi mengenai kepastian waktu penyelesaiannya Terkait rancangan fitur <i>dashboard</i> SPPT TI, masih dalam proses pengembangan. Sementara untuk simpul dan Puskarda sudah beroperasi dengan baik walaupun masih terapat <i>bugs minor</i> Saat ini, Kemenkominfo telah menyelesaikan fitur pelacakan perkara dan klasifikasi perkara setelah dilakukan uji coba Terkait indikator (b) sudah terpenuhi, di mana BNN telah menyelesaikan sistem <i>database</i> dan aplikasi untuk penanganan perkara narkoba secara elektronik (E-Mindik), sehingga indikator pengembangan <i>database</i> untuk SPPT-TI telah selesai dan bahkan aplikasinya telah di-launching pada bulan Januari 2022 lalu 	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	N/A	N/A	21,6%	53,3%	66,7%	86,7%	86,7%	86,7%
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24										
N/A	N/A	21,6%	53,3%	66,7%	86,7%	86,7%	86,7%										

12. Penguatan integritas Aparat Penegak Hukum (APH)

Latar Belakang Aksi dan Sasaran Strategis

Dengan kewenangan yang dimiliki, peranan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi sangat besar. Namun, peranan ini belum banyak dirasakan masyarakat disebabkan minimnya Integritas APH yang memengaruhi profesionalisme dan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi.

Upaya untuk meningkatkan integritas APH tidak mudah manakala permasalahan mendasar seperti standar remunerasi (kesejahteraan) dan jenjang karier APH yang berprestasi masih belum teratasi.

Oleh karena itu, Aksi ini diharapkan dapat meningkatkan Integritas APH dengan mendorong peningkatan kesejahteraan APH dan kepastian jenjang kariernya.

Ringkasan Capaian Aksi

Periode	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
Nilai (%)	N/A	N/A	2,6	34,7	35,7	59,7	71,1	71,1

Dari hasil monitoring hingga triwulan VIII (B24), tergambar bahwa realisasi capaian **aksi Penguatan integritas Aparat Penegak Hukum (APH)** adalah **71,1%**. Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada dua output yang harus dicapai selama 2 tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. dua output tersebut adalah (a) Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi (87,2%), (b) Peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor (31,0%).

Untuk detailnya, berikut adalah deskripsi capaian berdasarkan: (1) sasaran output dan indikator keberhasilan; (2) kontribusi nilai Kementerian/Lembaga/Daerah pada Aksi ini:

Note

Per periode B09, beberapa output dan indikator mengalami penyesuaian pada rumusan dan ruang lingkup substansi. Sehingga nilai yang muncul pada periode B03 (0%) dan B06 (8,33%) menjadi tidak relevan untuk ditampilkan



1. Deskripsi capaian aksi berdasarkan sasaran output dan indikator keberhasilan

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan		Capaian dan Kendala							
1	Output 1 Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24
		0%	5%	5%	46,6%	46,6%	71,2%	87,2%	87,2%

Sasaran Output dan Indikator Keberhasilan	Capaian dan Kendala																
<p>1 Indikator</p> <p>a. Ditetapkan kebijakan pola karier yang mengatur pemberian penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi di Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK berupa ; a.) dimasukkan dalam talent pool; b.) kenaikan pangkat istimewa</p> <p>b. Diusulkan dan dirumuskannya kebijakan kenaikan remunerasi bagi Aparat Penegak Hukum (APH)</p>	<p>Hingga periode B24 berakhir, nilai capaian output 1 ini masih sama dengan capaian pada periode B21. Berikut catatan progres yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait indikator (a), KPK dan Polri telah menetapkan kebijakan pola karir sejak tahun 2019 dan 2020. Sementara Kejagung baru saja menerbitkan Perja No. 5/2022 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Kejaksaan atau Pihak yang Berkontribusi Besar untuk Kemajuan Penegakan Hukum. Kejagung juga telah menetapkan Kepja No. 38/2022 tentang Peta Jabatan di Kejaksaan dalam rangka penataan sistem manajemen kepegawaian • Terkait indikator (b), Kejagung (Bagian Ortala) telah selesai menyusun konsep usulan terkait penyesuaian remunerasi APH dan saat ini telah diusulkan kepada KemenPANRB dan Setneg untuk direviu; Sementara Polri sudah mengirimkan usulan penyesuaian tunjangan kinerja hingga 80% kepada KemenPANRB dan Kemenkeu. Namun tanggapan dari Kemenkeu untuk saat ini kenaikan tunjangan kinerja belum dapat dipenuhi dengan alasan ada kebijakan moratorium 																
<p>2 Output 2</p> <p>Peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor</p> <p>Indikator</p> <p>Ditetapkannya kebijakan tentang penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor</p> <p><i>*per periode B18 indikator ada output ini dilakukan perubahan penilaian indikator dari yang bersifat kolaboratif menjadi mandiri. Artinya nilai capaian yang didapati satu Kementerian/lembaga tidak berlaku sama bagi kementerian/lembaga lain. Konsekuensinya terjadi penyesuaian nilai dari 34% di B15 menjadi 31% di B18</i></p>	<table border="1" data-bbox="724 1055 1418 1182"> <thead> <tr> <th>B03</th> <th>B06</th> <th>B09</th> <th>B12</th> <th>B15</th> <th>B18</th> <th>B21</th> <th>B24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>0%</td> <td>20%</td> <td>34%*</td> <td>31%</td> <td>31%</td> <td>31%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hingga periode B24 berakhir, nilai capaian output 2 ini masih sama dengan capaian pada periode B18. Berikut catatan progres yang dapat disampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Polri, sudah ada usulan standar biaya penanganan perkara Tipikor yang diajukan Bareskrim kepada ASRENA Polri. Saat ini, tim ASRENA sedang membahas dengan Kemenkeu • Kejagung mengusulkan penggunaan Standar Biaya Khusus (SBK) daripada Standar Biaya Umum (SBU) karena perbedaan biaya per wilayah sangat besar. Saat ini Biro Perencanaan Kejaksaan RI telah menyiapkan usulan Standar Biaya penanganan perkara berdasarkan 3 cluster wilayah di setiap provinsi dengan kriteria berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah I: Satker kejaksaan yang waktu tempuh dengan lokasi pengadilan kurang dari 3 jam - Wilayah II: Satker kejaksaan yang waktu tempuh dengan lokasi pengadilan lebih dari 3 jam dan tidak perlu menginap - Satker kejaksaan yang waktu tempuh dengan lokasi pengadilan lebih dari 3 jam dan perlu menginap karena menggunakan transportasi darat/laut/udara • KPK telah mengeluarkan kebijakan standar biaya penanganan perkara KPK sejak bulan Desember 2021 	B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24	N/A	N/A	0%	20%	34%*	31%	31%	31%
B03	B06	B09	B12	B15	B18	B21	B24										
N/A	N/A	0%	20%	34%*	31%	31%	31%										

TABEL CAPAIAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Badan Informasi Geospasial	59,4%	61,1%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	59,4%	61,1%
Output 1		
Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	59,4%	61,1%
Indikator		
• Integrasi ILOK di Bengkalis	56,0%	56,0%
• Integrasi ILOK di Berau	93,0%	93,0%
• Integrasi ILOK di Boven Digoel	70,0%	70,0%
• Integrasi ILOK di Indragiri Hilir	52,0%	52,0%
• Integrasi ILOK di Indragiri Hulu	36,0%	36,0%
• Integrasi ILOK di Jayapura	70,0%	70,0%
• Integrasi ILOK di Kampar	28,0%	28,0%
• Integrasi ILOK di Kuantan Singingi	34,0%	34,0%
• Integrasi ILOK di Kutai Barat	100,0%	100,0%
• Integrasi ILOK di Kutai Kartanegara	96,0%	96,0%
• Integrasi ILOK di Mahakam Ulu	100,0%	100,0%
• Integrasi ILOK di Mamuju Tengah	83,0%	83,0%
• Integrasi ILOK di Mappi	70,0%	70,0%
• Integrasi ILOK di Mimika	89,0%	89,0%
• Integrasi ILOK di Nabire	70,0%	70,0%
• Integrasi ILOK di Pasangkayu	30,0%	50,0%
• Integrasi ILOK di Pekanbaru	57,0%	70,0%
• Integrasi ILOK di Pelalawan	37,0%	45,0%
• Integrasi ILOK di Penajam Paser Utara	75,0%	75,0%
• Integrasi ILOK di Rokan Hilir	36,0%	36,0%
• Integrasi ILOK di Rokan Hulu	58,0%	62,0%
• Integrasi ILOK di Sarmi	70,0%	70,0%
• Integrasi ILOK di Siak	37,0%	37,0%
• Integrasi IUP di Bengkalis	29,0%	29,0%
• Integrasi IUP di Berau	96,0%	96,0%
• Integrasi IUP di Boven Digoel	70,0%	70,0%
• Integrasi IUP di Indragiri Hilir	46,0%	46,0%
• Integrasi IUP di Indragiri Hulu	32,0%	32,0%
• Integrasi IUP di Jayapura	70,0%	70,0%
• Integrasi IUP di Kampar	38,0%	38,0%
• Integrasi IUP di Kuantan Singingi	18,0%	18,0%
• Integrasi IUP di Kutai Barat	100,0%	100,0%
• Integrasi IUP di Kutai Kartanegara	48,0%	48,0%
• Integrasi IUP di Kutai Timur	100,0%	100,0%
• Integrasi IUP di Mahakam Ulu	100,0%	100,0%
• Integrasi IUP di Mamuju Tengah	38,0%	38,0%
• Integrasi IUP di Mappi	100,0%	100,0%
• Integrasi IUP di Merauke	70,0%	70,0%
• Integrasi IUP di Mimika	70,0%	70,0%
• Integrasi IUP di Nabire	70,0%	70,0%
• Integrasi IUP di Pasangkayu	38,0%	50,0%
• Integrasi IUP di Pekanbaru	57,0%	70,0%
• Integrasi IUP di Pelalawan	30,0%	41,0%
• Integrasi IUP di Penajam Paser Utara	28,0%	28,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Badan Informasi Geospasial		
Percepatan implementasi kebijakan satu peta		
Indikator		
• Integrasi IUP di Rokan Hilir	14,0%	14,0%
• Integrasi IUP di Rokan Hulu	53,0%	53,0%
• Integrasi IUP di Sarmi	70,0%	70,0%
• Integrasi IUP di Siak	19,0%	19,0%
Badan Kepegawaian Negara	27,5%	40,0%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	25,0%	50,0%
Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	25,0%	50,0%
Indikator Integrasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan data PNS	25,0%	50,0%
Percepatan Implementasi SPBE	30,0%	30,0%
Output 1 Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR!	30,0%	30,0%
Indikator Ditetapkannya dan tersedianya jabatan fungsional analisis pengelola pengaduan	30,0%	30,0%
Badan Koordinasi Penanaman Modal	27,2%	32,6%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	65,0%	75,0%
Output 1 Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa	65,0%	75,0%
Indikator Jumlah pengajuan izin sektor ekstraktif dan perkebunan yang data BO nya diverifikasi oleh Pemberi izin	65,0%	75,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	26,3%	31,6%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	26,3%	31,6%
Indikator		
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Barito Selatan	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Barito Timur	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Barito Utara	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Bengkalis	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Berau	1,0%	1,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Badan Koordinasi Penanaman Modal		
Percepatan implementasi kebijakan satu peta		
Indikator		
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Boven Digoel	75,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Gunung Mas	100,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Indragiri Hilir	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Indragiri Hulu	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Jayapura	100,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kampar	75,0%	75,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kapuas	75,0%	75,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Katingan	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Keerom	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kotawaringin Barat	75,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kotawaringin Timur	100,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kuantan Singingi	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kutai Barat	75,0%	75,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kutai Kartanegara	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kutai Timur	100,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Lamandau	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mahakam Ulu	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mamuju	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mamuju Tengah	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mappi	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Merauke	100,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mimika	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Murung Raya	1,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Nabire	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Palangkaraya	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Pasangkayu	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Paser	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Pekanbaru	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Pelalawan	100,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Penajam Paser Utama	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Pulang Pisau	1,0%	75,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Rokan Hilir	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Rokan Hulu	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Sarmi	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Seruyan	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Siak	100,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Sukamara	1,0%	1,0%
Badan Narkotika Nasional	100,0%	100,0%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	100,0%	100,0%
Output 1		
Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI	100,0%	100,0%
Indikator		
Tersedianya sistem database BNN untuk SPPT TI	100,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	30,0%	50,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	30,0%	50,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	60,0%	100,0%
Indikator Jumlah pembelian secara online (purchase order) pada katalog sektoral di Badan Nasional Penanggulangan Bencana	60,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	0,0%	0,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 200 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKP atau mekanisme e-payment lainnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana	0,0%	0,0%
Badan Pengawas Obat dan Makanan	50,0%	65,0%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	50,0%	65,0%
Output 1 Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan sebagai basis pengambilan kebijakan	50,0%	65,0%
Indikator Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Narkotika, Psikotropika, Prekursor	50,0%	65,0%
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	59,0%	64,0%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	60,0%	66,7%
Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat	75,0%	80,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di K/L	75,0%	80,0%
Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	45,0%	50,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	45,0%	50,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan		
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik		
Output 3 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah	60,0%	70,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	60,0%	70,0%
Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Program Pembangunan	57,5%	60,0%
Output 1 Penguatan independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk peningkatan kelas jabatan fungsional APIP	100,0%	100,0%
Indikator Penetapan kelas jabatan fungsional auditor	100,0%	100,0%
Output 2 Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	15,0%	20,0%
Indikator Jumlah SDM Auditor yang terpenuhi sesuai usulan	15,0%	20,0%
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	100,0%	100,0%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	100,0%	100,0%
Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	100,0%	100,0%
Indikator Jumlah ketepatan PBI JKN sesuai data kependudukan dan sesuai DTKS	100,0%	100,0%
Badan Pusat Statistik	75,0%	95,8%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	75,0%	95,8%
Output 1 Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan sebagai basis pengambilan kebijakan	75,0%	95,8%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Badan Pusat Statistik		
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan		
Indikator		
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Bawang Putih	25,0%	75,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Beras	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Daging	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Garam	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Gula	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Jagung	25,0%	100,0%
Badan Riset dan Inovasi Nasional	43,3%	55,8%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	60,0%	65,0%
Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat	75,0%	80,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di K/L	75,0%	80,0%
Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	45,0%	50,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	45,0%	50,0%
Percepatan Implementasi SPBE	35,0%	51,3%
Output 1 Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR!	25,0%	75,0%
Indikator Diterapkannya aplikasi SP4N LAPOR versi 3.2 lanjutan	25,0%	75,0%
Output 2 Meningkatnya penggunaan aplikasi umum oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	15,0%	25,0%
Indikator Jumlah aplikasi umum yang ditetapkan Tim Koordinasi SPBE	15,0%	25,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Badan Riset dan Inovasi Nasional		
Percepatan Implementasi SPBE		
Output 3 Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional	50,0%	52,5%
Indikator <ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya PermenPANRB tentang Peta Rencana SPBE Nasional Jumlah K/L/D yang memiliki Peta Rencana SPBE yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional - 10 K/L (B21) - 50 Pemda (B21) 	70,0% 30,0%	75,0% 30,0%
Badan Siber dan Sandi Negara	45,0%	58,1%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	45,0%	50,0%
Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	45,0%	50,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	45,0%	50,0%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	80,0%	80,0%
Output 1 Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI	80,0%	80,0%
Indikator Sistem pertukaran dan pemanfaatan data bisa berfungsi dan beroperasi dengan baik	80,0%	80,0%
Percepatan Implementasi SPBE	39,2%	55,8%
Output 1 Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR!	25,0%	75,0%
Indikator Diterapkannya aplikasi SP4N LAPOR versi 3.2 lanjutan	25,0%	75,0%
Output 2 Meningkatnya penggunaan aplikasi umum oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	15,0%	25,0%
Indikator Jumlah aplikasi umum yang ditetapkan Tim Koordinasi SPBE	15,0%	25,0%
Output 3 Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional	47,5%	65,0%
Indikator <ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya Perpres tentang Arsitektur SPBE Jumlah K/L/D yang memiliki Arsitektur SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional - 10 K/L (B21) - 50 Pemda (B21) 	75,0% 20,0%	100,0% 30,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Badan Siber dan Sandi Negara		
Percepatan Implementasi SPBE		
Output 4 Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional	50,0%	52,5%
Indikator		
• Ditetapkannya PermenPANRB tentang Peta Rencana SPBE Nasional	70,0%	75,0%
• Jumlah K/L/D yang memiliki Peta Rencana SPBE yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional - 10 K/L (B21) - 50 Pemda (B21)	30,0%	30,0%
Kantor Staf Presiden	67,9%	92,9%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	75,0%	95,8%
Output 1 Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan sebagai basis pengambilan kebijakan	75,0%	95,8%
Indikator		
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Bawang Putih	25,0%	75,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Beras	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Daging	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Garam	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Gula	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Jagung	25,0%	100,0%
Percepatan Implementasi SPBE	25,0%	75,0%
Output 1 Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR!	25,0%	75,0%
Indikator Diterapkannya aplikasi SP4N LAPOR versi 3.2 lanjutan	25,0%	75,0%
Kejaksaan Agung	67,0%	68,5%
Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum	69,0%	69,0%
Output 1 Peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor	19,0%	19,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kejaksanaan Agung		
Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum		
Indikator Ditetapkannya kebijakan tentang penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor	19,0%	19,0%
Output 2 Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi	94,0%	94,0%
Indikator <ul style="list-style-type: none"> Ditetapkan kebijakan pola karier yang mengatur pemberian penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi di Kejaksaan Agung berupa ; a.) dimasukkan dalam talent pool; b.) kenaikan pangkat istimewa Diusulkan dan dirumuskannya kebijakan kenaikan remunerasi bagi Aparat Penegak Hukum (APH) 	88,0%	88,0%
	100,0%	100,0%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	65,0%	68,0%
Output 1 Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI	80,0%	80,0%
Indikator Sistem pertukaran dan pemanfaatan data bisa berfungsi dan beroperasi dengan baik	80,0%	80,0%
Output 2 Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)	53,0%	62,0%
Indikator Satker Kejagung di 212 Wilayah Implementasi telah mengirimkan data penanganan perkara yang sesuai dengan Pedoman Pertukaran Data yang berlaku	53,0%	62,0%
Output 3 Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI	62,0%	62,0%
Indikator Satker Kejagung di 212 Wilayah Implementasi telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara	62,0%	62,0%
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia	30,7%	34,5%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	51,0%	56,5%
Output 1 Termanfatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa	65,0%	75,0%
Indikator Jumlah pengajuan izin sektor ekstraktif dan perkebunan yang data BO nya diverifikasi oleh Pemberi izin	65,0%	75,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia		
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)		
Output 2 Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait	37,0%	38,0%
Indikator Jumlah korporasi yang sudah mendeklarasikan BO	37,0%	38,0%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK		
Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	25,0%	37,0%
Indikator Integrasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan data kepemilikan property termutakhir	25,0%	37,0%
Output 2 Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak	72,0%	72,0%
Indikator Jumlah penerimaan pajak hasil analisa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak	72,0%	72,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta		
Output 1 Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	20,2%	20,2%
Indikator		
• Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Kalimantan Tengah	25,0%	25,0%
• Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Kalimantan Timur	25,0%	25,0%
• Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Papua	25,0%	25,0%
• Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Riau	25,0%	25,0%
• Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Sulawesi Barat	1,0%	1,0%
Output 2 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	42,0%	42,0%
Indikator		
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Selatan	80,0%	80,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Timur	47,0%	47,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Utara	62,0%	62,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia		
Percepatan implementasi kebijakan satu peta		
Indikator		
• Jumlah tindak lanjut lokus di Gunung Mas	49,0%	49,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kapuas	60,0%	60,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Katingan	44,0%	44,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kotawaringin Barat	17,0%	17,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kotawaringin Timur	39,0%	39,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Lamandau	7,0%	7,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Murung Raya	79,0%	79,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Palangkaraya	35,0%	35,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Pulang pisau	33,0%	33,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Seruyan	26,0%	26,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Sukamara	10,0%	10,0%
Output 3		
Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	26,3%	31,6%
Indikator		
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Barito Selatan	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Barito Timur	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Barito Utara	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Bengkalis	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Berau	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Boven Digoel	75,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Gunung Mas	100,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Indragiri Hilir	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Indragiri Hulu	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Jayapura	100,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kampar	75,0%	75,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kapuas	75,0%	75,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Katingan	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Keerom	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kotawaringin Barat	75,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kotawaringin Timur	100,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kuantan Singingi	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kutai Barat	75,0%	75,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kutai Kartanegara	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kutai Timur	100,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Lamandau	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mahakam Ulu	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mamuju	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mamuju Tengah	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mappi	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Merauke	100,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mimika	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Murung Raya	1,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Nabire	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Palangkaraya	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Pasangkayu	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Paser	1,0%	1,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia		
Percepatan implementasi kebijakan satu peta		
Indikator		
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Pekanbaru	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Pelalawan	100,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Penajam Paser Utama	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Pulang Pisau	1,0%	75,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Rokan Hilir	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Rokan Hulu	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Sarmi	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Seruyan	1,0%	1,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Siak	100,0%	100,0%
• Jumlah RDTR di Kab/Kota: Sukamara	1,0%	1,0%
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	72,7%	93,9%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	72,7%	93,9%
Output 1		
Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui	85,0%	85,0%
Indikator		
Terbitnya regulasi tentang tata kelola kelembagaan dan tarif jasa TKBM	85,0%	85,0%
Output 2		
Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem	63,0%	88,5%
Indikator		
• Digunakannya sistem layanan autogate di 14 Pelabuhan	71,0%	100,0%
• Digunakannya sistem layanan DO Online di 14 Pelabuhan	86,0%	100,0%
• Digunakannya sistem layanan SP2 Online di 14 Pelabuhan	65,0%	100,0%
• Digunakannya sistem layanan trucking di 14 Pelabuhan	30,0%	54,0%
Output 3		
Perbaiki birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan	50,0%	100,0%
Indikator		
Terwujudnya satu sistem layanan operator pelabuhan dengan pengawasan melekat dalam sistem layanan	50,0%	100,0%
Output 4		
Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK	85,0%	100,0%
Indikator		
• Tersedianya layanan autogate system	100,0%	100,0%
• Tersedianya layanan DO Online	100,0%	100,0%
• Tersedianya layanan SP2 Online	100,0%	100,0%
• Tersedianya layanan trucking	40,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Dalam Negeri	50,6%	54,3%
Implementasi E-payment dan E-katalog	100,0%	100,0%
Output 1 Tersedianya sistem pembayaran elektronik (e-payment) dalam Pengadaan Barang/Jasa K/L/D	100,0%	100,0%
Indikator Penetapan regulasi tentang e-payment untuk belanja online	100,0%	100,0%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	60,0%	66,7%
Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat	75,0%	80,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di K/L	75,0%	80,0%
Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	45,0%	50,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	45,0%	50,0%
Output 3 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah	60,0%	70,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	60,0%	70,0%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	58,8%	65,1%
Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	57,1%	64,3%
Indikator		
• Integrasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan data kepemilikan kendaraan	43,0%	50,0%
• Integrasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan data kepemilikan property termutakhir	25,0%	37,0%
• Integrasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan data penerima bansos	68,0%	68,0%
• Integrasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan data penerima vaksin	68,0%	81,0%
• Integrasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan data PNS	25,0%	50,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Dalam Negeri		
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektor Berbasis NIK		
Indikator		
• Jumlah ketepatan DTKS dan data penerima bansos Kemensos sesuai data kependudukan dan sesuai kriteria kemiskinan	99,0%	99,0%
• Jumlah ketepatan penerima BPUM tahun 2021 sesuai dengan data kependudukan	99,0%	99,0%
• Jumlah ketepatan penerima subsidi listrik dan elpiji sesuai dengan data kependudukan dan sesuai DTKS	30,0%	30,0%
Output 2 Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak	72,0%	72,0%
Indikator Jumlah wajib pajak hasil analisa integrasi data pelayanan publik berbasis NIK	72,0%	72,0%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	50,0%	50,0%
Output 1 Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah	50,0%	50,0%
Indikator Terbitnya regulasi tentang layanan jasa kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan Pusat dan Daerah	50,0%	50,0%
Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Program Pembangunan	57,5%	57,5%
Output 1 Penguatan independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk peningkatan kelas jabatan fungsional APIP	100,0%	100,0%
Indikator Penetapan kelas jabatan fungsional PPUPD	100,0%	100,0%
Output 2 Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	15,0%	15,0%
Indikator Jumlah SDM PPUPD yang terpenuhi sesuai usulan	15,0%	15,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	42,0%	42,1%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	42,0%	42,1%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Dalam Negeri		
Percepatan implementasi kebijakan satu peta		
Indikator		
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Selatan	80,0%	80,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Timur	47,0%	47,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Utara	62,0%	62,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Gunung Mas	49,0%	49,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kapuas	60,0%	60,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Katingan	44,0%	44,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kotawaringin Barat	17,0%	17,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kotawaringin Timur	39,0%	40,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Lamandau	7,0%	7,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Murung Raya	79,0%	79,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Palangkaraya	35,0%	35,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Pulang pisau	33,0%	33,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Seruyan	26,0%	26,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Sukamara	10,0%	10,0%
Percepatan Implementasi SPBE		
Output 1		
Meningkatnya penggunaan aplikasi umum oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	15,0%	25,0%
Indikator		
Jumlah aplikasi umum yang ditetapkan Tim Koordinasi SPBE	15,0%	25,0%
Output 2		
Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional	47,5%	65,0%
Indikator		
• Ditetapkannya Perpres tentang Arsitektur SPBE	75,0%	100,0%
• Jumlah K/L/D yang memiliki Arsitektur SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional - 10 K/L (B21) - 50 Pemda (B21)	20,0%	30,0%
Output 3		
Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional	50,0%	52,5%
Indikator		
• Ditetapkannya PermenPANRB tentang Peta Rencana SPBE Nasional	70,0%	75,0%
• Jumlah K/L/D yang memiliki Peta Rencana SPBE yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional - 10 K/L (B21) - 50 Pemda (B21)	30,0%	30,0%
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)		
Output 1		
Termanfatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa	65,0%	75,0%
Indikator		
Jumlah pengajuan izin sektor ekstraktif dan perkebunan yang data BO nya diverifikasi oleh Pemberi izin	65,0%	75,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)		
Output 2 Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait	37,0%	38,0%
Indikator Jumlah korporasi yang sudah mendeklarasikan BO	37,0%	38,0%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	30,0%	30,0%
Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	30,0%	30,0%
Indikator Jumlah ketepatan penerima subsidi listrik dan elpiji sesuai dengan data kependudukan dan sesuai DTKS	30,0%	30,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya	67,0%	85,3%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi subsektor SDA	62,5%	80,0%
Indikator • Regulasi hasil penyesuaian untuk intensifikasi penerimaan negara dari royalti batubara dan Kompensasi Denda DMO untuk subsektor batubara tersedia Proses layanan dari mulai permohonan, penetapan tarif, pembayaran sampai dengan pelaporan telah terintegrasi. • Regulasi hasil penyesuaian untuk intensifikasi penerimaan negara dari royalti untuk subsektor mineral tersedia. Proses layanan dari mulai permohonan, penetapan tarif, pembayaran sampai dengan pelaporan telah terintegrasi	75,0%	85,0%
	50,0%	75,0%
Output 2 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui peningkatan akuntabilitas sektor swasta	76,0%	96,0%
Indikator Meningkatnya Akuntabilitas perhitungan PNBPN Migas dengan menurunkan diskrepansi dalam perhitungan penerimaan PNBPN Migas	76,0%	96,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	42,0%	42,1%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	42,0%	42,1%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		
Percepatan implementasi kebijakan satu peta		
Indikator		
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Selatan	80,0%	80,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Timur	47,0%	47,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Utara	62,0%	62,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Gunung Mas	49,0%	49,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kapuas	60,0%	60,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Katingan	44,0%	44,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kotawaringin Barat	17,0%	17,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kotawaringin Timur	39,0%	40,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Lamandau	7,0%	7,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Murung Raya	79,0%	79,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Palangkaraya	35,0%	35,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Pulang pisau	33,0%	33,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Seruyan	26,0%	26,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Sukamara	10,0%	10,0%
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	68,3%	74,2%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	50,6%	54,8%
Output 1 Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat	100,0%	100,0%
Indikator Terbukanya akses publik	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa	38,7%	45,3%
Indikator		
• Jumlah akses layer APH untuk kebutuhan penegakan hukum	50,0%	60,0%
• Jumlah pengajuan izin sektor ekstraktif dan perkebunan yang data BO nya diverifikasi oleh Pemberi izin	65,0%	75,0%
• Jumlah vendor yang telah mendeklarasikan data BO nya pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)	1,0%	1,0%
Output 3 Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait	37,0%	38,0%
Indikator Jumlah korporasi yang sudah mendeklarasikan BO	37,0%	38,0%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektor Berbasis NIK	72,0%	72,0%
Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak	72,0%	72,0%
Indikator Jumlah penerimaan pajak hasil analisa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak	72,0%	72,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	83,8%	96,3%
Output 1 Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui	85,0%	85,0%
Indikator Terbitnya regulasi tentang tata kelola kelembagaan dan tarif jasa TKBM	85,0%	85,0%
Output 2 Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem	100,0%	100,0%
Indikator Digunakannya sistem aplikasi prasarajat SSm Pengangkut di 14 Pelabuhan	100,0%	100,0%
Output 3 Perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan	50,0%	100,0%
Indikator Menguatnya pengawasan terhadap layanan jasa kepelabuhanan melalui pembentukan mekanisme koordinasi dan komunikasi CIQP	50,0%	100,0%
Output 4 Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK	100,0%	100,0%
Indikator Tersediannya Layanan SSm Pengangkut	100,0%	100,0%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	79,5%	79,5%
Output 1 Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)	70,0%	70,0%
Indikator Satker Kumham di 212 Wilayah Implementasi telah mengirimkan data penanganan perkara yang sesuai dengan Pedoman Pertukaran Data yang berlaku	70,0%	70,0%
Output 2 Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI	89,0%	89,0%
Indikator Satker Kumham di 212 Wilayah Implementasi telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara	89,0%	89,0%
Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	74,0%	93,8%
Output 1 Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem	85,5%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan		
Indikator • Digunakannya sistem aplikasi prasyarat SSm Pengangkut di 14 Pelabuhan • Digunakannya sistem layanan SSm QC di 14 Pelabuhan	100,0% 71,0%	100,0% 100,0%
Output 2 Perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan	25,0%	75,0%
Indikator Terimplementasinya Badan Karantina Indonesia (Kementan, KKP, dan KLHK) sebagai satu sistem tunggal yang menyatukan fungsi karantina dan pengawasan mutu	25,0%	75,0%
Output 3 Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK	100,0%	100,0%
Indikator Tersediannya Layanan SSm Quarantine Custom	100,0%	100,0%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	100,0%	100,0%
Output 1 Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan sebagai basis pengambilan kebijakan	100,0%	100,0%
Indikator Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Garam	100,0%	100,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	20,2%	20,2%
Output 1 Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	20,2%	20,2%
Indikator • Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Kalimantan Tengah • Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Kalimantan Timur • Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Papua • Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Riau • Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Sulawesi Barat	25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 1,0%	25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 1,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Kesehatan	66,7%	82,1%
Implementasi E-payment dan E-katalog	49,5%	64,5%
Output 1 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	9,0%	29,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 200 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKP atau mekanisme e-payment lainnya oleh Kementerian Kesehatan	9,0%	29,0%
Output 2 Tersedianya dan termanfaatkannya sistem informasi Pengadaan alat kesehatan	90,0%	100,0%
Indikator Tersedianya daftar informasi yang menyangkut penyedia, harga dan spesifikasi alat kesehatan	90,0%	100,0%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	68,0%	81,0%
Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	68,0%	81,0%
Indikator Integrasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan data penerima vaksin	68,0%	81,0%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	83,3%	100,0%
Output 1 Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem	100,0%	100,0%
Indikator Digunakannya sistem aplikasi prasarajat SSm Pengangkut di 14 Pelabuhan	100,0%	100,0%
Output 2 Perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan	50,0%	100,0%
Indikator Menguatnya pengawasan terhadap layanan jasa kepelabuhanan melalui pembentukan mekanisme koordinasi dan komunikasi CIQP	50,0%	100,0%
Output 3 Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK	100,0%	100,0%
Indikator Tersediannya Layanan SSm Pengangkut	100,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Kesehatan		
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	50,0%	65,0%
Output 1 Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan sebagai basis pengambilan kebijakan	50,0%	65,0%
Indikator Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Narkotika, Psikotropika, Prekursor	50,0%	65,0%
Kementerian Ketenagakerjaan	85,0%	85,0%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	85,0%	85,0%
Output 1 Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui	85,0%	85,0%
Indikator Terbitnya regulasi tentang tata kelola kelembagaan dan tarif jasa TKBM	85,0%	85,0%
Kementerian Keuangan	65,1%	80,8%
Implementasi E-payment dan E-katalog	100,0%	100,0%
Output 1 Tersedianya sistem pembayaran elektronik (e-payment) dalam Pengadaan Barang/Jasa K/L/D	100,0%	100,0%
Indikator Penetapan regulasi tentang e-payment untuk belanja online	100,0%	100,0%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	60,0%	66,7%
Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat	75,0%	80,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di K/L	75,0%	80,0%
Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	45,0%	50,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	45,0%	50,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Keuangan		
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik		
Output 3 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah	60,0%	70,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	60,0%	70,0%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)		
Output 1 Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait	37,0%	38,0%
Indikator Jumlah korporasi yang sudah mendeklarasikan BO	37,0%	38,0%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK		
Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak	72,0%	72,0%
Indikator <ul style="list-style-type: none"> Jumlah penerimaan pajak hasil analisa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Jumlah wajib pajak hasil analisa integrasi data pelayanan publik berbasis NIK 	72,0% 72,0%	72,0% 72,0%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan		
Output 1 Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah	50,0%	50,0%
Indikator Terbitnya regulasi tentang layanan jasa kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan Pusat dan Daerah	50,0%	50,0%
Output 2 Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem		
Indikator Digunakannya sistem aplikasi prasyarat SSm Pengangkut di 14 Pelabuhan	100,0%	100,0%
Digunakannya sistem layanan autogate di 14 Pelabuhan	71,0%	100,0%
Digunakannya sistem layanan DO Online di 14 Pelabuhan	86,0%	100,0%
Digunakannya sistem layanan payment dengan single billing di 14 Pelabuhan	0,0%	45,0%
Digunakannya sistem layanan SP2 Online di 14 Pelabuhan	65,0%	100,0%
Digunakannya sistem layanan SSm QC di 14 Pelabuhan	71,0%	100,0%
Digunakannya sistem layanan trucking di 14 Pelabuhan	30,0%	54,0%
Digunakannya sistem layanan vessel domestik di 14 Pelabuhan	70,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Keuangan		
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan		
Output 3 Perbaiki birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan	35,0%	75,0%
Indikator		
• Menguatnya pengawasan terhadap layanan jasa kepelabuhanan melalui pembentukan mekanisme koordinasi dan komunikasi CIQP	50,0%	100,0%
• Tersedianya standar layanan jasa kepelabuhanan yang dikelola non pemerintah oleh otoritas/penyelenggara pelabuhan	20,0%	50,0%
Output 4 Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK	82,5%	100,0%
Indikator		
• Tersediannya Layanan SSm Pengangkut	100,0%	100,0%
• Tersediannya Layanan SSm Quarantine Custom	100,0%	100,0%
• Tersedianya layanan autogate system	100,0%	100,0%
• Tersedianya layanan DO Online	100,0%	100,0%
• Tersedianya layanan payment dengan single billing	70,0%	100,0%
• Tersedianya layanan SP2 Online	100,0%	100,0%
• Tersedianya layanan trucking	40,0%	100,0%
• Tersedianya layanan vessel domestik	50,0%	100,0%
Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum	67,0%	67,0%
Output 1 Peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor	34,0%	34,0%
Indikator Ditetapkannya kebijakan tentang penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor	34,0%	34,0%
Output 2 Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi	100,0%	100,0%
Indikator Diusulkan dan dirumuskannya kebijakan kenaikan remunerasi bagi Aparat Penegak Hukum (APH)	100,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya	58,3%	70,0%
Output 1 Memaksimalkan potensi cukai Hasil Tembakau	50,0%	50,0%
Indikator Memaksimalkan potensi cukai dari produsen rokok (HT)	50,0%	50,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Keuangan		
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya		
Output 2 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi subsektor SDA	62,5%	80,0%
Indikator		
• Regulasi hasil penyesuaian untuk intensifikasi penerimaan negara dari royalti batubara dan Kompensasi Denda DMO untuk subsektor batubara tersedia Proses layanan dari mulai permohonan, penetapan tarif, pembayaran sampai dengan pelaporan telah terintegrasi.	75,0%	85,0%
• Regulasi hasil penyesuaian untuk intensifikasi penerimaan negara dari royalti untuk subsektor mineral tersedia. Proses layanan dari mulai permohonan, penetapan tarif, pembayaran sampai dengan pelaporan telah terintegrasi	50,0%	75,0%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	71,4%	91,4%
Output 1 Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan sebagai basis pengambilan kebijakan	71,4%	91,4%
Indikator		
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Bawang Putih	25,0%	75,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Beras	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Daging	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Garam	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Gula	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Jagung	25,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Narkotika, Psikotropika, Prekursor	50,0%	65,0%
Percepatan Implementasi SPBE	47,5%	57,5%
Output 1 Meningkatnya penggunaan aplikasi umum oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	15,0%	25,0%
Indikator Jumlah aplikasi umum yang ditetapkan Tim Koordinasi SPBE	15,0%	25,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Keuangan		
Percepatan Implementasi SPBE		
Output 2 Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional	75,0%	100,0%
Indikator Ditetapkannya Perpres tentang Arsitektur SPBE	75,0%	100,0%
Output 3 Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional	50,0%	52,5%
Indikator <ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya PermenPANRB tentang Peta Rencana SPBE Nasional Jumlah K/L/D yang memiliki Peta Rencana SPBE yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional - 10 K/L (B21) - 50 Pemda (B21) 	70,0% 30,0%	75,0% 30,0%
Kementerian Komunikasi dan Informatika	46,5%	58,7%
Implementasi E-payment dan E-katalog	16,0%	26,0%
Output 1 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	16,0%	26,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 200 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKP atau mekanisme e-payment lainnya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika	16,0%	26,0%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	60,0%	65,0%
Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat	75,0%	80,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di K/L	75,0%	80,0%
Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	45,0%	50,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	45,0%	50,0%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	80,0%	80,0%
Output 1 Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI	80,0%	80,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Komunikasi dan Informatika		
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana		
Indikator Sistem pertukaran dan pemanfaatan data bisa berfungsi dan beroperasi dengan baik	80,0%	80,0%
Percepatan Implementasi SPBE	42,1%	58,6%
Output 1 Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR!	42,5%	75,0%
Indikator <ul style="list-style-type: none"> Diterapkannya aplikasi SP4N LAPOR versi 3.2 lanjutan Prosentase aplikasi instansi yang telah terintegrasi/terkonsolidasi dengan SP4N LAPOR! 	25,0% 60,0%	75,0% 75,0%
Output 2 Meningkatnya penggunaan aplikasi umum oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	15,0%	25,0%
Indikator Jumlah aplikasi umum yang ditetapkan Tim Koordinasi SPBE	15,0%	25,0%
Output 3 Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional	47,5%	65,0%
Indikator <ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya Perpres tentang Arsitektur SPBE Jumlah K/L/D yang memiliki Arsitektur SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional - 10 K/L (B21) - 50 Pemda (B21) 	75,0% 20,0%	100,0% 30,0%
Output 4 Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional	50,0%	52,5%
Indikator <ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya PermenPANRB tentang Peta Rencana SPBE Nasional Jumlah K/L/D yang memiliki Peta Rencana SPBE yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional - 10 K/L (B21) - 50 Pemda (B21) 	70,0% 30,0%	75,0% 30,0%
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	67,1%	90,0%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	67,1%	90,0%
Output 1 Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah	50,0%	50,0%
Indikator Terbitnya regulasi tentang layanan jasa kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan Pusat dan Daerah	50,0%	50,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi		
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan		
Output 2 Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui	85,0%	85,0%
Indikator Terbitnya regulasi tentang tata kelola kelembagaan dan tarif jasa TKBM	85,0%	85,0%
Output 3 Perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan	36,3%	81,3%
Indikator		
• Menguatnya pengawasan terhadap layanan jasa kepelabuhanan melalui pembentukan mekanisme koordinasi dan komunikasi CIQP	50,0%	100,0%
• Terimplementasinya Badan Karantina Indonesia (Kementan, KKP, dan KLHK) sebagai satu sistem tunggal yang menyatukan fungsi karantina dan pengawasan mutu	25,0%	75,0%
• Tersedianya standar layanan jasa kepelabuhanan yang dikelola non pemerintah oleh otoritas/penyelenggara pelabuhan	20,0%	50,0%
• Terwujudnya satu sistem layanan operator pelabuhan dengan pengawasan melekat dalam sistem layanan	50,0%	100,0%
Output 4 Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK	82,5%	100,0%
Indikator		
Tersedianya Layanan SSm Pengangkut	100,0%	100,0%
Tersedianya Layanan SSm Quarantine Custom	100,0%	100,0%
Tersedianya layanan autogate system	100,0%	100,0%
Tersedianya layanan DO Online	100,0%	100,0%
Tersedianya layanan payment dengan single billing	70,0%	100,0%
Tersedianya layanan SP2 Online	100,0%	100,0%
Tersedianya layanan trucking	40,0%	100,0%
Tersedianya layanan vessel domestik	50,0%	100,0%
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan		
Output 1 Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah	50,0%	50,0%
Indikator Terbitnya regulasi tentang layanan jasa kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan Pusat dan Daerah	50,0%	50,0%
Output 2 Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK	82,5%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan		
Indikator		
• Tersediannya Layanan SSm Pengangkut	100,0%	100,0%
• Tersediannya Layanan SSm Quarantine Custom	100,0%	100,0%
• Tersediannya layanan autogate system	100,0%	100,0%
• Tersediannya layanan DO Online	100,0%	100,0%
• Tersediannya layanan payment dengan single billing	70,0%	100,0%
• Tersediannya layanan SP2 Online	100,0%	100,0%
• Tersediannya layanan trucking	40,0%	100,0%
• Tersediannya layanan vessel domestik	50,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya	50,0%	50,0%
Output 1		
Memaksimalkan potensi cukai Hasil Tembakau	50,0%	50,0%
Indikator		
Memaksimalkan potensi cukai dari produsen rokok (HT)	50,0%	50,0%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	75,0%	95,8%
Output 1		
Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan sebagai basis pengambilan kebijakan	75,0%	95,8%
Indikator		
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Bawang Putih	25,0%	75,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Beras	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Daging	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Garam	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Gula	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Jagung	25,0%	100,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	25,5%	25,5%
Output 1		
Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	25,5%	25,5%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		
Percepatan implementasi kebijakan satu peta		
Indikator		
• 28 rekomendasi tersedia	1,0%	1,0%
• 4 PITTI tersedia	50,0%	50,0%
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	51,8%	55,3%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	51,8%	55,3%
Output 1 Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI	90,0%	90,0%
Indikator		
• Sistem pertukaran dan pemanfaatan data bisa berfungsi dan beroperasi dengan baik	80,0%	80,0%
• Tersedianya sistem database BNN untuk SPPT TI	100,0%	100,0%
Output 2 Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)	47,0%	52,6%
Indikator		
• Satker Kejagung di 212 Wilayah Implementasi telah mengirimkan data penanganan perkara yang sesuai dengan Pedoman Pertukaran Data yang berlaku	53,0%	62,0%
• Satker KPK telah mengirimkan data penanganan perkara yang sesuai dengan Pedoman Pertukaran Data yang berlaku	17,0%	17,0%
• Satker Kumham di 212 Wilayah Implementasi telah mengirimkan data penanganan perkara yang sesuai dengan Pedoman Pertukaran Data yang berlaku	70,0%	70,0%
• Satker MA di 210 Wilayah Implementasi telah mengirimkan data penanganan perkara yang sesuai dengan Pedoman Pertukaran Data yang berlaku	52,0%	63,0%
• Satker POLRI di 212 Wilayah Implementasi telah mengirimkan data penanganan perkara yang sesuai dengan Pedoman Pertukaran Data yang berlaku	43,0%	51,0%
Output 3 Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI	41,2%	44,2%
Indikator		
• Satker Kejagung di 212 Wilayah Implementasi telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara	62,0%	62,0%
• Satker KPK telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara	0,0%	0,0%
• Satker Kumham di 212 Wilayah Implementasi telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara	89,0%	89,0%
• Satker MA di 210 Wilayah Implementasi telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara	46,0%	59,0%
• Satker POLRI di 212 Wilayah Implementasi telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara	9,0%	11,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	59,0%	59,8%
Implementasi E-payment dan E-katalog	37,0%	38,5%
Output 1 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	37,0%	38,5%
Indikator		
• 10% pengadaan langsung dibawah 200 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKP atau mekanisme e-payment lainnya oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	50,0%	53,0%
• Meningkatkan jumlah UMKM yang menjadi penyedia di PPMSE Bela Pengadaan	24,0%	24,0%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	37,0%	38,0%
Output 1 Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait	37,0%	38,0%
Indikator Jumlah korporasi yang sudah mendeklarasikan BO	37,0%	38,0%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	99,0%	99,0%
Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	99,0%	99,0%
Indikator Jumlah ketepatan penerima BPUM tahun 2021 sesuai dengan data kependudukan	99,0%	99,0%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	85,0%	85,0%
Output 1 Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui	85,0%	85,0%
Indikator Terbitnya regulasi tentang tata kelola kelembagaan dan tarif jasa TKBM	85,0%	85,0%
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38,6%	42,5%
Implementasi E-payment dan E-katalog	9,0%	13,0%
Output 1 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	9,0%	13,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 200 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKP atau mekanisme e-payment lainnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9,0%	13,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	51,0%	56,5%
Output 1 Termanfatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa	65,0%	75,0%
Indikator Jumlah pengajuan izin sektor ekstraktif dan perkebunan yang data BO nya diverifikasi oleh Pemberi izin	65,0%	75,0%
Output 2 Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait	37,0%	38,0%
Indikator Jumlah korporasi yang sudah mendeklarasikan BO	37,0%	38,0%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	25,0%	75,0%
Output 1 Perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan	25,0%	75,0%
Indikator Terimplementasinya Badan Karantina Indonesia (Kementan, KKP, dan KLHK) sebagai satu sistem tunggal yang menyatukan fungsi karantina dan pengawasan mutu	25,0%	75,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	39,8%	40,4%
Output 1 Ditetapkannya kawasan hutan 100%	9,0%	17,0%
Indikator Luas PKH di 5 Provinsi: Prov. Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Papua	9,0%	17,0%
Output 2 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	42,0%	42,1%
Indikator		
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Selatan	80,0%	80,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Timur	47,0%	47,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Utara	62,0%	62,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Gunung Mas	49,0%	49,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kapuas	60,0%	60,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Katingan	44,0%	44,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kotawaringin Barat	17,0%	17,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kotawaringin Timur	39,0%	40,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Lamandau	7,0%	7,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Murung Raya	79,0%	79,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Palangkaraya	35,0%	35,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Pulang pisau	33,0%	33,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Seruyan	26,0%	26,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Sukamara	10,0%	10,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,0%	1,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	1,0%	1,0%
Output 1 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	1,0%	1,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 200 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKP atau mekanisme e-payment lainnya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,0%	1,0%
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	72,7%	89,3%
Implementasi E-payment dan E-katalog	72,7%	89,3%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Jumlah pembelanjaan secara online (purchase order) pada katalog sektoral di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	68,0%	68,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 200 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKP atau mekanisme e-payment lainnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	68,0%	68,0%
Output 3 Tersedia dan termanfaatkannya sistem informasi pengadaan barang/jasa konstruksi	50,0%	100,0%
Indikator Tersedianya daftar informasi menyangkut penyedia, harga dan spesifikasi barang	50,0%	100,0%
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	54,8%	64,3%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	60,0%	66,7%
Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat	75,0%	80,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di K/L	75,0%	80,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik		
Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	45,0%	50,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	45,0%	50,0%
Output 3 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah	60,0%	70,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	60,0%	70,0%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	25,0%	75,0%
Output 1 Perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan	25,0%	75,0%
Indikator Terimplementasinya Badan Karantina Indonesia (Kementan, KKP, dan KLHK) sebagai satu sistem tunggal yang menyatukan fungsi karantina dan pengawasan mutu	25,0%	75,0%
Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum	84,0%	84,0%
Output 1 Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi	84,0%	84,0%
Indikator		
• Ditetapkan kebijakan pola karier yang mengatur pemberian penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi di Kejaksaan Agung berupa ; a.) dimasukkan dalam talent pool; b.) kenaikan pangkat istimewa	88,0%	88,0%
• Ditetapkan kebijakan pola karier yang mengatur pemberian penghargaan bagi APH yang berprestasi di Kepolisian RI berupa ; a.) dimasukkan dalam talent pool; b.) kenaikan pangkat istimewa.	86,0%	86,0%
• Ditetapkan kebijakan pola karier yang mengatur pemberian penghargaan bagi APH yang berprestasi di KPK berupa ; a.) dimasukkan dalam talent pool; b.) kenaikan pangkat istimewa.	62,0%	62,0%
• Diusulkan dan dirumuskannya kebijakan kenaikan remunerasi bagi Aparat Penegak Hukum (APH)	100,0%	100,0%
Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Program Pembangunan	57,5%	58,8%
Output 1 Penguatan independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk peningkatan kelas jabatan fungsional APIP	100,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan Program Pembangunan		
Indikator		
• Penetapan kelas jabatan fungsional auditor	100,0%	100,0%
• Penetapan kelas jabatan fungsional PPUPD	100,0%	100,0%
Output 2		
Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	15,0%	17,5%
Indikator		
• Jumlah SDM Auditor yang terpenuhi sesuai usulan	15,0%	20,0%
• Jumlah SDM PPUPD yang terpenuhi sesuai usulan	15,0%	15,0%
Percepatan Implementasi SPBE	40,6%	55,0%
Output 1		
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpadu melalui SP4N LAPOR!	38,3%	60,0%
Indikator		
• Diterapkannya aplikasi SP4N LAPOR versi 3.2 lanjutan	25,0%	75,0%
• Ditetapkannya dan tersedianya jabatan fungsional analisis pengelola pengaduan	30,0%	30,0%
• Prosentase aplikasi instansi yang telah terintegrasi/terkonsolidasi dengan SP4N LAPOR!	60,0%	75,0%
Output 2		
Meningkatnya penggunaan aplikasi umum oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	15,0%	25,0%
Indikator		
Jumlah aplikasi umum yang ditetapkan Tim Koordinasi SPBE	15,0%	25,0%
Output 3		
Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional	47,5%	65,0%
Indikator		
• Ditetapkannya Perpres tentang Arsitektur SPBE	75,0%	100,0%
• Jumlah K/L/D yang memiliki Arsitektur SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional - 10 K/L (B21) - 50 Pemda (B21)	20,0%	30,0%
Output 4		
Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional	50,0%	52,5%
Indikator		
• Ditetapkannya PermenPANRB tentang Peta Rencana SPBE Nasional	70,0%	75,0%
• Jumlah K/L/D yang memiliki Peta Rencana SPBE yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional - 10 K/L (B21) - 50 Pemda (B21)	30,0%	30,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	57,5%	61,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	57,5%	61,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Jumlah pembelanjaan secara online (purchase order) pada katalog sektoral di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	15,0%	22,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 200 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKP atau mekanisme e-payment lainnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	15,0%	22,0%
Kementerian Perdagangan	67,4%	90,3%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	37,0%	38,0%
Output 1 Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait	37,0%	38,0%
Indikator Jumlah korporasi yang sudah mendeklarasikan BO	37,0%	38,0%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	60,0%	100,0%
Output 1 Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem	70,0%	100,0%
Indikator Digunakannya sistem layanan vessel domestik di 14 Pelabuhan	70,0%	100,0%
Output 2 Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK	50,0%	100,0%
Indikator Tersedianya layanan vessel domestik	50,0%	100,0%
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	75,0%	95,8%
Output 1 Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan sebagai basis pengambilan kebijakan	75,0%	95,8%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Perdagangan		
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan		
Indikator		
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Bawang Putih	25,0%	75,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Beras	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Daging	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Garam	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Gula	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Jagung	25,0%	100,0%
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas	48,8%	57,5%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	60,0%	66,7%
Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat	75,0%	80,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di K/L	75,0%	80,0%
Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	45,0%	50,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	45,0%	50,0%
Output 3 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah	60,0%	70,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	60,0%	70,0%
Percepatan Implementasi SPBE	42,0%	52,0%
Output 1 Meningkatnya penggunaan aplikasi umum oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	15,0%	25,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas		
Percepatan Implementasi SPBE		
Indikator Jumlah aplikasi umum yang ditetapkan Tim Koordinasi SPBE	15,0%	25,0%
Output 2 Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional	47,5%	65,0%
Indikator <ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya Perpres tentang Arsitektur SPBE Jumlah K/L/D yang memiliki Arsitektur SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional - 10 K/L (B21) - 50 Pemda (B21) 	75,0% 20,0%	100,0% 30,0%
Output 3 Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional	50,0%	52,5%
Indikator <ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya PermenPANRB tentang Peta Rencana SPBE Nasional Jumlah K/L/D yang memiliki Peta Rencana SPBE yang mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional - 10 K/L (B21) - 50 Pemda (B21) 	70,0% 30,0%	75,0% 30,0%
Kementerian Perhubungan	65,2%	86,7%
Implementasi E-payment dan E-katalog	50,5%	53,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Jumlah pembelanjaan secara online (purchase order) pada katalog sektoral di Kementerian Perhubungan	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	1,0%	6,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 200 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKP atau mekanisme e-payment lainnya oleh Kementerian Perhubungan	1,0%	6,0%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	67,5%	88,5%
Output 1 Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah	50,0%	50,0%
Indikator Terbitnya regulasi tentang layanan jasa kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan Pusat dan Daerah	50,0%	50,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Perhubungan		
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan		
Output 2 Diberlakukannya regulasi tentang tata kelola TKBM yang sudah perbaharui	85,0%	85,0%
Indikator Terbitnya regulasi tentang tata kelola kelembagaan dan tarif jasa TKBM	85,0%	85,0%
Output 3 Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem	66,7%	84,7%
Indikator		
• Digunakannya sistem aplikasi prasyarat SSm Pengangkut di 14 Pelabuhan	100,0%	100,0%
• Digunakannya sistem layanan trucking di 14 Pelabuhan	30,0%	54,0%
• Digunakannya sistem layanan vessel domestik di 14 Pelabuhan	70,0%	100,0%
Output 4 Perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan	40,0%	83,3%
Indikator		
• Menguatnya pengawasan terhadap layanan jasa kepelabuhanan melalui pembentukan mekanisme koordinasi dan komunikasi CIQP	50,0%	100,0%
• Tersedianya standar layanan jasa kepelabuhanan yang dikelola non pemerintah oleh otoritas/penyelenggara pelabuhan	20,0%	50,0%
• Terwujudnya satu sistem layanan operator pelabuhan dengan pengawasan melekat dalam sistem layanan	50,0%	100,0%
Output 5 Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK	81,7%	100,0%
Indikator		
• Tersediannya Layanan SSm Pengangkut	100,0%	100,0%
• Tersedianya layanan autogate system	100,0%	100,0%
• Tersedianya layanan DO Online	100,0%	100,0%
• Tersedianya layanan SP2 Online	100,0%	100,0%
• Tersedianya layanan trucking	40,0%	100,0%
• Tersedianya layanan vessel domestik	50,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya	65,0%	88,8%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	65,0%	88,8%
Indikator		
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Blitar	100,0%	100,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Boyolali	50,0%	100,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Indramayu	50,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Perhubungan		
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya		
Indikator		
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Kampar	25,0%	25,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Kutai Kartanegara	50,0%	100,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Lombok Timur	100,0%	100,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Mimika	50,0%	50,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Semarang	100,0%	100,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Sleman	100,0%	100,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Tangerang	50,0%	100,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Banjarmasin	50,0%	100,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Depok	100,0%	100,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Lubuk Linggau	25,0%	50,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Makasar	50,0%	100,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Padang	50,0%	50,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Palangkaraya	50,0%	100,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Palembang	50,0%	100,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Pekanbaru	100,0%	100,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Pontianak	50,0%	100,0%
• Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Wonogiri	100,0%	100,0%
Kementerian Perindustrian	69,0%	74,7%
Implementasi E-payment dan E-katalog	7,0%	24,0%
Output 1 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	7,0%	24,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 200 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKP atau mekanisme e-payment lainnya oleh Kementerian Perindustrian	7,0%	24,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Perindustrian		
Perbaiki tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	100,0%	100,0%
Output 2 Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan sebagai basis pengambilan kebijakan	100,0%	100,0%
Indikator		
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Garam	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Gula	100,0%	100,0%
Kementerian Pertahanan	40,0%	50,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	40,0%	50,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	80,0%	100,0%
Indikator Jumlah pembelian secara online (purchase order) pada katalog sektoral di Kementerian Pertahanan	80,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	0,0%	0,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 200 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKP atau mekanisme e-payment lainnya oleh Kementerian Pertahanan	0,0%	0,0%
Kementerian Pertanian	57,3%	61,3%
Implementasi E-payment dan E-katalog	51,0%	53,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Jumlah pembelian secara online (purchase order) pada katalog sektoral di Kementerian Pertanian	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	2,0%	6,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 200 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKP atau mekanisme e-payment lainnya oleh Kementerian Pertanian	2,0%	6,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Pertanian		
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	51,0%	56,5%
Output 1 Termanfatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa	65,0%	75,0%
Indikator Jumlah pengajuan izin sektor ekstraktif dan perkebunan yang data BO nya diverifikasi oleh Pemberi izin	65,0%	75,0%
Output 2 Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait	37,0%	38,0%
Indikator Jumlah korporasi yang sudah mendeklarasikan BO	37,0%	38,0%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	66,0%	66,0%
Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	66,0%	66,0%
Indikator Jumlah ketepatan penyaluran subsidi pupuk menggunakan kartu tani atau metode verifikasi sesuai data kependudukan	66,0%	66,0%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	74,0%	93,8%
Output 1 Diterapkannya pelayanan kepelabuhanan berbasis sistem dan teknologi dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko melekat di sistem	85,5%	100,0%
Indikator <ul style="list-style-type: none"> Digunakannya sistem aplikasi prasarana SSm Pengangkut di 14 Pelabuhan Digunakannya sistem layanan SSm QC di 14 Pelabuhan 	100,0% 71,0%	100,0% 100,0%
Output 2 Perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan	25,0%	75,0%
Indikator Terimplementasinya Badan Karantina Indonesia (Kementan, KKP, dan KLHK) sebagai satu sistem tunggal yang menyatukan fungsi karantina dan pengawasan mutu	25,0%	75,0%
Output 3 Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK	100,0%	100,0%
Indikator Tersediannya Layanan SSm Quarantine Custom	100,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Pertanian		
Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan	70,0%	95,0%
Output 1 Tersedia dan termanfaatkannya data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional dan data realisasi import yang valid, dapat diandalkan dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis (bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam) dan kesehatan sebagai basis pengambilan kebijakan	70,0%	95,0%
Indikator		
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Bawang Putih	25,0%	75,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Beras	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Daging	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Gula	100,0%	100,0%
• Validitas data Ketersediaan (produksi + stok) nasional, kebutuhan nasional dan data realisasi import untuk komoditas: Jagung	25,0%	100,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	55,5%	56,8%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	42,0%	42,1%
Indikator		
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Selatan	80,0%	80,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Timur	47,0%	47,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Utara	62,0%	62,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Gunung Mas	49,0%	49,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kapuas	60,0%	60,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Katingan	44,0%	44,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kotawaringin Barat	17,0%	17,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Kotawaringin Timur	39,0%	40,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Lamandau	7,0%	7,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Murung Raya	79,0%	79,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Palangkaraya	35,0%	35,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Pulang pisau	33,0%	33,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Seruyan	26,0%	26,0%
• Jumlah tindak lanjut lokus di Sukamara	10,0%	10,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	59,4%	61,1%
Indikator		
• Integrasi ILOK di Bengkalis	56,0%	56,0%
• Integrasi ILOK di Berau	93,0%	93,0%
• Integrasi ILOK di Boven Digoel	70,0%	70,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Pertanian		
Percepatan implementasi kebijakan satu peta		
Indikator		
• Integrasi ILOK di Indragiri Hilir	52,0%	52,0%
• Integrasi ILOK di Indragiri Hulu	36,0%	36,0%
• Integrasi ILOK di Jayapura	70,0%	70,0%
• Integrasi ILOK di Kampar	28,0%	28,0%
• Integrasi ILOK di Kuantan Singingi	34,0%	34,0%
• Integrasi ILOK di Kutai Barat	100,0%	100,0%
• Integrasi ILOK di Kutai Kartanegara	96,0%	96,0%
• Integrasi ILOK di Mahakam Ulu	100,0%	100,0%
• Integrasi ILOK di Mamuju Tengah	83,0%	83,0%
• Integrasi ILOK di Mappi	70,0%	70,0%
• Integrasi ILOK di Mimika	89,0%	89,0%
• Integrasi ILOK di Nabire	70,0%	70,0%
• Integrasi ILOK di Pasangkayu	30,0%	50,0%
• Integrasi ILOK di Pekanbaru	57,0%	70,0%
• Integrasi ILOK di Pelalawan	37,0%	45,0%
• Integrasi ILOK di Penajam Paser Utara	75,0%	75,0%
• Integrasi ILOK di Rokan Hilir	36,0%	36,0%
• Integrasi ILOK di Rokan Hulu	58,0%	62,0%
• Integrasi ILOK di Sarmi	70,0%	70,0%
• Integrasi ILOK di Siak	37,0%	37,0%
• Integrasi IUP di Bengkalis	29,0%	29,0%
• Integrasi IUP di Berau	96,0%	96,0%
• Integrasi IUP di Boven Digoel	70,0%	70,0%
• Integrasi IUP di Indragiri Hilir	46,0%	46,0%
• Integrasi IUP di Indragiri Hulu	32,0%	32,0%
• Integrasi IUP di Jayapura	70,0%	70,0%
• Integrasi IUP di Kampar	38,0%	38,0%
• Integrasi IUP di Kuantan Singingi	18,0%	18,0%
• Integrasi IUP di Kutai Barat	100,0%	100,0%
• Integrasi IUP di Kutai Kartanegara	48,0%	48,0%
• Integrasi IUP di Kutai Timur	100,0%	100,0%
• Integrasi IUP di Mahakam Ulu	100,0%	100,0%
• Integrasi IUP di Mamuju Tengah	38,0%	38,0%
• Integrasi IUP di Mappi	100,0%	100,0%
• Integrasi IUP di Merauke	70,0%	70,0%
• Integrasi IUP di Mimika	70,0%	70,0%
• Integrasi IUP di Nabire	70,0%	70,0%
• Integrasi IUP di Pasangkayu	38,0%	50,0%
• Integrasi IUP di Pekanbaru	57,0%	70,0%
• Integrasi IUP di Pelalawan	30,0%	41,0%
• Integrasi IUP di Penajam Paser Utara	28,0%	28,0%
• Integrasi IUP di Rokan Hilir	14,0%	14,0%
• Integrasi IUP di Rokan Hulu	53,0%	53,0%
• Integrasi IUP di Sarmi	70,0%	70,0%
• Integrasi IUP di Siak	19,0%	19,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kementerian Sosial	74,3%	74,3%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektorial Berbasis NIK	74,3%	74,3%
Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	74,3%	74,3%
Indikator		
• Integrasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan data penerima bansos	68,0%	68,0%
• Jumlah ketepatan DTKS dan data penerima bansos Kemensos sesuai data kependudukan dan sesuai kriteria kemiskinan	99,0%	99,0%
• Jumlah ketepatan PBI JKN sesuai data kependudukan dan sesuai DTKS	100,0%	100,0%
• Jumlah ketepatan penerima subsidi listrik dan elpiji sesuai dengan data kependudukan dan sesuai DTKS	30,0%	30,0%
Kepolisian Negara Republik Indonesia	43,9%	52,6%
Implementasi E-payment dan E-katalog	10,0%	40,5%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	20,0%	80,0%
Indikator Jumlah pembelanjaan secara online (purchase order) pada katalog sektorial di Kepolisian Negara Republik Indonesia	20,0%	80,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	0,0%	1,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 200 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKP atau mekanisme e-payment lainnya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,0%	1,0%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektorial Berbasis NIK	57,5%	61,0%
Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	43,0%	50,0%
Indikator Integrasi dan sinkronisasi data kependudukan dengan data kepemilikan kendaraan	43,0%	50,0%
Output 2 Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak	72,0%	72,0%
Indikator Jumlah penerimaan pajak hasil analisa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak	72,0%	72,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum	69,3%	69,3%
Output 1 Peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor	22,0%	22,0%
Indikator Ditetapkannya kebijakan tentang penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor	22,0%	22,0%
Output 2 Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi	93,0%	93,0%
Indikator		
• Ditetapkan kebijakan pola karier yang mengatur pemberian penghargaan bagi APH yang berprestasi di Kepolisian RI berupa ; a.) dimasukkan dalam talent pool; b.) kenaikan pangkat istimewa.	86,0%	86,0%
• Diusulkan dan dirumuskannya kebijakan kenaikan remunerasi bagi Aparat Penegak Hukum (APH)	100,0%	100,0%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	26,0%	31,0%
Output 1 Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)	43,0%	51,0%
Indikator Satker POLRI di 212 Wilayah Implementasi telah mengirimkan data penanganan perkara yang sesuai dengan Pedoman Pertukaran Data yang berlaku	43,0%	51,0%
Output 2 Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI	9,0%	11,0%
Indikator Satker POLRI di 212 Wilayah Implementasi telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara	9,0%	11,0%
Komisi Pemberantasan Korupsi	35,6%	37,6%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	50,0%	60,0%
Output 1 Termanfatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa	50,0%	60,0%
Indikator Jumlah akses layer APH untuk kebutuhan penegakan hukum	50,0%	60,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Komisi Pemberantasan Korupsi		
Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum	55,5%	55,5%
Output 1 Peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor	49,0%	49,0%
Indikator Ditetapkannya kebijakan tentang penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara Tipikor	49,0%	49,0%
Output 2 Peningkatan kesejahteraan dan penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi	62,0%	62,0%
Indikator Ditetapkan kebijakan pola karier yang mengatur pemberian penghargaan bagi APH yang berprestasi di KPK berupa ; a.) dimasukan dalam talent pool; b.) kenaikan pangkat istimewa	62,0%	62,0%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	8,5%	8,5%
Output 1 Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)	17,0%	17,0%
Indikator Satker KPK telah mengirimkan data penanganan perkara yang sesuai dengan Pedoman Pertukaran Data yang berlaku	17,0%	17,0%
Output 2 Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI	0,0%	0,0%
Indikator Satker KPK telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara	0,0%	0,0%
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	67,4%	84,3%
Implementasi E-payment dan E-katalog	69,8%	88,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	70,6%	90,0%
Indikator		
• Pembelian 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Aceh	80,0%	100,0%
• Pembelian 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Bali	100,0%	100,0%
• Pembelian 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Bangka Belitung	60,0%	100,0%
• Pembelian 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Banten	100,0%	100,0%
• Pembelian 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Bengkulu	40,0%	100,0%
• Pembelian 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov DIY	100,0%	100,0%
• Pembelian 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov DKI Jakarta	100,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
Implementasi E-payment dan E-katalog		
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Gorontalo • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Jambi • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Jawa Barat • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Jawa Tengah • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Jawa Timur • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Kalimantan Barat • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Kalimantan Selatan • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Kalimantan Tengah • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Kalimantan Timur • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Kalimantan Utara • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Kepulauan Riau • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Lampung • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Maluku • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Maluku Utara • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov NTB • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Nusa Tenggara Timur • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Papua • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Papua Barat • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Riau • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sulawesi Barat • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sulawesi Selatan • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sulawesi Tengah • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sulawesi Tenggara • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sulawesi Utara • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sumatera Barat • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sumatera Selatan • Pembelianjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sumatera Utara 	<p>80,0% 20,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 40,0% 100,0% 100,0% 60,0% 100,0% 80,0% 20,0% 40,0% 80,0% 80,0% 40,0% 20,0% 40,0% 60,0% 100,0% 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%</p>	<p>100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 40,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 20,0% 40,0% 100,0% 20,0% 20,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%</p>
Output 2		
Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	42,0%	48,5%
Indikator		
• Meningkatkan jumlah UMKM yang menjadi penyedia di PPMSE Bela Pengadaan	24,0%	24,0%
• Monitoring progres implementasi Bela Pengadaan	60,0%	73,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
Implementasi E-payment dan E-katalog		
Output 3 Tersedianya sistem pembayaran elektronik (e-payment) dalam Pengadaan Barang/Jasa K/L/D	100,0%	100,0%
Indikator Penetapan regulasi tentang e-payment untuk belanja online	100,0%	100,0%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik		
Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat	75,0%	80,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di K/L	75,0%	80,0%
Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	45,0%	50,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	45,0%	50,0%
Output 3 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah	60,0%	70,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	60,0%	70,0%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)		
Output 1 Termanfatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah vendor yang telah mendeklarasikan data BOnya pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)	1,0%	1,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Mahkamah Agung	49,0%	61,0%
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana	49,0%	61,0%
Output 1 Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)	52,0%	63,0%
Indikator Satker MA di 210 Wilayah Implementasi telah mengirimkan data penanganan perkara yang sesuai dengan Pedoman Pertukaran Data yang berlaku	52,0%	63,0%
Output 2 Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI	46,0%	59,0%
Indikator Satker MA di 210 Wilayah Implementasi telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara	46,0%	59,0%
Otoritas Jasa Keuangan	37,0%	38,0%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	37,0%	38,0%
Output 1 Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait	37,0%	38,0%
Indikator Jumlah korporasi yang sudah mendeklarasikan BO	37,0%	38,0%
Perusahaan Listrik Negara	30,0%	30,0%
Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK	30,0%	30,0%
Output 1 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	30,0%	30,0%
Indikator Jumlah ketepatan penerima subsidi listrik dan elpiji sesuai dengan data kependudukan dan sesuai DTKS	30,0%	30,0%
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	43,5%	49,0%
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)	43,5%	49,0%
Output 1 Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa	50,0%	60,0%
Indikator Jumlah akses layer APH untuk kebutuhan penegakan hukum	50,0%	60,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan		
Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)		
Output 2 Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait	37,0%	38,0%
Indikator Jumlah korporasi yang sudah mendeklarasikan BO	37,0%	38,0%
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	76,0%	96,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBP dan Pendapatan Lainnya	76,0%	96,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui peningkatan akuntabilitas sektor swasta	76,0%	96,0%
Indikator Meningkatnya Akuntabilitas perhitungan PNBP Migas dengan menurunkan diskrepansi dalam perhitungan penerimaan PNBP Migas	76,0%	96,0%
Sekretariat Kabinet	65,8%	90,4%
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan	65,8%	90,4%
Output 1 Diberlakukannya regulasi tentang Layanan Jasa Kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah	50,0%	50,0%
Indikator Terbitnya regulasi tentang layanan jasa kepelabuhanan yang selaras antara kewenangan Pusat dan Daerah	50,0%	50,0%
Output 2 Perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan	36,3%	81,3%
Indikator		
• Menguatnya pengawasan terhadap layanan jasa kepelabuhanan melalui pembentukan mekanisme koordinasi dan komunikasi CIQP	50,0%	100,0%
• Terimplementasinya Badan Karantina Indonesia (Kementan, KKP, dan KLHK) sebagai satu sistem tunggal yang menyatukan fungsi karantina dan pengawasan mutu	25,0%	75,0%
• Tersedianya standar layanan jasa kepelabuhanan yang dikelola non pemerintah oleh otoritas/penyelenggara pelabuhan	20,0%	50,0%
• Terwujudnya satu sistem layanan operator pelabuhan dengan pengawasan melekat dalam sistem layanan	50,0%	100,0%
Output 3 Terimplementasinya National Logistics Ecosystem (NLE) di Kawasan Pelabuhan yang menjadi target Stranas PK	82,5%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Sekretariat Kabinet		
Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan		
Indikator		
• Tersediannya Layanan SSm Pengangkut	100,0%	100,0%
• Tersediannya Layanan SSm Quarantine Custom	100,0%	100,0%
• Tersediannya layanan autogate system	100,0%	100,0%
• Tersediannya layanan DO Online	100,0%	100,0%
• Tersediannya layanan payment dengan single billing	70,0%	100,0%
• Tersediannya layanan SP2 Online	100,0%	100,0%
• Tersediannya layanan trucking	40,0%	100,0%
• Tersediannya layanan vessel domestik	50,0%	100,0%

TABEL CAPAIAN PEMERINTAH PROVINSI

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Aceh	41,0%	64,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	41,0%	64,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	80,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Aceh	80,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	2,0%	28,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Aceh	2,0%	28,0%
Pemerintah Provinsi Bali	76,3%	80,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	100,0%	100,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Bali	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	100,0%	100,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Bali	100,0%	100,0%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	52,5%	60,0%
Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	45,0%	50,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	45,0%	50,0%
Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah	60,0%	70,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	60,0%	70,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Banten	75,5%	75,5%
Implementasi E-payment dan E-katalog	75,5%	75,5%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Banten	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	51,0%	51,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Banten	51,0%	51,0%
Pemerintah Provinsi Bengkulu	34,0%	71,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	34,0%	71,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	40,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Bengkulu	40,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	28,0%	42,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu	28,0%	42,0%
Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	65,0%	68,8%
Implementasi E-payment dan E-katalog	77,5%	77,5%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov DIY	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	55,0%	55,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	55,0%	55,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta		
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	52,5%	60,0%
Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	45,0%	50,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	45,0%	50,0%
Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah	60,0%	70,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	60,0%	70,0%
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		
Implementasi E-payment dan E-katalog	100,0%	100,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov DKI Jakarta	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	100,0%	100,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100,0%	100,0%
Pemerintah Provinsi Gorontalo		
Implementasi E-payment dan E-katalog	90,0%	100,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	80,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Gorontalo	80,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	100,0%	100,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo	100,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Jambi	35,0%	75,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	35,0%	75,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	20,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Jambi	20,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	50,0%	50,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Jambi	50,0%	50,0%
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	76,3%	80,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	100,0%	100,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Jawa Barat	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	100,0%	100,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat	100,0%	100,0%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	52,5%	60,0%
Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	45,0%	50,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	45,0%	50,0%
Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah	60,0%	70,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	60,0%	70,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	76,3%	80,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	100,0%	100,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Jawa Tengah	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	100,0%	100,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	100,0%	100,0%
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	52,5%	60,0%
Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	45,0%	50,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	45,0%	50,0%
Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah	60,0%	70,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	60,0%	70,0%
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	76,3%	80,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	100,0%	100,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Jawa Timur	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	100,0%	100,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur	100,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Jawa Timur		
Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	52,5%	60,0%
Output 1 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	45,0%	50,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	45,0%	50,0%
Output 2 Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah	60,0%	70,0%
Indikator Keselarasan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penatausahaan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	60,0%	70,0%
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		
Implementasi E-payment dan E-katalog	75,0%	75,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Kalimantan Barat	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	50,0%	50,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	50,0%	50,0%
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		
Implementasi E-payment dan E-katalog	80,5%	80,5%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Kalimantan Selatan	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	61,0%	61,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	61,0%	61,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	41,8%	45,4%
Implementasi E-payment dan E-katalog	48,5%	78,5%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	40,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Kalimantan Tengah	40,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	57,0%	57,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	57,0%	57,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	40,9%	40,9%
Output 1 Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	25,0%	25,0%
Indikator Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Kalimantan Tengah	25,0%	25,0%
Output 2 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	42,0%	42,1%
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Selatan	80,0%	80,0%
Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Timur	47,0%	47,0%
Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Utara	62,0%	62,0%
Jumlah tindak lanjut lokus di Gunung Mas	49,0%	49,0%
Jumlah tindak lanjut lokus di Kapuas	60,0%	60,0%
Jumlah tindak lanjut lokus di Katingan	44,0%	44,0%
Jumlah tindak lanjut lokus di Kotawaringin Barat	17,0%	17,0%
Jumlah tindak lanjut lokus di Kotawaringin Timur	39,0%	40,0%
Jumlah tindak lanjut lokus di Lamandau	7,0%	7,0%
Jumlah tindak lanjut lokus di Murung Raya	79,0%	79,0%
Jumlah tindak lanjut lokus di Palangkaraya	35,0%	35,0%
Jumlah tindak lanjut lokus di Pulang pisau	33,0%	33,0%
Jumlah tindak lanjut lokus di Seruyan	26,0%	26,0%
Jumlah tindak lanjut lokus di Sukamara	10,0%	10,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	79,4%	79,4%
Implementasi E-payment dan E-katalog	75,0%	75,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Kalimantan Timur	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	50,0%	50,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	50,0%	50,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	80,1%	80,1%
Output 1 Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	25,0%	25,0%
Indikator Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Kalimantan Timur	25,0%	25,0%
Output 2 Terselesainya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	85,1%	85,1%
Indikator Integrasi ILOK di Berau	93,0%	93,0%
Integrasi ILOK di Kutai Barat	100,0%	100,0%
Integrasi ILOK di Kutai Kartanegara	96,0%	96,0%
Integrasi ILOK di Mahakam Ulu	100,0%	100,0%
Integrasi ILOK di Penajam Paser Utara	75,0%	75,0%
Integrasi IUP di Berau	96,0%	96,0%
Integrasi IUP di Kutai Barat	100,0%	100,0%
Integrasi IUP di Kutai Kartanegara	48,0%	48,0%
Integrasi IUP di Kutai Timur	100,0%	100,0%
Integrasi IUP di Mahakam Ulu	100,0%	100,0%
Integrasi IUP di Penajam Paser Utara	28,0%	28,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	47,0%	57,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	47,0%	57,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	60,0%	80,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Kalimantan Utara	60,0%	80,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	34,0%	34,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	34,0%	34,0%
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	37,0%	75,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	37,0%	75,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	60,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Bangka Belitung	60,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	14,0%	50,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	14,0%	50,0%
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	67,0%	75,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	67,0%	75,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Kepulauan Riau	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	34,0%	50,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	34,0%	50,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Lampung	74,5%	84,5%
Implementasi E-payment dan E-katalog	74,5%	84,5%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	80,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Lampung	80,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	69,0%	69,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Lampung	69,0%	69,0%
Pemerintah Provinsi Maluku	10,0%	20,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	10,0%	20,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	20,0%	40,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Maluku	20,0%	40,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	0,0%	0,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Maluku	0,0%	0,0%
Pemerintah Provinsi Maluku Utara	41,5%	51,5%
Implementasi E-payment dan E-katalog	41,5%	51,5%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	80,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Maluku Utara	80,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	3,0%	3,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara	3,0%	3,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	50,5%	62,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	50,5%	62,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	80,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov NTB	80,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	21,0%	24,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	21,0%	24,0%
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	32,5%	75,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	32,5%	75,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	40,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Nusa Tenggara Timur	40,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	25,0%	50,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	25,0%	50,0%
Pemerintah Provinsi Papua	62,8%	65,3%
Implementasi E-payment dan E-katalog	10,0%	30,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	20,0%	60,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Papua	20,0%	60,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	0,0%	0,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Papua	0,0%	0,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Papua		
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	70,3%	70,3%
Output 1 Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	25,0%	25,0%
Indikator Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Papua	25,0%	25,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	73,8%	73,8%
Indikator Integrasi ILOK di Boven Digoel	70,0%	70,0%
Integrasi ILOK di Jayapura	70,0%	70,0%
Integrasi ILOK di Mappi	70,0%	70,0%
Integrasi ILOK di Mimika	89,0%	89,0%
Integrasi ILOK di Nabire	70,0%	70,0%
Integrasi ILOK di Sarmi	70,0%	70,0%
Integrasi IUP di Boven Digoel	70,0%	70,0%
Integrasi IUP di Jayapura	70,0%	70,0%
Integrasi IUP di Mappi	100,0%	100,0%
Integrasi IUP di Merauke	70,0%	70,0%
Integrasi IUP di Mimika	70,0%	70,0%
Integrasi IUP di Nabire	70,0%	70,0%
Integrasi IUP di Sarmi	70,0%	70,0%
Pemerintah Provinsi Papua Barat		
Implementasi E-payment dan E-katalog	20,0%	20,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	40,0%	40,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Papua Barat	40,0%	40,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	0,0%	0,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat	0,0%	0,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Riau	40,2%	44,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	66,0%	86,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	60,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Riau	60,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	72,0%	72,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Riau	72,0%	72,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	37,8%	40,0%
Output 1 Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	25,0%	25,0%
Indikator Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Riau	25,0%	25,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	38,4%	40,8%
Indikator Integrasi ILOK di Bengkalis	56,0%	56,0%
Integrasi ILOK di Indragiri Hilir	52,0%	52,0%
Integrasi ILOK di Indragiri Hulu	36,0%	36,0%
Integrasi ILOK di Kampar	28,0%	28,0%
Integrasi ILOK di Kuantan Singingi	34,0%	34,0%
Integrasi ILOK di Pekanbaru	57,0%	70,0%
Integrasi ILOK di Pelalawan	37,0%	45,0%
Integrasi ILOK di Rokan Hilir	36,0%	36,0%
Integrasi ILOK di Rokan Hulu	58,0%	62,0%
Integrasi ILOK di Siak	37,0%	37,0%
Integrasi IUP di Bengkalis	29,0%	29,0%
Integrasi IUP di Indragiri Hilir	46,0%	46,0%
Integrasi IUP di Indragiri Hulu	32,0%	32,0%
Integrasi IUP di Kampar	38,0%	38,0%
Integrasi IUP di Kuantan Singingi	18,0%	18,0%
Integrasi IUP di Pekanbaru	57,0%	70,0%
Integrasi IUP di Pelalawan	30,0%	41,0%
Integrasi IUP di Rokan Hilir	14,0%	14,0%
Integrasi IUP di Rokan Hulu	53,0%	53,0%
Integrasi IUP di Siak	19,0%	19,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	30,0%	34,6%
Implementasi E-payment dan E-katalog	10,0%	10,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	20,0%	20,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sulawesi Barat	20,0%	20,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	0,0%	0,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	0,0%	0,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	38,0%	44,4%
Output 1 Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah dokumen integrasi RTRW-RZ Cakupan luas wilayah integrasi di Sulawesi Barat	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	47,3%	55,3%
Indikator Integrasi ILOK di Mamuju Tengah Integrasi ILOK di Pasangkayu Integrasi IUP di Mamuju Tengah Integrasi IUP di Pasangkayu	83,0% 30,0% 38,0% 38,0%	83,0% 50,0% 38,0% 50,0%
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	45,0%	75,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	45,0%	75,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	40,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sulawesi Selatan	40,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	50,0%	50,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	50,0%	50,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	35,0%	35,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	35,0%	35,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	20,0%	20,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sulawesi Tengah	20,0%	20,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	50,0%	50,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	50,0%	50,0%
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	35,0%	75,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	35,0%	75,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	20,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sulawesi Tenggara	20,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	50,0%	50,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	50,0%	50,0%
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	53,0%	53,5%
Implementasi E-payment dan E-katalog	53,0%	53,5%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sulawesi Utara	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	6,0%	7,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	6,0%	7,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	70,0%	75,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	70,0%	75,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sumatera Barat	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	40,0%	50,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	40,0%	50,0%
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	75,0%	75,0%
Implementasi E-payment dan E-katalog	75,0%	75,0%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sumatera Selatan	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	50,0%	50,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	50,0%	50,0%
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	82,5%	82,5%
Implementasi E-payment dan E-katalog	82,5%	82,5%
Output 1 Pemanfaatan e-katalog	100,0%	100,0%
Indikator Pembelanjaan 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Sumatera Utara	100,0%	100,0%
Output 2 Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi	65,0%	65,0%
Indikator 10% pengadaan langsung dibawah 50 jt dibelanjakan melalui bela pengadaan dan dibayarkan dengan KKPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	65,0%	65,0%

TABEL CAPAIAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	40,5%	40,5%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	40,5%	40,5%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	80,0%	80,0%
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Selatan	80,0%	80,0%
Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Barito Selatan	1,0%	1,0%
Pemerintah Kabupaten Barito Timur	24,0%	24,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	24,0%	24,0%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	47,0%	47,0%
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Timur	47,0%	47,0%
Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Barito Timur	1,0%	1,0%
Pemerintah Kabupaten Barito Utara	31,5%	31,5%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	31,5%	31,5%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	62,0%	62,0%
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Barito Utara	62,0%	62,0%
Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Barito Utara	1,0%	1,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Bengkalis	28,7%	28,7%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	28,7%	28,7%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Bengkalis	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	42,5%	42,5%
Indikator Integrasi ILOK di Bengkalis Integrasi IUP di Bengkalis	56,0% 29,0%	56,0% 29,0%
Pemerintah Kabupaten Berau	63,3%	63,3%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	63,3%	63,3%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Berau	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	94,5%	94,5%
Indikator Integrasi ILOK di Berau Integrasi IUP di Berau	93,0% 96,0%	93,0% 96,0%
Pemerintah Kabupaten Blitar	100,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	100,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	100,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Blitar	100,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel	71,7%	80,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	71,7%	80,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	75,0%	100,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Boven Digoel	75,0%	100,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	70,0%	70,0%
Indikator Integrasi ILOK di Boven Digoel Integrasi IUP di Boven Digoel	70,0% 70,0%	70,0% 70,0%
Pemerintah Kabupaten Boyolali	50,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	50,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	50,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Boyolali	50,0%	100,0%
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	74,5%	74,5%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	74,5%	74,5%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	49,0%	49,0%
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Gunung Mas	49,0%	49,0%
Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	100,0%	100,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Gunung Mas	100,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	33,0%	33,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	33,0%	33,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Indragiri Hilir	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	49,0%	49,0%
Indikator Integrasi ILOK di Indragiri Hilir Integrasi IUP di Indragiri Hilir	52,0% 46,0%	52,0% 46,0%
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	23,0%	23,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	23,0%	23,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Indragiri Hulu	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	34,0%	34,0%
Indikator Integrasi ILOK di Indragiri Hulu Integrasi IUP di Indragiri Hulu	36,0% 32,0%	36,0% 32,0%
Pemerintah Kabupaten Indramayu	50,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	50,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	50,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Indramayu	50,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Jayapura	80,0%	80,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	80,0%	80,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	100,0%	100,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Jayapura	100,0%	100,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	70,0%	70,0%
Indikator Integrasi ILOK di Jayapura Integrasi IUP di Jayapura	70,0% 70,0%	70,0% 70,0%
Pemerintah Kabupaten Kampar	41,5%	41,5%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya	25,0%	25,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	25,0%	25,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Kampar	25,0%	25,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	47,0%	47,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	75,0%	75,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kampar	75,0%	75,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	33,0%	33,0%
Indikator Integrasi ILOK di Kampar Integrasi IUP di Kampar	28,0% 38,0%	28,0% 38,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Kapuas	67,5%	67,5%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	67,5%	67,5%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	60,0%	60,0%
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Kapuas	60,0%	60,0%
Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	75,0%	75,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kapuas	75,0%	75,0%
Pemerintah Kabupaten Katingan	22,5%	22,5%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	22,5%	22,5%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	44,0%	44,0%
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Katingan	44,0%	44,0%
Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Katingan	1,0%	1,0%
Pemerintah Kabupaten Keerom	1,0%	1,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,0%	1,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Keerom	1,0%	1,0%
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	46,0%	58,5%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	46,0%	58,5%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	17,0%	17,0%
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Kotawaringin Barat	17,0%	17,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat		
Percepatan implementasi kebijakan satu peta		
Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	75,0%	100,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kotawaringin Barat	75,0%	100,0%
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	69,5%	70,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	69,5%	70,0%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	39,0%	40,0%
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Kotawaringin Timur	39,0%	40,0%
Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	100,0%	100,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kotawaringin Timur	100,0%	100,0%
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	17,7%	17,7%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	17,7%	17,7%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kuantan Singingi	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	26,0%	26,0%
Indikator Integrasi ILOK di Kuantan Singingi Integrasi IUP di Kuantan Singingi	34,0% 18,0%	34,0% 18,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	91,7%	91,7%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	91,7%	91,7%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	75,0%	75,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kutai Barat	75,0%	75,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	100,0%	100,0%
Indikator Integrasi ILOK di Kutai Barat Integrasi IUP di Kutai Barat	100,0% 100,0%	100,0% 100,0%
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	48,8%	61,3%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya	50,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	50,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Kutai Kartanegara	50,0%	100,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	48,3%	48,3%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kutai Kartanegara	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	72,0%	72,0%
Indikator Integrasi ILOK di Kutai Kartanegara Integrasi IUP di Kutai Kartanegara	96,0% 48,0%	96,0% 48,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	100,0%	100,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	100,0%	100,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	100,0%	100,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Kutai Timur	100,0%	100,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	100,0%	100,0%
Indikator Integrasi IUP di Kutai Timur	100,0%	100,0%
Pemerintah Kabupaten Lamandau	4,0%	4,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	4,0%	4,0%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	7,0%	7,0%
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Lamandau	7,0%	7,0%
Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Lamandau	1,0%	1,0%
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	100,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBP dan Pendapatan Lainnya	100,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	100,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Lombok Timur	100,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	67,0%	67,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	67,0%	67,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mahakam Ulu	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	100,0%	100,0%
Indikator Integrasi ILOK di Mahakam Ulu Integrasi IUP di Mahakam Ulu	100,0% 100,0%	100,0% 100,0%
Pemerintah Kabupaten Mamuju	1,0%	1,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,0%	1,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mamuju	1,0%	1,0%
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	40,7%	40,7%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	40,7%	40,7%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mamuju Tengah	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	60,5%	60,5%
Indikator Integrasi ILOK di Mamuju Tengah Integrasi IUP di Mamuju Tengah	83,0% 38,0%	83,0% 38,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Mappi	57,0%	57,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	57,0%	57,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mappi	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	85,0%	85,0%
Indikator Integrasi ILOK di Mappi Integrasi IUP di Mappi	70,0% 100,0%	70,0% 100,0%
Pemerintah Kabupaten Merauke	85,0%	85,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	85,0%	85,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	100,0%	100,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Merauke	100,0%	100,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	70,0%	70,0%
Indikator Integrasi IUP di Merauke	70,0%	70,0%
Pemerintah Kabupaten Mimika	52,5%	52,5%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya	50,0%	50,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	50,0%	50,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Mimika	50,0%	50,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	53,3%	53,3%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Mimika		
Percepatan implementasi kebijakan satu peta		
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Mimika	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	79,5%	79,5%
Indikator Integrasi ILOK di Mimika Integrasi IUP di Mimika	89,0% 70,0%	89,0% 70,0%
Pemerintah Kabupaten Murung Raya	40,0%	89,5%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	40,0%	89,5%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	79,0%	79,0%
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Murung Raya	79,0%	79,0%
Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	100,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Murung Raya	1,0%	100,0%
Pemerintah Kabupaten Nabire	47,0%	47,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	47,0%	47,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Nabire	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	70,0%	70,0%
Indikator Integrasi ILOK di Nabire Integrasi IUP di Nabire	70,0% 70,0%	70,0% 70,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu	23,0%	33,7%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	23,0%	33,7%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Pasangkayu	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	34,0%	50,0%
Indikator Integrasi ILOK di Pasangkayu Integrasi IUP di Pasangkayu	30,0% 38,0%	50,0% 50,0%
Pemerintah Kabupaten Paser	1,0%	1,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	1,0%	1,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Paser	1,0%	1,0%
Pemerintah Kabupaten Pelalawan	55,7%	62,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	55,7%	62,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	100,0%	100,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Pelalawan	100,0%	100,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	33,5%	43,0%
Indikator Integrasi ILOK di Pelalawan Integrasi IUP di Pelalawan	37,0% 30,0%	45,0% 41,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	34,7%	34,7%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	34,7%	34,7%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Penajam Paser Utara	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	51,5%	51,5%
Indikator Integrasi ILOK di Penajam Paser Utara Integrasi IUP di Penajam Paser Utara	75,0% 28,0%	75,0% 28,0%
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	17,0%	54,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	17,0%	54,0%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	33,0%	33,0%
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Pulang Pisau	33,0%	33,0%
Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	75,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Pulang Pisau	1,0%	75,0%
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	17,0%	17,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	17,0%	17,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Rokan Hilir	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	25,0%	25,0%
Indikator Integrasi ILOK di Rokan Hilir Integrasi IUP di Rokan Hilir	36,0% 14,0%	36,0% 14,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	37,3%	38,7%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	37,3%	38,7%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Rokan Hulu	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	55,5%	57,5%
Indikator Integrasi ILOK di Rokan Hulu Integrasi IUP di Rokan Hulu	58,0% 53,0%	62,0% 53,0%
Pemerintah Kabupaten Sarmi	47,0%	47,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	47,0%	47,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Sarmi	1,0%	1,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	70,0%	70,0%
Indikator Integrasi ILOK di Sarmi Integrasi IUP di Sarmi	70,0% 70,0%	70,0% 70,0%
Pemerintah Kabupaten Semarang	100,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya	100,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	100,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Semarang	100,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Seruyan	13,5%	13,5%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	13,5%	13,5%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	26,0%	26,0%
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Seruyan	26,0%	26,0%
Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Seruyan	1,0%	1,0%
Pemerintah Kabupaten Siak	52,0%	52,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	52,0%	52,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	100,0%	100,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Siak	100,0%	100,0%
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	28,0%	28,0%
Indikator Integrasi ILOK di Siak Integrasi IUP di Siak	37,0% 19,0%	37,0% 19,0%
Pemerintah Kabupaten Sleman	100,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya	100,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	100,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Sleman	100,0%	100,0%
Pemerintah Kabupaten Sukamara	5,5%	5,5%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	5,5%	5,5%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	10,0%	10,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kabupaten Sukamara		
Percepatan implementasi kebijakan satu peta		
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Sukamara	10,0%	10,0%
Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Sukamara	1,0%	1,0%
Pemerintah Kabupaten Tangerang	50,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya	50,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	50,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Tangerang	50,0%	100,0%
Pemerintah Kabupaten Wonogiri	100,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya	100,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	100,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kabupaten Wonogiri	100,0%	100,0%
Pemerintah Kota Banjarmasin	50,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya	50,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	50,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Banjarmasin	50,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kota Depok	100,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBP dan Pendapatan Lainnya	100,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	100,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Depok	100,0%	100,0%
Pemerintah Kota Lubuk Linggau	25,0%	50,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBP dan Pendapatan Lainnya	25,0%	50,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	25,0%	50,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Lubuk Linggau	25,0%	50,0%
Pemerintah Kota Makassar	50,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBP dan Pendapatan Lainnya	50,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	50,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Makasar	50,0%	100,0%
Pemerintah Kota Padang	50,0%	50,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBP dan Pendapatan Lainnya	50,0%	50,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	50,0%	50,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Padang	50,0%	50,0%
Pemerintah Kota Palangkaraya	28,7%	45,3%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBP dan Pendapatan Lainnya	50,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	50,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Palangkaraya	50,0%	100,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kota Palangkaraya		
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	18,0%	18,0%
Output 1 Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah	35,0%	35,0%
Indikator Jumlah tindak lanjut lokus di Palangkaraya	35,0%	35,0%
Output 2 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Palangkaraya	1,0%	1,0%
Pemerintah Kota Palembang	50,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	50,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	50,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Palembang	50,0%	100,0%
Pemerintah Kota Pekanbaru	53,8%	60,3%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNPB dan Pendapatan Lainnya	100,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	100,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Pekanbaru	100,0%	100,0%
Percepatan implementasi kebijakan satu peta	38,3%	47,0%
Output 1 Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	1,0%	1,0%
Indikator Jumlah RDTR di Kab/Kota: Pekanbaru	1,0%	1,0%

Instansi/Aksi/Output/Indikator	TW VII	TW VIII
Pemerintah Kota Pekanbaru		
Percepatan implementasi kebijakan satu peta		
Output 2 Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua	57,0%	70,0%
Indikator Integrasi ILOK di Pekanbaru Integrasi IUP di Pekanbaru	57,0% 57,0%	70,0% 70,0%
Pemerintah Kota Pontianak	50,0%	100,0%
Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Pembenahan PNBPN dan Pendapatan Lainnya	50,0%	100,0%
Output 1 Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Perbaikan pelayanan Publik Pengujian Kendaraan Bermotor	50,0%	100,0%
Indikator Meningkatnya layanan uji kendaraan bermotor melalui peningkatan level akreditasi UP-UBKB dari B ke A di Kota Pontianak	50,0%	100,0%

V. PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebagaimana amanat Perpres No. 54 Tahun 2018, khususnya pada pasal 9 yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan maka dapat disampaikan bahwa hingga 3 tahun pelaksanaan Stranas PK, upaya sinergi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D) dalam pelaksanaan program-program pencegahan korupsi sudah makin terkonsolidasi. Begitu juga dengan pelibatan pemangku kepentingan lainnya, terutama masyarakat sipil dan media. Berikut laporan pelibatan pemangku kepentingan yang melibatkan kelompok instansi pemerintah, masyarakat sipil, dan media komunikasi.

1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Pada periode pelaksanaan aksi PK 2021-2022, Stranas PK melibatkan 48 kementerian/ lembaga, 34 provinsi, dan 57 kabupaten/kota untuk bersama-sama melaksanakan dan memonitor 12 Aksi PK.

2. Masyarakat sipil dan mitra pembangunan

Pelibatan masyarakat sipil dalam kerangka program pencegahan korupsi pada prinsipnya bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan, namun juga merupakan upaya kesadaran bersama guna mendukung pencapaian target-target pencegahan korupsi secara lebih nyata dan berkesinambungan. Berikut gambaran proses bagaimana Stranas PK melibatkan masyarakat sipil dalam aksi-aksi pencegahan korupsi sejak tahun 2018:

- Pada tahun 2018, paling sedikit 18 CSO nasional telah terlibat dalam beberapa pertemuan dan koordinasi guna membahas perumusan dan penyusunan Aksi PK. Di antara CSO-CSO tersebut adalah TII, ICW, Kemitraan, Auriga, PWYP, Fitra, IBC, LeIP, MAPPI, CSGAR, CITA, Lakpesdam, IPW, IBL, Pattiro, PSHK, FWI, WRI
- Pada tahun 2019-2020, diseminasi dan monitoring pelaksanaan aksi-aksi PK juga telah dilakukan di daerah-daerah dengan melibatkan LSM lokal, media, dan akademisi di 27 provinsi Setnas PK. Lalu secara khusus, Tim Monev melakukan pemantauan pelaksanaan aksi di daerah dengan menggandeng ICW dan TII berserta jaringan CSO lokal di beberapa Provinsi yakni Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara
- Pada medio 2020, Setnas PK kembali menggandeng CSO nasional seperti TII dan ICW serta IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) untuk melakukan pengukuran *outcome* terhadap 7 aksi PK
- Selain CSO, pemangku kepentingan lain seperti UNODC, UNDP, USAID, AIPJ2, GIZ, The Asia Foundation, dan World Bank adalah mitra pembangunan yang terlibat aktif membantu dan bekerja sama dengan Setnas PK. UNDP, UNODC, USAID, dan AIPJ2 aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemantauan aksi di daerah. UNDP juga aktif bekerja sama dengan Stranas PK menyiapkan instrumen-instrumen komunikasi publik. UNODC, TAF, dan World Bank menaruh perhatian pada advokasi aksi Perencanaan-Penganggaran Berbasis Elektronik, walaupun sampai saat ini hanya UNODC yang konkrit bekerja sama dengan Stranas PK. Sementara GIZ aktif ikut dalam pendampingan aksi Penetapan Kawasan Hutan dan Implementasi Kebijakan Satu Peta
- Pada medio 2022, masyarakat sipil yang didukung oleh program Cegah Usaid dan dikoordinir oleh Kemitraan kembali terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan rencana aksi periode 2023-2024

3. Strategi Komunikasi

Pada periode pertama (2019-2020), Stranas PK sebagai sebuah program pencegahan korupsi belum terlalu dikenal, baik oleh Kementerian/Lembaga maupun masyarakat luas. Sehingga upaya-upaya yang sangat aktif terus dilakukan, selain berkoordinasi secara intensif, juga perlu strategi komunikasi yang lebih sistematis sehingga dapat memberi ruang bagi Stranas PK memperkenalkan, membangun, dan menciptakan interaksi antara Stranas PK dan *stakeholders* lainnya, termasuk pemerintah dan masyarakat umum.

Melalui kanal-kanal komunikasi, Stranas PK dapat mengkomunikasikan kepada publik kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan, output atau capaian apa yang dihasilkan dan perubahan apa saja yang sudah terjadi yang berkontribusi terhadap upaya pencegahan korupsi. Oleh karenanya mulai periode kedua (2021-2022), secara aktif dilakukan upaya-upaya komunikasi kepada publik. Alhasil tingkat keterkenalan Stranas PK meningkat tajam, *sense of ownership* dan *engagement* mulai terlihat di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemda. Berikut rekapitulasi kegiatan-kegiatan komunikasi yang telah dijalankan sampai periode B24 (triwulan VIII) berakhir:

1. Social Media

Stranas PK saat ini sudah memiliki empat akun media sosial yang menjadi kanal komunikasi kegiatan-kegiatan Stranas PK kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sipil dan kementerian/lembaga/daerah.



Instagram @stranaspk_official

Per Juli hingga Desember 2022, akun Instagram Stranas PK telah memiliki 7.000 *followers* dengan jangkauan ke lebih dari 16.000 orang. Naik dari periode sebelumnya 2.800 *followers* yang jangkauannya mencapai 3.000 orang



Twitter @Stranas_PK

Akun di media sosial twitter baru dibuka pada April 2022. Hingga Desember 2022, akun twitter Stranas_PK telah mendapatkan 50 *followers* dengan jumlah *tweets* hingga Agustus 2022 sebanyak 272. Dengan jumlah *tweets* tersebut, mampu menjangkau sebanyak 4.839 orang hingga Agustus 2022



Facebook Stranas PK

Di media sosial Facebook, Stranas PK memiliki akun dengan versi *fanpage* yang hingga Desember 2022 telah memiliki 200 *followers*. Jumlah postingan per Juli-Desember 2022 mencapai 103 *items* yang tersaji dalam *timeline* Facebook Stranas PK dengan jangkauan *fanpage* sebanyak 202 orang rata-rata tiap bulannya



Youtube StranasPK_Official

Per Desember 2022 akun Youtube StranasPK mencapai 1856 *subscribers* dengan jangkauan lebih dari 33.374 *viewers*

2. Website

Guna menjangkau lebih luas lagi diseminasi kegiatan Stranas PK maka website www.stranaspk.id telah memuat dokumentasi kegiatan untuk kepentingan publikasi baik itu siaran pers, berita serta foto-foto kegiatan Stranas PK. Per Juli - Desember 2022 di Website Stranas PK sudah terdapat 10 siaran pers serta 37 berita. Publikasi di website ini bertujuan meningkatkan *ownership* dari *stakeholders* terhadap Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK dan meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap aksi-aksi yang diusung Stranas PK

3. Webinar Series

Untuk mensosialisasikan kegiatan aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Stranas PK, telah dilaksanakan serial webinar dengan mengambil judul "Bincang Stranas PK". Sepanjang tahun 2021 hingga Desember 2022, serial "Bincang Stranas PK" telah dilaksanakan sebanyak 12 series dengan total peserta mencapai 12.000 orang

4.  **FGD Media**

FGD dengan media *multiplatform*, dengan harapan bisa terekspose di semua *platform* ; televisi, cetak, online. Peserta CNN Indonesia, Berita Satu, Detik, SEA Today, TV One, ANTV. Hasilnya, media peserta FGD memiliki pemahaman tentang Stranas PK dan bisa membedakan dengan aksi pencegahan yang dilakukan KPK. Beberapa media aktif menuliskan kegiatan-kegiatan Stranas di medianya. Sementara Detik, menambahkan dengan rencana liputan khusus (*indepth reporting*) untuk mendorong usaha aksi pencegahan korupsi

5.  **Hakordia (Hari Anti Korupsi Sedunia) yang diselenggarakan KPK**

Stranas PK terlibat aktif menjadi peserta mengisi *booth* pameran dengan kegiatan diantaranya pembuatan KTP atau cetak ulang KTP gratis yang berkerjasama dengan Dukcapil, dengan tujuan sosialisasi aksi utilisasi NIK. Selain itu Stranas juga mengisi webinar atau *talkshow* di 2 hari yang berbeda. Tanggal 9 : Launching Jaga Pelabuhan (kolaborasi Stranas PK aksi pelabuhan dan Jaga.id milik KPK), Webinar Sosialisasi TKBM, dan Webinar Soft Launching SIPD. Dikedua acara webinar dan *launching*, menghadirkan seluruh *stakeholder* secara *off air* maupun *online* dari seluruh Indonesia

6.  **Momentum Hari Anti Korupsi Se-Dunia**

Stranas PK tidak tenggelam dengan berita KPK. Justru lebih banyak muncul di media massa dibanding berita mengenai KPK. Contoh di berita harian televisi nasional dan media cetak serta online, juga *blocking time* :

- *Blocking time* saat Hari Anti Korupsi Se Dunia 9 Desember di CNN Indonesia dalam acara Indonesian Forward dengan menghadirkan Koordinator Harian Stranas PK (Niken Ariati)
- Insight With Desy Anwar CNN Indonesia dengan menghadirkan Koordinator Pelaksana Stranas PK (Bapak Pahala Nainggolan)
- Wawancara khusus dengan Koordinator Palaksana Stranas PK (Pahala Nainggolan) di berita sore Berita Satu
- Wawancara khusus Koordinator Palaksana Stranas PK (Pahala Nainggolan) di Berita Pagi SEA Today
- Segmen khusus Right Angle CNN Indonesia selama 2 hari berturut – turut , tanggal 9 dan 10 Desember 2022

7.  **Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi**

Acara *off air* mengumpulkan Timnas PK, K/L terlibat, dan media dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023 – 2024 di Thamrin Nine Jakarta. Selain penandatanganan SKB Timnas juga pemberian SKB kepada pemangku aksi. Acara diliput oleh lebih dari 30 media nasional berbagai *platform*

Kendala yang dihadapi dalam upaya pemberitaan dan sosialisasi melalui berbagai media

- Timnas PK yaitu Bappenas, KSP, Kemendagri, Kemenpan RB, bahkan KPK sendiri kurang memiliki berita mengenai aksi Stranas PK
- Kurang sinergi dengan humas Timnas
- Kurang bersinergi dengan K/L pelaksana aksi

VI. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022 ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi baik oleh Tim Nasional maupun Kementerian/Lembaga/Pemda yang menjadi penanggung jawab aksi.

Hasil dari laporan ini akan menjadi rujukan bersama mengenai apa, bagaimana dan sudah sampai dimana aksi-aksi pencegahan korupsi dilakukan oleh Pemerintah; dan bagaimana Pemerintah, dalam hal ini Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terus konsisten menciptakan dan mendorong program atau inisiatif pencegahan korupsi, baik yang ada di Pusat maupun di Daerah.

Stranas PK yang dipimpin oleh KPK, Kemendagri, KemenPANRB, Bappenas dan KSP telah memungkinkan terjadinya kolaborasi dan sinergi yang cukup baik antar Kementerian, Lembaga, dan Pemda dalam menjalankan aksi-aksi pencegahan korupsi secara bersama-sama. Tujuan utamanya adalah bagaimana kolaborasi dan sinergi ini dapat mempercepat terciptanya *"the enabling environment"* atau pra-kondisi demi terwujudnya Indonesia yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi.

**SEKRETARIAT NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI
(SETNAS PK)**



 Gedung KPK
Jl. HR Rasuna Said Kav. C1
Setiabudi, Jakarta Selatan

 021-25578300 ext. 8014

 stranaspk.id

 @stranaspk_official

 StranasPK Official

 @stranas_pk

 Stranas PK

SCAN HERE

